



**RUPIAH DIGEMPUR
DOLAR EKONOMI
BISA AMBYAR**
**ELEKTABILITAS
HERMAN DERU BELUM
BISA DISALIP**
**LURY ELZA SIAP
LANJUTKAN
PROGRAM ALEX
NOERDIN**
**LIBUR LEBARAN
PENUH CUAN
POTENSI EKONOMI
RP400 TRILIUN**
**MAWARDI YAHYA
KERAP MENGUBAH
PETA POLITIK
SUMSEL**
**ZUL-ROHMI AKAN
'BERCERAI' DI
PILGUB NTB**
**TARGET KEMENANGAN
PAN UNTUK
DESY RATNASARI**

HAPPY ENDING PRABOWO GIBRAN



Rp75.000,-

**CHARMA APRIANTO
DARI AKTIVIS KINI
GENCARKAN PROGRAM
PRO RAKYAT**
**GERAKAN SERENTAK
AGUS FATONI BIKIN
KEMAJUAN SUMSEL**
**TEDDY MEILWANSYAH
SOSOK BIROKRAT
BERSAHAJA**

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

SELAMAT & SUKSES ATAS TERPILIHNYA

**PRESIDEN KE-8 RI
DAN WAKIL PRESIDEN KE-14 RI**



PRABOWO SUBIANTO

GIBRAN RAKABUMING RAKA

EDISI
BULAN
APRIL
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Sempat muncul yang disebut-sebut sebagai bocoran putusan Mahkamah Konstitusi. Toh, proses peradilan MK berlangsung terbuka.



22

INFO SUMSEL

Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dimanfaatkan Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selain menggelar open house di rumah dinas, Agus Fatoni juga bersilaturahmi ke berbagai tempat untuk berbagi kebahagiaan bersama.



32

INFO KALTIM

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggara Seberang.



34

INFO PROFIL

Mantan Gubernur Sumsel H Herman Deru memiliki karir cemerlang di dunia politik, sebelumnya Herman Deru atau yang akrab disapa HD ini adalah wiraswasta dan mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga menjadi Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Gubernur Sumsel.



64

INFO NASIONAL

Sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Perhubungan siap diresmikan pada 2024 untuk menunjang kelancaran transportasi dalam negeri.



72

INFO MUBA

Satu demi satu permasalahan yang menyangkut fasilitas umum masyarakat maupun infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin berhasil diselesaikan Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud. Mulai dari jalan, penerangan hingga fasilitas kesehatan telah dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya.



87

INFO KHUSUS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, 31 Maret 2024. Sejumlah pejabat kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota digadag-dag bakal ikut maju dalam kontestasi yang akan digelar pada 27 November mendatang.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

54 INFO PILKADA

78 INFO OKI

82 INFO ISTANA

86 KAJI

50

INFO PROFIL

Nama mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin kini menggema lagi. Setelah sempat redup akibat tersandung kasus korupsi kini diangkat kembali oleh putri bungunya Lury Elza Alex Noerdin.

MAHKAMAH

Sehari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, nama hakim konstitusi yang juga Ketua MK menjadi trending topic, topik yang menjadi kecenderungan utama perhatian para netizen di pangkalan (platform) media sosial x (twitter). Apa pasal?

Bukan apa soal, melainkan apa pasal. Ya, karena Suhartoyo terkait dengan putusan yang lazimnya merujuk pada pasal-pasal dalam kodifikasi hukum, baik di ranah pidana, perdata, maupun tata negara. Tata negara ini tentu terkait langsung dengan MK.

Salah satu wacana terkait trending topic itu adalah penyesalan mengapa Suhartoyo tidak memihak agar putusan Mahkamah mengabulkan permohonan pasangan 01 dan 03 dalam sengketa Pilpres 2024. Pada sisi lain, Suhartoyo justru memilih dissenting opinion (pendapat berbeda) saat Mahkamah mengambil putusan MK No 90 Tahun 2023 yang menjadi jalan lempang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Sekiranya Suhartoyo sebagai Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua MK memilih pendapat mengabulkan permohonan pasangan 01 dan 03, maka yang terjadi adalah empat hakim mengabulkan permohonan, empat lainnya menolak. Kemungkinan putusan akhirnya, bisa saja MK menyerahkan lagi putusan sengketa Pilpres 2024 kepada rakyat, misalnya dengan pemungutan suara ulang, di sebagian bahkan seluruh daerah pemilihan.

"Saya mungkin asumsi dulu seandainya ketua Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissenting-nya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan, karena posisinya kan jadi empat-empat. Ya kan?" ujar Bambang Widjojanto, salah satu anggota Tim Hukum pasangan Anies-Muhaimin.

Namun, kemungkinan itu tak terjadi. Hanya tiga hakim konstitusi yang cenderung mengabulkan permohonan pasangan 01 dan 03. Sedangkan lima hakim lainnya cenderung menolak sehingga kedudukannya adalah lima menolak dan tiga mengabulkan. Alhasil, ya sebagaimana isi putusan MK, menolak seluruhnya permohonan pasangan 01 dan 03.

"Jadi kalau istilahnya kita ada delapan hakim konstitusi kita itu menangnya tiga, jadi kita bukan kalah, menangnya tiga, yang lima pihak sana ya kira-kira begitu," ucap Muhammad Syaugi Alaydrus, Ketua Tim Nasional Anies-Muhaimin, pasangan 01.

Apapun, putusan akhir sengketa Pilpres 2024 yang telah ketuk palu itu yang menjadi dasar langkah ke depan. Kita kembalikan saja landasannya secara konstitusional. Putusan itu bersifat akhir dan mengikat, final and binding.

Lebih dari itu, sudah selayaknya kita kembali menengok lagi konstitusi dasar tujuan berbangsa dan bernegara: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Sudahkan tujuan kita berbangsa dan bernegara selaras dengan cara kita mencapainya? Putusan, tindakan, dan jalur yang tepat akan lebih memudahkan pencapaian tujuan itu. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal
DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Usman Rizal
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan
PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Rusdiyono
REDAKTUR: Melati Tagore, Irma Yani, Nina Erlina, Ega Tri Gustina
REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Nefri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M Iqbal, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fiqri
EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles
TATA LETAK: Sujatmiko
MEDIA SOSIAL: Haidir Ali
KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida
SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah
PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah
DISTRIBUSI: Abdul Muchtar
BANK ACCOUNT: A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



AKHIRNYA PRABOWO JADI JUGA PRESIDEN RI

Sempat muncul yang disebut-sebut sebagai bocoran putusan Mahkamah Konstitusi. Toh, proses peradilan MK berlangsung terbuka.

Delapan hakim di Mahkamah Konstitusi harus mengam-
bil keputusan. Ketua Majelis
Hakim Konstitusi membaca-
kan putusan setelah melalui beberapa
sesi Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH) sejak 6 April sampai 21 April 2024.
"Tidak boleh lebih dari 14 hari kerja," kata
Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Semuanya berawal dari rekapitu-
lasi hasil Pemilihan Presiden 2024 oleh
Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 20
Maret 2024. KPU menetapkan keme-

lah sengketa yang harus diputus MK.
Putusan MK ini bersifat final dan mengi-
kat, menjadi penentu akhir pemenang
Pilpres 2024.

Sidang pendahuluan sengketa hasil
pemilu berlangsung di MK pada Rabu
27 Maret 2023. Pasangan 01 menyam-
paikan permohonannya pada pagi hari
sekitar pukul 8.00. Sedangkan pasan-
gan 03 menyampaikannya pada siang
hari sekitar pukul 13.00 WIB.

Tim hukum pasangan 01 Anies-Mu-
haimin (Amin) menyampaikan sejumlah

gubah ketentuan soal syarat pencalo-
nan presiden dan wakil presiden.

"Apakah Pilpres 2024 kemarin telah
dijalankan secara bebas, jujur, dan adil?
Izinkan kami menyampaikan jawabnya,
tidak, yang terjadi adalah sebaliknya,"
kata Anies saat sidang pendahuluan
sengketa hasil pemilu di gedung MK,
Rabu 27 Maret 2024.

Independensi yang seharusnya men-
jadi pilar utama dalam penyelenggaraan
pemilu, sambung Anies, telah tergerus
akibat intervensi kekuasaan yang tidak
seharusnya terjadi. Oleh sebab itu,
pasangan 01 melalui tim hukumnya
memohon MK membatalkan keputusan
KPU yang menetapkan Prabowo-Gibran
sebagai pemenang Pilpres 2024.

Tim Hukum Amin meminta agar
Prabowo-Gibran didiskualifikasi, lalu
KPU menjalankan pemungutan suara
ulang tanpa mereka. Pilihan lainnya,
sebagaimana tercantum dalam doku-
men permohonan kubu Anies, mereka
meminta hanya Gibran yang didiskuali-
fikasi dan KPU melakukan pemungutan
suara ulang, yang bisa diikuti kembali
oleh Prabowo setelah mengganti calon
wapresnya.

Sama halnya dengan pasangan 1,
tim hukum pasangan 3 Ganjar - Mahfud,
memohon MK membatalkan keputusan
KPU yang menetapkan Prabowo Subi-
anto dan Gibran Rakabuming Raka se-
bagai pemenang Pilpres 2024. Tim hu-
kum pasangan 3 meminta pula agar MK
mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, serta
memerintahkan KPU untuk melakukan
pemungutan suara ulang tanpa mereka.

Alasannya, sebagaimana tertulis
dalam dokumen permohonan kubu
Ganjar-Mahfud, pasangan 03 mengang-
gap telah terjadi pelanggaran terstruk-
tur, sistematis, dan masif (TSM) dalam
Pilpres 2024. Terutama dalam bentuk
nepotisme yang dilakukan Presiden
Joko Widodo untuk memenangkan
Prabowo-Gibran dalam satu putaran,
serta pelanggaran prosedur pemilu,

Nepotisme Jokowi disebut mela-
hirkan penyalahgunaan kekuasaan,
termasuk dengan menggerakkan adik
iparnya Anwar Usman sebagai ketua MK
untuk mengubah aturan main agar bisa
mendaftar Gibran sebagai cawapres
serta menggunakan program bansos
untuk memenangkan Prabowo-Gibran.



nangan telak pasangan nomor urut 2
Prabowo Subianto - Gibran Rakabum-
ing Raka dengan meraup suara 58,8
persen. Sedangkan pasangan nomor
urut 1 Anies Baswedan - A Muhaimin
Iskandar dan pasangan nomor urut 3
Ganjar Pranowo - Mahfud MD menilai
kemenangan telak itu diperoleh dengan
kecurangan.

Selanjutnya pasangan nomor urut 1
dan 3 meminta Mahkamah Konstitusi
(MK) membatalkan penetapan Prabowo
Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka sebagai pemenang pemilu serta
mendiskualifikasi mereka. Maka terjadi-

kecurangan yang disebut terjadi di Pil-
pres 2024, termasuk saat KPU menerima
pendaftaran Gibran sebagai wapres
sebelum merevisi peraturan mengenai
syarat pencalonan, serta nepotisme
Presiden Joko Widodo yang mengun-
tungkan Prabowo-Gibran demi "mel-
anggengkan kekuasaannya".

Pelanggaran lain yang disebut ada-
lah penyalahgunaan program bantuan
sosial atau bansos, keterlibatan seju-
muh kepala daerah untuk menggerakkan
struktur di bawahnya demi memenang-
kan Prabowo-Gibran, serta intervensi
kekuasaan yang membuat MK men-

Selain itu, Jokowi disebut memanfaatkan TNI dan Polri untuk “mengintimidasi masyarakat” serta ratusan kepala daerah untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran. “Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan,” kata Ganjar saat sidang.

Ia menegaskan menolak dibawa mundur ke masa sebelum Reformasi. “Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat Reformasi,” sambung Ganjar.

Sedangkan Mahfud berharap MK dapat mengambil langkah untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. “Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah,” kata Mahfud.

Selanjutnya pada Kamis 28 Maret 2024 MK menjadwalkan sidang untuk mendengarkan jawaban KPU sebagai termohon, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Pada hari yang sama, MK meminta tim hukum pemohon menyerahkan daftar nama saksi dan ahli, yang totalnya tak boleh lebih dari 19 orang. Terkait hal ini, Heru Widodo, salah satu advokat tim Anies-Muhaimin, sempat meminta MK mengambil diskresi (putusan mandiri) agar mereka bisa menyerahkan daftar namanya pada Sabtu, 30 Maret 2024, dua hari dari jadwal yang ditetapkan MK dan dua hari pula sebelum dimulainya pemeriksaan perkara pada Senin, 1 April 2024.

“Mohon dipertimbangkan, ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Itu pertimbangannya,” kata Heru.

Ketua MK Suhartoyo yang juga Ketua Majelis Hakim menolak permintaan itu. “Kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan, Pak Heru. “Nanti ada persoalan dalam keabsahan persidangan

kita.”

Heru lantas bernegosiasi kembali, meminta agar daftar nama saksi boleh diserahkan pada Senin pagi (01/04) sebelum pemeriksaan. Namun, Suhartoyo kembali menolak, karena itu dianggap terlalu mepet. “Percayakan pada mahkamah. Insya Allah tidak bocor (daftar nama saksi), kecuali Anda sendiri yang membocorkan,” kata Suhartoyo.

Terkait dengan argumentasi dan narasi dua tim pemohon, Ketua tim hukum Prabowo-Gibran, menilai permohonan kubu Anies dan Ganjar banyak didominasi asumsi alih-alih bukti kon-



ret. “Dalam sejarah pemilu kita, maupun peraturan perundang-undangan kita, belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh,” kata Yusril.

Karena itu, tim hukum Prabowo-Gibran yakin dapat membantah seluruh dalil yang dikemukakan kubu Anies dan Ganjar. Yusril pun menegaskan, Tim Hukum pasangan 2 optimistik MK akan menolak permohonan pasangan 01 dan 03.

Otto Hasibuan dari tim hukum Prabowo-Gibran juga mempertanyakan permohonan ke MK yang ditujukan kepada KPU, tapi justru banyak membahas apa yang dilakukan pemerintah, khususnya presiden. “Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden [Jokowi], dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka,” kata Otto.

Mengenai bansos, Hotman Paris Hutapea, advokat lainnya dari tim Prabowo-Gibran yang angkat bicara. Ia mengatakan bansos adalah program pemerintah yang sah dan sesuai dengan peraturan. Menurut dia MK pun tidak punya kewenangan menilai bansos.

Terkait dengan itu, Hotman menyatakan urusan Bansos itu malah melemahkan argumentasi permohonan kepada MK. “Dalam sejarah karier saya, inilah contoh surat permohonan atau sejenis gugatan yang paling mengambang,” kata Hotman tentang permohonan pasangan Amin.

Nah, berlangsung selama satu bulan penuh sejak penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, proses sengketa juga diwarnai oleh pengajuan amicus curiae, sahabat pengadilan. Apakah akan menjadi bahan pertimbangan? Akan diketahui ketika saatnya MK memutuskan sengketa dan permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan pakar Hukum Pemilu sekaligus Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengemukakan MK akan tetap pragmatis terkait pencalonan pasangan calon peserta pemilu. Menurut dia MK tidak akan sampai pada mendiskualifikasi calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pemilu seperti yang digugat oleh Tim hukum pasangan calon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Tim Hukum pasangan calon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. ●

PRABOWO PRESIDEN!!!

Sengketa Pilpres 2024 berakhir dengan putusan yang menolak permohonan pasangan nomor urut 1 dan 3. Dengan begitu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mendapat pengesahan lagi sebagai pemenang Pilpres 2024.

Prabowo Presiden!!!

Sengketa Pilpres 2024 berakhir dengan putusan yang menolak permohonan pasangan nomor urut 1 dan 3. Dengan begitu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mendapat pengesahan lagi sebagai pemenang Pilpres 2024.

Majelis hakim konstitusi yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024 itu hanya delapan. Lazimnya, majelis hakim konstitusi berjumlah sembilan orang. Ganjil agar tak terjadi putusan yang menghasilkan suara imbang jika terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion).

Begitulah, majelis sidang sengketa Pilpres 2024 itu ada-

lah Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Satu hakim MK lainnya, Anwar U s m a n

yang juga paman Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak ikut karena mendapat sanksi dari Majelis Kehormatan MK.

Tapi bukan lagi sanksi larangan menyidangkan sengketa Pilpres 2024 bagi Anwar Usman yang menjadi soal. Dengan delapan majelis hakim, soalnya adalah, masih ada kemungkinan perbedaan pendapat para hakim menghasilkan draw, empat hakim ingin mengabulkan permohonan, namun hakim dengan jumlah yang sama menolaknya. Namun, kemungkinan itu tak terjadi. Majelis hakim menolak semua permohonan, baik dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin maupun pasangan 03 Ganjar-Mahfud. Lima hakim menolak, dan tiga lainnya berbeda pendapat (dissenting opinion).

Untuk putusan permohonan pasangan Anies-Muhaimin, majelis menolak permohonan. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Senin, 22 April 2024.

Sebelum sampai pada teks putusan, delapan hakim MK membacakan pertimbangan pokok permohonan gugatan dari pemohon Anies-Muhaimin secara bergantian. Antara lain perihal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang dinilai pasangan nomor urut 1 tidak sah karena adanya intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Presiden RI serta ayah dari Gibran.

Sedangkan Hakim MK Arief Hidayat menyatakan tak ada bukti soal dugaan intervensi

Jokowi dalam perubahan syarat pasangan calon dalam Pilpres 2024 yang menguntungkan Gibran. Persyaratan Gibran maju cawapres pendamping Prabowo juga dinilai

MK tak ada permasalahan. "Menurut mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon



wakil presiden dari pihak terkait,” ujar Arief.

Majelis hakim MK juga mematahkan dalil permohonan lainnya dari kubu 01 seperti dugaan cawe-cawe Jokowi untuk memenangkan duet Prabowo-Gibran. Hakim MK Daniel Yusmic menyebutkan dalil pemohon soal cawe-cawe Jokowi tak beralasan hukum. Daniel menjelaskan, bentuk cawe-cawe Jokowi yang dimaksud pemohon tak ada uraian lebih lanjut berupa bukti yang kuat.

“Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna, dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon. Dan, apa bukti tindakan cawe-cawe, demikian,” ungkap Daniel.

Dia menambahkan bukti yang dilayangkan kubu pemohon seperti artikel berita media massa hingga rekaman video belum bisa jadi bukti kuat dugaan cawe-cawe Jokowi. “Tak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi,” jelas Daniel.

Nah, saat mengawali pembacaan putusan, Suhartoyo menyebutkan bahwa putusan ini diambil setelah membaca permohonan Anies-Muhaimin sebagai pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban KPU sebagai termohon. Selanjutnya, membaca dan mendengar keterangan kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dan Bawaslu, serta keterangan saksi, ahli, dan kesimpulan dari Anies-Muhaimin, KPU, Prabowo-Gibran, dan Bawaslu.

Kemudian, lanjut Suhartoyo, MK membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial. MK pun membaca keterangan amicus curiae dari berbagai pihak serta memeriksa alat bukti yang diajukan Anies-Muhaimin, KPU, Prabowo-Gibran, dan Bawaslu.

MK juga menginformasikan bahwa telah menerima puluhan Amicus Curiae

dari berbagai pihak terkait dengan perkara ini. Salah satu yang mencuat adalah Amicus Curiae yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dikutip dari CNN Indonesia. Sebanyak 48 Amicus Curiae telah diajukan dalam perkara ini, mengukuhkan posisinya sebagai jumlah terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 14 yang dibahas oleh hakim. Kriteria pembahasan adalah Amicus Curiae yang masuk sebelum tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Untuk putusan permohonan pasangan Ganjar-Mahfud, tanda-tanda putusan MK serupa dengan Anies-Muhaimin sudah terbaca. Alasannya, permohonan dengan perolehan suara Anies-Muhaim-

pertimbangan dalam putusan terhadap gugatan dari Anies-Muhaimin. MK menyatakan pertimbangan dalam putusan Ganjar-Mahfud bakal banyak sama karena masih terkait dalam satu peristiwa, yakni Pilpres 2024.

MK menyatakan pertimbangan detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Beberapa dalil yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum antara lain soal politisasi bantuan sosial, cawe-cawe ataupun intervensi Presiden Joko Widodo hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.



in yang lebih besar saja sudah ditolak MK. Bagaimana pula permohonan Ganjar-Mahfud yang perolehan suaranya lebih kecil.

Hasil rekapitulasi KPU pada 20 Maret menetapkan pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan suara meraih 96.216.691 (58,58 persen) suara. Selanjutnya pasangan nomor urut 1, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 (24,95 persen) suara, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud meraih 27.050.878 (16,47 persen) suara.

Nah, pada awal pembacaan putusan, majelis hakim konstitusi menyatakan berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Ganjar-Mahfud. Hakim MK tidak membacakan detail poin-poin dalam pertimbangan terhadap putusan ini. Majelis mengatakan pertimbangan dalam putusan ini berkaitan dengan

Dalil-dalil permohonan yang diajukan antara lain soal ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP. Kemudian dalil lainnya terkait tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilu.

Termasuk dalil soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemda, dan pemerintahan desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dalil pemohon yang menyebutkan nepotisme yang dilakukan Presiden untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 dalam satu putaran, menurut MK

tidak beralasan menurut hukum. “Dalil nepotisme Presiden Jokowi dan melancarkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kemendagri, Polri, TNI, pemerintahan desa terhadap dalil itu tidak beralasan menurut hukum,” ungkap majelis.

Alhasil, untuk permohonan Ganjar Mahfud pun putusan MK sama dengan putusan bagi Anies-Muhaimin. “Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap hakim.

Toh tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ketua MK Su-

antarwaga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama (same level of playing field).

Dengan demikian, sambungnya, persaingan yang bebas dan adil antarpesaerta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal dengan level yang sama. “Tidak hanya itu, dalam kontestasi persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya.”

pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.

Saldi juga menyinggung bahwa sejak memutuskan perkara perselisihan tentang hasil pemilu, MK tidak hanya sebatas pada angka-angka statistik semata. Apabila MK dipasung dan dibatasi untuk menilai atau memeriksa angka semata, kata dia, maka derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi direndahkan. Jika hal itu dilakukan, kata Saldi, “upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas tak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.



hartoyo menyebutkan, tiga hakim MK tersebut adalah Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

“Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Enny Nurbainingsih, dan hakim konstitusi Arief Hidayat,” kata Suhartoyo.

Saldi Isra berpendapat pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu diatur dalam UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, mengatur asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala setiap lima tahun sekali. Namun, yang juga penting, menurut Saldi, pemilu perlu mencakup aspek kesetaraan hak

Toh menurut Saldi Isra, asas jujur dan adil tidak bisa berhenti pada batas keadilan prosedural semata. “Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif,” ungkapnya

Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, kata Saldi, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tidak akan pernah hadir. Sebagai perbandingan, Saldi mengemukakan pemilu di masa Orde Baru berjalan memenuhi segala prosedural yang ada, namun secara empirik pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak adil - baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun faktor praktik penyelenggaraan

Dia kemudian mengatakan setidaknya ada 2 hal yang membuatnya mengambil dissenting opinion. Pertama, terkait mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Kedua, keterlibatan aparat negara, pejabat kepala daerah atau penyelenggara di sejumlah daerah. Dalam permohonan Anies-Muhaimin, sambungnya, mengungkap fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.

Dukungan itu dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara

tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran bansos. Ditambah oleh pemohon, ujarnya, salah satu mekanisme penyaluran dana bansos dilakukan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah.

"Dalam hal ini orang yang memegang jabatan tertinggi dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun, program dimaksud dapat digunakannya sebagai kamuflase," kata Saldi Isra.

Masih kata Saldi, merujuk fakta dalam persidangan menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan bahwa tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye.

Kunjungan ke masyarakat itu, ungkap Saldi, hampir selalu menyampaikan "bersayap" yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi paslon tertentu. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta itu, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.

Terkait soal keterlibatan aparat negara, Saldi Isra merujuk pada pejabat kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang dinilai memihak kepada salah satu paslon. Dia merujuk temuan Bawaslu terkait masalah netralitas pejabat kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatra Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Menurut dia, bentuk ketidaknetralan pejabat kepala daerah antara lain berupa pengerahan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang punya komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, dan pemba-

gian bansos. Itu semua, menurut Saldi, mengarah atau identik dengan identitas paslon tertentu.

Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu namun menurut bukti yang diajukan dianggap Bawaslu tidak memenuhi syarat. Cara Bawaslu itu, ujar Saldi, bisa dipandang bahwa Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan.

"Meskipun demikian saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian pejabat kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. "Dengan demikian, dalil pemohon beralasan menurut hukum,"



kata Saldi

Oleh karena itu, sambung Saldi, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, "maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas.

Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat memaparkan bahwa pemilu di Indonesia berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Era reformasi, katanya, ditandai dengan jatuhnya rezim non-demokratis pada 1998.

Sejak saat itu, sudah enam pemilu dilaksanakan. Bahkan pemilu 2024, sambung Arief, merupakan pemilu serentak yang cukup kompleks karena digelar pada hari yang sama.

Dari perjalanan enam kali pemilu tersebut, publik bisa mengukur kematangan demokrasi Indonesia. Karena pemilu yang adil, sebutnya acap kali dijadikan instrumen mengukur kadar demokrasi apakah semakin baik atau mengalami penurunan.

"Jangan-jangan demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada defisit demokrasi yang mengkhawatirkan, karena tampak jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip pemilu," ucap Hakim Arief Hidayat.

la menyatakan tidak boleh ada peluang sedikitpun bagi cabang kekuasaan eksekutif tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu 2024. "Dia dibatasi paham konstutualiasme,

moral, dan etika," kata Arief.

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi, menurut Arief, adalah bertindak partisan dan memihak calon tertentu yang mencederai sistem pemilu di mana termuat dalam berbagai instrumen hukum, tapi juga termuat dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Arief juga mengatakan bahwa mencermati pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terletak perbedaan pada adanya dugaan intervensi kuat cabang eksekutif yang jelas dan kuat mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya.

Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye, kata Arief, merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang, ujarnya, desain politik UU Pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang

yang terbatas, yakni tatkala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilu untuk kedua kalinya. "Artinya Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan bukan berkampanye untuk mempromosikan capres tertentu ataupun yang didukungnya," sambung Arief.

Oleh sebab itu, Arief berpendapat, apabila presiden/wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan itu telah mencederai prinsip moral dan etika berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengemukakan bagaimana Pemilu 2024 terjadi hiruk-pikuk dan kegaduhan yang disebabkan oleh Presiden dan aparaturnya bersikap tidak netral bahkan mendukung calon tertentu. "Apa

suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum berikut. Alasannya, memang ada keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam Pemilu Presiden 2024.

Dia menjelaskan bahwa pemilu yang diatur dalam UU berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun rule of law, juga harus dilandasi oleh rules of ethics. Karena itu aturan main yang ditetapkan dalam UU pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. "Tujuannya agar dalam kontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, ter-

garan seluruh tahapan pemilu.

Terkait dugaan ketidaknetralan pejabat kepala daerah dan mobilisasi pembagian bansos, Enny membeberkas kasusnya satu per satu di sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara. Namun, Enny berpendapat Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Mengenai bansos, Hakim Enny juga mengemukakan, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi presiden memberikan bansos, penyalurannya menjelang pemilu dan di masa kampanye. Hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilu karena adanya ketidaksetaraan.

"Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. "Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara," menurut pendapat Enny

Oleh karena itu, "Sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan dana operasional presiden (DOP) tetapi sejalan dengan etika kehidupan berbangsa, penting untuk dilaksanakan secara bijaksana," kata Enny.

Toh Enny juga membacakan pertimbangan MK menolak dalil pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menuding Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. "Dalil pemohon mengenai Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 02 dengan alasan kurang bukti materiil adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah, tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan



yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan," kata Arief.

Berdasarkan butir-butir fakta inilah yang membuat Arief yakin, MK sepatutnya tidak boleh mengadili dan memutus secara formal, tapi harus progresif ketika melihat pelanggaran asas pemilu. Menurut dia, Mahkamah semestinya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Hakim Konstitusi ketiga yang mengemukakan pendapat berbeda, Enny Nurbaningsih menilai MK sedianya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan

buka dan adil," kata Enny.

Oleh sebab itu, menurut pendapat kata Enny, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya termasuk peserta pemilu harus bersikap jujur. Dengan demikian setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Menurut dia, MK dalam memutuskan perkara sengketa hasil pemilu tidak bisa parsial dan berdasarkan angka-angka semata. Ke depan, sambungnya, hendaknya MK berfokus memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugas fungsinya secara optimal, independen dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan pelang-

calon nomor urut 2,” lanjut Enny.

Sedangkan dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Arief Hidayat, MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo mengintervensi perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. “Tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden karena perubahan syarat pasangan calon tahun 2024,” kata Arief.

Menurut Arief, Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) Nomor 2 Tahun 2023 memang menyatakan bahwa Ketua MK terdahulu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat akibat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Namun, hal itu bukan berarti membuktikan bahwa ada cawe-cawe Kepala Negara dalam perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 141 Tahun 2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Pertimbangan yang menyangkut bansos didalami oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ia mengatakan untuk mencermati dalil yang disampaikan pemohon dari Tim AMIN, Mahkamah memanggil empat menteri pada 5 April 2024. Yakni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.

Namun dari penjelasan para menteri, Mahkamah menemukan bahwa program bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos) telah diatur dalam UU APBN tahun anggaran 2024, khusus pasal 8 ayat 2. Dari total belanja Rp3.325 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp496,8 triliun dianggarkan untuk program perlinsos.

Atas data-data yang disampaikan

para menteri, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meski begitu, dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang yang mendasari legalitas bansos notabene adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang.

Kemudian merujuk pada notulensi rapat pembahasan dan keterangan menteri yang dipanggil, menunjukkan bahwa program yang dirancang presiden telah mendapatkan persetujuan DPR. Adapun mengenai “kecurigaan bahwa terdapat intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos”, Mahkamah

Gibran, Hakim MK Arsul Sani menyatakan, dalil tersebut tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi. Ia mengemukakan, kubu Anies-Muhaimin hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online, tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut.

MK pun menilai, substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara. “Terlebih lagi, bukti yang diajukan pemohon berupa pemberitaan online merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses, sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk diajukan laporan dugaan pelanggaran



disebutkan “tidak dapat mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon tersebut”.

Dari sisi pembuktian, kata hakim Arsul Sani, pemohon Tim AMIN mengajukan alat bukti berupa hasil survei dan keterangan ahli. Hanya saja, paparan hasil survei oleh ahli, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual.

Berpijak dari hal demikian, kata Arsul Sani, “terhadap dalil pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pemilih.”

Mengenai sejumlah menteri dan pejabat negara lain terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-

ran pemilu kepada Bawaslu,” ujar Arsul.

Apapun, dengan dissenting opinion tiga hakim konstitusi, lima hakim lainnya sepakat untuk menolak permohonan pemohon nomor urut 01 dan 03. Dengan demikian, keputusan mayoritas tetap menolak permohonan sengketa tersebut.

Menanggapi putusan MK itu, Capres Anies Baswedan menerimanya. Ia juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran.

“Hari ini kami menyatakan bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya, kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak Bapak-bapak berdua,” kata Anies dalam pernyataan resmi melalui tayangan video. ●

UNJUK RASA SEKITAR PATUNG KUDA

**Seiring berlangsungnya proses sengketa Pilpres 2024, sejumlah unjuk rasa berlangsung di sekitar Patung Kuda, nama ringkas untuk visualisasi kereta kenca-
na dalam kisah pewayangan Arjuna Wiwaha. Patung ini terletak di pangkal jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, berjarak sekitar 500 meter dari Gedung Mahkamah Konstitusi.**

Nah, beriringan dengan pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 itu, berlangsung pula unjuk rasa. Yang mencolok adalah para pengunjuk rasa yang membawa atribut Forbes 01 dan 03. Forbes rupanya singkatan Forum Bersama, sedangkan 01 dan 03 identik dengan nomor urut 01 pasangan Anies-Muhaimin dan 03 pasangan Ganjar-Mahfud.

Para pengunjuk rasa sudah mulai berdatangan sejak sekitar pukul 08 waktu Indonesia barat Senin, 22 April 2024. Massa aksi terlihat mengenakan berbagai atribut aksi, seperti spanduk, ikat kepala merah putih, maupun poster berisikan tuntutan mereka. Mereka juga membawa tikar, payung, hingga bekal makanan. Mobil komando yang sudah disiapkan di lokasi.

Sedangkan petugas Polisi Lalu Lintas sebelumnya telah menutup jalur masuk

Jalan Medan Merdeka Barat dengan pembatas beton di depan jembatan penyeberangan Kementerian Pariwisata. Lalu lintas ke utara arah Istana pun dialihkan. Polisi, petugas Dishub, hingga Satpol PP tampak bersiaga di sekitar lokasi massa aksi berkumpul.

Para peserta aksi memasang berbagai spanduk. Dua antaranya berukuran besar. "Aksi bersama rakyat berdaulat. Mengawal para Hakim Mahkamah Konstitusi gunakan nurani dan akal budi. Tidak terpengaruh godaan dan ancaman duniawi," demikian bunyi salah satu spanduk yang menggambarkan jajaran Hakim MK.

Selain itu, terlihat pula spanduk besar yang bergambar wajah Presiden Jokowi. "Tangkap adili Jokowi. Sumber dari segala masalah, rajanya nepotisme," demikian tulisan yang terpampang pada spanduk.

Dalam orasi yang digelar secara bergantian, massa mengungkapkan ke-



marahan mereka terhadap Presiden RI. "Walaupun saya dari Solo, Saya tidak rela walau Indonesia dipimpin tetangga, saya malu. Demokrasi kita sudah dibeli!" seru salah satu peserta dalam orasinya.

Orasi berlangsung setelah massa yang berkumpul lebih banyak, sekitar pukul 11 WIB. Tampak Din Syamsuddin, salah satu figur terkemuka Islam berlatar ormas Muhammadiyah, hadir di antara massa pendukung Paslon 01 dan 03 yang berkumpul di Patung Kuda beriringan dengan pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK.

Din pun menyampaikan orasi mewakili kelompok bernama Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR). Dalam orasinya, ia mengemukakan antara lain sudah memantau keterangan beberapa hakim terkait gugatan sengketa pilpres melalui media sebelum datang ke Patung Kuda.

Hasilnya, menurut Din, gugatan yang dilayangkan oleh Tim Paslon 01 dan 03 kemungkinan akan ditolak oleh majelis hakim MK. "Paling tidak lima atau enam hakim Mahkamah Konstitusi, saya dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari Tim Paslon 01 maupun Tim Paslon 03. Ikuti saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun," kata eks

Ketum PP Muhammadiyah ini menyampaikan doa yang biasanya diucapkan ketika mendengar musibah.

Oleh itu, Din menyatakan akan menolak putusan dari majelis hakim di MK. Salah satunya, dalih Paslon 01 dan 03 tak melayangkan gugatan sebelum pemungutan suara. "Terus terang, (sebagai) seseorang di luar ranah hukum, ini pendapat yang aneh bin ajaib," ujarnya.

Saat ritual salat zuhur tiba, sekitar pukul 12.15 WIB, terlihat sejumlah perempuan dan laki-laki dewasa berupaya membuka pagar Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di kompleks gedung itu ada Masjid Rihlatul Jannah yang berada di dalam area Gedung Sapta Pesona.

Peserta aksi menduga pihak pengelola gedung sengaja tidak mengizinkan mereka untuk salat. Sejatinnya kompleks Kementerian pagar gedung memang selalu ditutup setiap kali berlangsung unjuk rasa.

Tak urung seorang perempuan peserta aksi meluapkan kekesalannya. "UU mana yang melarang orang beribadah? Bapak Kapolri Listyo Sigit, masjid ini dikunci (padahal) orang beribadah, hanya beribadah. Baru musim ini orang susah beribadah. Tolong, Pak, anaknya

jangan perintah yang aneh-aneh. Kami hanya umat yang patuh kepada Tuhan kami dalam melaksanakan ibadah. Buka, buka!" ujarnya.

Sempat berhadapan-hadapan dengan petugas kepolisian, peserta aksi kembali mendorong-dorong gerbang hingga akhirnya terbuka lebar. Mereka bersorak dan segera masuk. Namun, tak ada kerusuhan berarti hingga salat zuhur berjamaah selesai.

Seiring dengan selesainya pembacaan putusan MK, aksi masih berlanjut. Terjadi pula pembakaran ban dan spanduk oleh massa aksi. Para petugas kepolisian dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jakarta Pusat pun segera memadamkannya.

Mendekati pukul 17.30 WIB, tampak mobil komando bergerak di Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Gedung MK dan Istana Negara. Ruas jalan memang telah dibuka saat itu. Tak ayal Lalu Lintas pun tersendat.

Apapun, unjuk rasa berizin akan berakhir pada pukul 18.00. Setelah itu, aksi massa akan menghadapi penegakan hukum. Semoga unjuk rasa tak berlanjut dengan kekerasan. Putusan MK sudah final dan mengikat. Menolak permohonan pasangan 01 dan 03. ●



HAPPY ENDING PRABOWO-GIBRAN

Menang Pilpres adalah satu hal. Menjadi Presiden tentu hal lain lagi, lima tahun menjadi kepala negara sebagaimana amanat konstitusi kita bersama.

//...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Ucapan selamat sudah pasti mengalir kepada pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka usai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang menolak permohonan pesaingnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dengan begitu, langkah Prabowo-Gibran semakin dekat dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Happy ending (akhir membahagiakan) Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.

Selanjutnya, sudah banyak tugas menanti, dengan protokol (aturan rinci) yang ketat dalam kehidupan Prabowo-Gibran. Jadi, mudah dipahami, Prabowo kali ini tak banyak bicara, termasuk kepada media yang menunggu ingin menemuinya usai pembacaan putusan MK tadi.

Capres pemenang Pemilu 2024 itu hanya mengangkat dua jari (lambang victory, kemenangan) saat tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2024 malam.

Setelah kendaraannya tiba di kediaman, Prabowo tampak turun dari mobil. Sedangkan awak media berupaya menanyakan tanggapannya mengenai putusan MK

yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Awak media pun menanyakan apakah Prabowo segera bertemu dengan Ganjar dan Anies atau tidak. Toh Prabowo hanya melambaikan tangan dengan mengacungkan dua jari, menunjukkan simbol V (victory, kemenangan). Selanjutnya ia masuk ke kediaman tanpa berbicara dengan media.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo memerlukan istirahat. Dahnil bilang, Prabowo telah bekerja seharian di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hari ini.

"Bapak istirahat dulu. Mantau tadi hari ini. Jadi istirahat dulu. Tadi kerja satu hari di Kemenhan soalnya," ucap Dahnil di rumah Prabowo.

Acara keesokan harinya pun telah tersusun. Ketua tim kuasa hukum pasangan 02 Yusril Ihza Mahendra dan seluruh jajaran tim hukum akan mengunjungi rumah Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kemenangannya dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tim hukum Prabowo-Gibran secara lengkap dipimpin oleh Prof Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Tim bertemu Prabowo, selain melaporkan hasil persi-

dangan MK kepada Prabowo selaku prinsipal atau pemberi kuasa," kata Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran Fahri Bachdim, Selasa, 23 April 2024.

Rombongan tim hukum Prabowo-Gibran diperkirakan akan sampai di kediaman Prabowo yang berlokasi di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pukul 19.00 WIB Selain melaporkan kemenangan di MK, Fahri mengatakan pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara Prabowo dan para kuasa hukumnya.

Lah, Selasa siang ke mana? Jelas Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan, dan Selasa adalah hari kerja.

Lebih dari itu, akan banyak lagi kegiatan yang memerlukan kehadiran, juga keputusan, yang harus diambil Prabowo. Katakanlah misalnya yang ditanyakan oleh para wartawan tadi: Apakah Prabowo akan segera bertemu dengan Capres pesaingnya: Anies dan Ganjar.

Pertanyaan itu memiliki implikasi luas pada postur politik dalam negeri Indonesia ke depan. Anies dan Ganjar adalah representasi kekuatan riil dalam spektrum politik Indonesia. Dengan begitu, pertemuan itu juga akan ikut mewarnai perjalanan politik Indonesia setelah Presiden Joko Widodo mengakhiri 10 tahun masa tugasnya pada Oktober 2024.

Sebagai gambaran, Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Selanjutnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin



Iskandar, beroleh 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen. Paslon nomor 1 ini mendapat dukungan pencalonan dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghimpun 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional. Pasangan nomor urut 3 ini mendapat dukungan pencalonan dari PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Nah, bagaimana susunan pemerintahan Prabowo-Gibran jika sudah dilantik, juga akan terkait dengan dinamika antar-partai, baik di kementerian/lembaga dan cabang eksekutif lainnya serta cabang legislatif di parlemen: DPR, DPD, dan MPR hingga ke tingkat daerah.

Ini bukan dinamika yang mudah. Toh

egaliter dan mahir dalam urusan lobi politik. Tak heran jika perbedaan sikap Megawati dan Puan ini memunculkan kabar bahwa PDIP belum satu suara soal langkah politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Informasi yang beredar, sebagian elite ingin PDIP menjadi oposisi, sebagian lain menghendaki partai banteng bergabung ke koalisi pemenang pilpres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Saya dapat informasi memang di PDIP enggak bulat juga memang. Ada sebagian ingin bergabung dengan pemerintahan, tapi sebagian ingin tetap berada pada oposisi," ungkap Lili.

Meski begitu, ia meyakini bahwa keputusan penting PDIP tetap dipegang oleh Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai. Meski belum satu suara, PDIP diprediksi bakal berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran dan

dan tak punya lagi nilai jual.

"Ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan, ini berarti kontraproduktif untuk PDIP karena selama ini pernyataan-pernyataan menunjukkan mereka itu menolak terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini, sampai-sampai kemudian Megawati sendiri menjadi amicus curiae," kata Lili.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri usai memastikan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Sekarang sudah mulai mencocokkan waktu-waktunya semoga agenda ini tidak lama lagi akan disampaikan kepada publik," kata Muzani saat jumpa pers di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin, 23 April 2024.

Muzani mengatakan pertemuan dengan Megawati merupakan bagian dari upaya Prabowo membangun rekonsiliasi besar untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Menurut dia, upaya pendekatan kepada beberapa partai politik tidak hanya dilakukan kepada PDIP saja. Prabowo akan merangkul seluruh pihak untuk menjalankan program kerja yang telah dia siapkan.

Karena itu, Prabowo sudah mengirimkan beberapa orang kepercayaan untuk bertemu dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) sejak sebelum putusan MK dibacakan. "Pak Prabowo berpikir positif untuk bangsa ke depan. Upaya rekonsiliasi akan dilakukan termasuk pimpinan parpol atau tokoh-tokoh sebagai simbol mempersatukan bangsa beliau mengutus beberapa orang," kata dia.

Jadi, untuk Pilpres 2024, memang happy ending untuk Prabowo-Gibran. Selanjutnya, Prabowo akan menghadapi ujian mengemban amanah sebagai Kepala Negara dengan segala sisi positif-negatif yang ditinggalkan Pemerintahan Joko Widodo, ayah Gibran. •



Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai, langgam politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbeda dengan putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Menurut dia, Megawati cenderung teguh pada pendirian, sementara Puan lebih lentur dalam berpolitik. "Saya kira di partai politik itu ada yang menyala, ada juga yang menjadi sejuk. Tampaknya Puan langgamnya yang sejuk," kata Lili dalam program Obrolan Newsroom Kompas, Senin, 22 April 2024.

Dalam pandangan Lili, gaya politik Puan lebih mirip dengan almarhum sang ayah, Taufik Kiemas, yang dikenal

mengambil peran sebagai oposisi.

"Saya percaya dengan sikap politik Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu, iya-iyanya, tidak-tidak. Jadi selama Ibu Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak," ujarnya.

Lili menambahkan, sejak awal, PDIP menunjukkan sikap berlawanan dengan koalisi Prabowo-Gibran. Seandainya merapat ke kubu pemenang, partai banteng akan dinilai kontraproduktif



MENGATASI HOAKS PASCAPUTUSAN MK

Dianulirnya Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur tentang penyiaran berita atau pemberitahuan bohong (hoaks) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan beberapa “pekerjaan rumah” bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, MK juga menyatakan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama tentang pencemaran nama baik inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai dilakukan dengan “cara lisan”, karena mengadopsi rumusan dari Pasal 433 KUHP baru yang akan berlaku efektif pada 2026.

Sebenarnya tak ada perubahan yang cukup signifikan terhadap rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHP lama itu, karena ayat kedua dan ketiga dari pasal tersebut secara tidak langsung memang telah membedakan kualifikasi pencemaran nama baik secara “lisan” dan “tertulis”.

Justru permasalahannya, bagaimana nanti penerapan Pasal 28 Ayat (3) jo 45A Ayat (3) UU No 1/2024 tentang Revisi Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai tindak pidana menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat.

Dengan perkembangan ruang digital yang semakin luas cakupannya, eksistensi delik hoaks senyatanya memang sudah “berubah” dari cara-cara konvensional ke cara-cara lebih modern, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana (cyber enable crimes).

Kriminalisasi hoaks

“Hax pax max Deus adimax”, demikian sebuah frasa pseudo Latin di awal abad ke-17, yang digunakan sebagai trik ajaib oleh para tukang sulap, artinya penipuan atau tipu daya (hocus-

pocus), yang diyakini jadi cikal bakal lahirnya istilah hoaks.

Pada saat KUHP peninggalan Belanda (WvS NI) diberlakukan di Nusantara, terdapat Pasal 171 WvS NI mengenai kesengajaan menyiarkan (verspreiden) berita bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang diancam dengan

pidana penjara maksimum 1 tahun atau denda 300 gulden.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dualisme peraturan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang yang tidak seragam keberlakuannya di Indonesia telah diselesaikan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam situasi “pancaroba” hukum yang serba tak menentu, ketentuan Pasal 171 WvS NI pun dicabut dan diubah dengan Pasal XIV (14) dan Pasal XV (15) UU 1 Tahun 1946 menjadi dua delik yang diperluas kriminalisasinya untuk melindungi masyarakat dari penyiaran berita atau pemberitahuan bohong dan penyiaran kabar yang tak pasti atau berlebihan.

Perbedaan utama Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dengan Pasal 171 WvS NI tersebut adalah pada pengaturan sanksinya yang jauh diperberat, hingga mencapai 10 tahun untuk kesengajaan yang menimbulkan keonaran sebagai akibat (delik materiil), dan diperkenalkannya bentuk kealpaan (kelalaian) dan “setengah sengaja-setengah alpa” (pro parte dolus

pro parte culpa) dalam melakukan verspreiden delict.

Mengutip pandangan SR Sianturi, apabila delik itu terjadi dalam keadaan darurat, adalah tepat dengan sanksi pidana seberat itu. Namun, dalam keadaan aman (damai), kiranya perlu ditinjau kembali karena sanksi pidana bukanlah satu-satunya jalan untuk mendidik atau memperbaiki (kelakuan) seseorang.

Sebagai konsekuensi dari rekodifikasi terbuka-terbatas yang dianut KUHP baru, pandangan Sianturi pun direspons oleh pembentuk UU dengan tetap memasukkan kedua pasal ini dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), yaitu Pasal 263 dan 264



Oleh: Albert Aries
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

KUHP baru, tetapi pengaturan sanksi pidananya jauh lebih ringan dan obyektif, dengan modified delphie method.

Mengingat Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dianulir oleh MK, berlakunya KUHP baru pada 2026 kemungkinan akan membuka peluang pasal-pasal serupa di KUHP baru untuk diuji kembali konstitusionalitasnya (rejudicial review), sesuai perkembangan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Keonaran vs kerusuhan

Menurut Penjelasan Pasal 14 UU 1/1946, unsur "keonaran" diartikan sebagai sesuatu yang lebih hebat dari kegelisahan dan mengguncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.

Hal inilah yang membuat MK memandang adanya ketidakjelasan terkait parameter yang menjadi batas bahaya dari "keonaran", termasuk yang dapat timbul dari penyiaran kabar yang

gaimana "vis publica force ouverte" (di hadapan umum yang bisa didengar dan dilihat), yang dapat ditemukan padanannya dalam Pasal 141 KUHP Belanda atau Pasal 440 Code Penal Perancis.

Menurut penjelasan Pasal 28 Ayat (3) jo 45A Ayat (3) UU ITE, yang dimaksud dengan "kerusuhan" sebagai akibat dari penyebaran pemberitahuan bohong adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, dan bukan kondisi di ruang digital/siber, sehingga pengaturan UU ITE ini dianggap mengikuti KUHP baru yang lebih demokratis.

Pergeseran paradigma

Adanya keluhan dari pencari keadilan yang diadukan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sekaligus penyebaran berita bohong, padahal kedua kualifikasi delik dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kedua delik itu berbeda satu sama lain, seharusnya tidak perlu terjadi



tidak lengkap/berkelebihan.

Tampaknya tak berlebihan jika MK berpendapat rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (lex scripta), jelas (lex certa), dan ketat tanpa analogi (lex stricta).

Dalam KUHP baru, unsur "keonaran" itu direformulasi menjadi "kerusuhan dalam masyarakat", yang dapat menggunakan penafsiran sistematis menurut Penjelasan Pasal 190 KUHP dalam BAB Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, sebagai suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan sekelompok orang paling sedikit tiga orang.

Argumentasi ini dipandang sejalan dengan substansi dari Pasal 170 KUHP lama (Pasal 262 KUHP baru), yang melarang dilakukannya kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan untuk melindungi ketertiban umum, seba-

lagi di waktu mendatang.

Sejalan dengan Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi menjadi UU 12/2005, kebebasan berpendapat memang dapat dilakukan pembatasan tertentu oleh UU, sepanjang diperlukan untuk menghormati nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 28 Ayat (3) jo 45A Ayat (3) UU ITE sebagai delik materiil yang mensyaratkan terpenuhinya unsur akibat yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat ke depan harus betul-betul ditafsirkan dengan ketat dan jelas.

Terakhir, namun tidak kalah penting, paradigma dari penegakan hukum pidana haruslah digeser kembali pada prinsip ultimum remedium, yaitu sebagai "obat terakhir".

Tentu merupakan tugas kita bersama untuk senantiasa menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan bagi setiap warganet. ●



BERSILATURAHMI DAN BERBAGI BERSAMA DI HARI RAYA

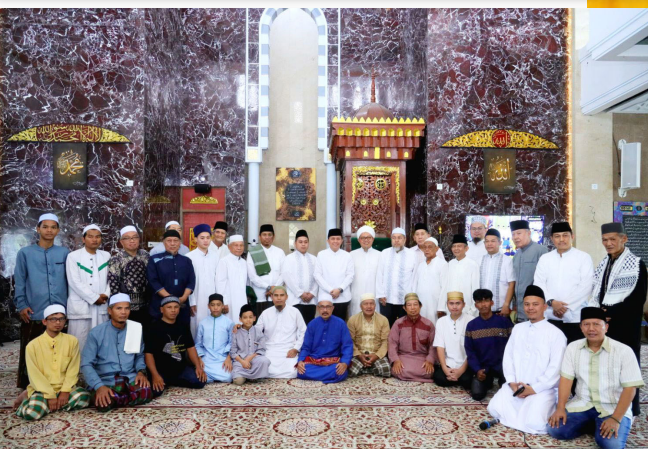
Seperti pada Jumat pertama pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Agus Fatoni melaksanakan salat jumat berjamaah bersama warga. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Baiturrahman, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan.

Momen ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan halal bihalal bersama

jamaah masjid yang hadir. Agus Fatoni mengaku bersyukur dapat menjalankan salat jumat bersama warga.

"Saya bersyukur kita bisa shalat jumat berjamaah disini dan bersilaturahmi. Selama enam bulan saya di Sumsel sudah berkunjung ke beberapa masjid dan hari ini di masjid yang indah ini," kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga mengajak para



jamaah yang hadir untuk bersyukur karena telah melewati bulan Ramadhan selama satu bulan belakangan. Hal ini dikarenakan banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa diambil.

"Kita bersyukur sudah melewati satu bulan ramadhan. Dimana kita ditempa dan di latih untuk bekal kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kita kepada Allah SWT," ucap Fatoni.

"Tak hanya itu saja, dengan ramadhan kita bisa bersilaturahmi melaksanakan shalat tarawih serta bersedekah," katanya.

Selain itu, Fatoni juga memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid sekaligus penyerahan paket bantuan sembako bagi para pengurus masjid.

"Ini ada sedikit bantuan, mudah-mudahan bantuan ini bisa menambah untuk keperluan masjid. Sehingga masjid ini segera tuntas pembangunannya dan dimanfaatkan untuk umat dan kegiatan sosial keagamaan lainnya," kata Fatoni.

Sementara itu, Ketua Harian Masjid Baiturrahman Ahmad Fadilah mengaku kehadiran Pj Gubernur Agus Fatoni akan menjadi penyemangat bagi para pengurus dan warga sekitar untuk lebih memakmurkan masjid kebanggaan mereka.

"Terima kasih atas kunjungannya dan sudah memilih untuk melaksanakan masjid jumat di sini, Insya Allah masjid ini nantinya kian makmur dan jamaahnya lebih banyak lagi," terangnya.

Kunjungi Panti Jompo

Selain bersilaturahmi dengan masyarakat dari berbagai lapisan, Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni juga mengunjungi Panti Jompo Harapan Kita guna bersilaturahmi sekaligus memberi bantuan dan santunan bagi para Lanjut Usia (Lansia), Palembang, Sumatera Selatan.

Kunjungannya kali ini sekaligus halal bihalal pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam kesempatan ini, Fatoni juga menyerahkan paket bantuan bagi para penghuni panti yang berusia lanjut.

"Bapak/ibu yang sabar ya. Teruslah

beribadah dan jaga ibadahnya. Tetap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Setelah satu bulan berpuasa, mudah-mudahan keimanan kita semakin meningkat dan dipertemukan kembali dengan Ramadhan tahun depan," ucap Fatoni.

Fatoni berkesempatan untuk melihat sejumlah fasilitas yang ada di

orang perempuan dan 28 orang laki-laki. Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita juga menerima rujukan dari Dinas Sosial kabupaten/kota di Sumsel.

"Kegiatan yang terselenggara di sini tetap seperti biasa dan normal. Seperti pada bulan puasa, ada sholat tarawih, peringatan Nuzulul Quran, bimbingan sosial dan keterampilan yang sifatnya



panti tersebut. Kemudian, dia juga mendoakan para penghuni panti yang sedang sakit agar segera diberi kesembuhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita, Edy Khaidir menyebut panti sosial ini melayani rehabilitasi bagi warga lanjut usia yang mengalami masalah sosial.

Setidaknya terdapat 60 warga yang berada di panti tersebut, terdiri dari 32

untuk mengisi waktu luang seperti latihan rebana," kata Edy.

Edy menyebut rata-rata penghuni panti sekitar 40-50 persen tidak bisa beraktivitas sama sekali dan segala kegiatan dilakukan di tempat tidur. Selain itu, sebagian besar warga Panti juga tidak lagi kembali ke keluarga maupun masyarakat.

"Mereka sebagian besar penghuni tetap di sini, sangat jarang yang pulang ke keluarganya," ucap Edy. •



DUKUNG PEMBANGUNAN MERATA HINGGA KE DESA

Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya fokus di wilayah perkotaan saja tapi merata hingga ke pelosok desa. Salah satunya fasilitas penerangan listrik yang merata hingga ke pelosok.

Wujud pemerataan pembangunan itu dilakukan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dengan melakukan ground breaking pembangunan jaringan listrik PT PLN pasca pengalihan wilayah usaha PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP) yang ditandai pengecoran tiang pancang beton penyangga kabel. Kegiatan ini berlangsung di Halaman SD Negeri Tengkulang Jaya, Babat Supat, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

"Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan ground breaking pelayanan PLN terhadap warga di Kabupaten Muba, ada 53 ribu lebih kepala keluarga atau pelanggan yang selama ini listriknya belum dilayani

langsung oleh PLN. Maka dengan groundbreaking ini nanti 53 ribu keluarga ini akan bisa menikmati layanan listrik dari PLN," kata Fatoni.

Melalui kesempatan ini, Fatoni menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran PT PLN. Hal ini dikarenakan mereka akan membangun jaringan baru layanan listrik kepada masyarakat di Kabupaten Muba.

"Ini yang dinantikan warga Muba, bisa diberikan listrik melalui PLN. Dengan seperti ini pelayanan PLN bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang ada di Muba ini. Kita lengkapi dan perbaiki semua fasilitas yang ada sehingga masyarakat bisa menikmatinya," ucap Fatoni.

Fatoni merinci, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Sumsel sampai dengan awal

tahun 2024 telah mencapai 99,26 persen. Sementara itu, tercatat masih ada 24 desa yang belum memiliki listrik dari total 3.258 desa/kelurahan di Sumsel. Sedangkan untuk rasio elektrifikasi atau jumlah pelanggan adalah sebesar 99,99%.

"Dengan adanya peralihan usaha dari PT MEP ke PT PLN ini, menjadikan masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik dari sebelumnya dan semoga PT PLN segera melakukan perbaikan dan penggantian saluran distribusi saluran udara dan lain-lain sesuai dengan asas pembangunan ketenagalistrikan, yaitu asas manfaat dan asas efisiensi berkeadilan. Maka setiap masyarakat dapat menikmati tenaga listrik dengan ketersediaan yang cukup dan kualitas yang baik," terangnya.

"Semoga PLN bisa melistriki seluruh Sumsel agar rasio elektrifikasi bisa mencapai 100 persen di tahun 2025," sambungnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengaku sangat senang bisa menuntaskan persoalan peralihan listrik PT MEP ke PLN.

Dia juga berterima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni atas dukungan yang masif sehingga persoalan peralihan listrik dapat terealisasi.

General Manager UID S2JB Adi Hirlambang, merinci ada 12 MOF (titik ukur) yang dilaksanakan pembangunannya yaitu MOF Nusa Serasan (Kecamatan Sungai Lilin), MOF Tenggulang Jaya (Babat Supat), MOF Bayat (Kecamatan Bayung Lencir), MOF Mendis (Kecamatan Bayung Lencir), MOF Lubuk Harjo (Kecamatan Bayung Lencir).

Kemudian MOF Setia Jaya (Kecamatan Jirak), MOF Layan (Kecamatan Jirak), MOF Sungai Dua (Kecamatan Sungai Keruh), MOF Tanjung Agung (Kecamatan Lais), MOF Rantau Kroya (Kecamatan Lais), MOF Danau Cala (Kecamatan Lais).

Selanjutnya MOF Mekar Jaya (Kecamatan Keluang). Sedangkan untuk 7 MOF (titik ukur) lagi masuk dalam proses tahap 2.

"Pengalihan wilayah usaha ini sebenarnya bukan hanya urusan administratif tetapi merupakan upaya bagaimana untuk melayani masyarakat," kata Adi.

Untuk diketahui, permasalahan sistem distribusi yang terjadi di PT MEP selama ini adalah keandalan jaringan, masih seringnya listrik padam yang disebabkan oleh umur peralatan jaringan yang sudah tua.

P e r -
m a s a l a -

han berikutnya yang dikeluhkan pelanggan PT MEP adalah harga listrik per kWh yang jauh lebih mahal dari harga listrik per kWh milik PT PLN. Sehingga peralihan usaha dari PT MEP ke PT PLN adalah keharusan agar masyarakat Muna mendapatkan pasokan layanan listrik yang lebih baik dari sebelumnya.

Resmikan Penyalan Perdana

Usai melakukan ground breaking pembangunan jaringan listrik PT PLN di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Banyuasin, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni meresmikan penyalan perdana listrik oleh PT PLN pasca pengalihan wilayah usaha PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP).

Fatoni mengatakan kebutuhan listrik bagi masyarakat sangatlah penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, dia berharap agar PT PLN terus memperluas layanannya

masyarakatnya produktif dan ekonominya membaik," ucap Fatoni.

Dia mengatakan perlu kesabaran dan dukungan dari masyarakat sehingga aliran listrik yang dialiri oleh PLN dapat dicover secara keseluruhan. Fatoni mengimbau masyarakat agar melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh pihak PLN.

"Tentu pelayanan ini akan menyebar keseluruhan dengan kurang lebih sebanyak 53 ribu pelanggan MEP menjadi pelanggan PLN. Maka perlu dukungan dan kesabaran dari masyarakat untuk terus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan," ujarnya.

Fatoni juga menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel akan mendukung program yang berkaitan ataupun bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk juga mengaliri jaringan listrik.

"Dengan groundbreaking ini juga



ke sejumlah pelosok desa yang ada di Kabupaten Muba.

"Listrik sangat penting karena ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang diperuntukkan menunjang aktivitas keseharian masyarakat kita. Semoga ini dapat membuat

pelayanan PLN langsung menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Muba, semua prasarana akan diperbaiki dan tentu Pemprov akan mendukung hal ini," kata Fatoni.

Terakhir, Fatoni juga mengingatkan masyarakat untuk menghemat listrik sehingga biaya perbulan juga dapat dihemat.

"Menghemat listrik jangan lupa karena ini penting, untuk itu kebiasaan lalai mematikan aliran listrik yang tidak digunakan kita tinggalkan. Lampu, kipas angin ataupun televisi jika tidak diperlukan dimatikan saja agar penghematan ini juga bisa berbagi kepada saudara-saudara kita lainnya," jelas Fatoni. •





CAPAIAN KINERJA PJ GUBERNUR AGUS FATONI RAIH APRESIASI

Langkah dan terobosan yang dilakukan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni dalam membangun daerah mendapat nilai positif. Penilaian itu disampaikan Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja.

Apresiasi dan penghargaan itu disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, di Jakarta.

Staf Khusus Mendagri Kastorius Sina-ga sangat mengapresiasi atas lengkapnya laporan yang dipaparkan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Kemudian, dia juga mengapresiasi penurunan kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan.

"Kami lihat bagus penurunannya paling cepat di Sumatera dan empat Kabupaten sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Karena kan targetnya tahun 2024 ini seharusnya semua daerah 0 persen. Sumsel ini boleh dikatakan delapan Kabupaten/Kota sudah 0 koma persen, kalau sudah angka segitu jika dipertahankan hingga tahun 2024 itu sudah akan bebas dari kemiskinan ekstrem," jelas Kastorius.

"Ini tinggal perintah Inpres Nomor 4 butir 29 itu dilaksanakan maka akan lebih mantap lagi Pak Gub," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur 3 Itjen Kemendagri Elfin Elyas

mengapresiasi turunnya inflasi di dua Kabupaten Sumatera Selatan, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim pada periode Januari-Maret 2024.

"Saya juga mengapresiasi kepada OKU Selatan, Prabumulih dan Pagar Alam yang angka IPH nya rendah," kata Elfin.

"Saran kami Pak Gub, ke depan ada dorongan dari Pak Gub ke Kabupaten/Kota untuk membuat proposal neraca pangan kedepannya. Saya yakin ini bisa disajikan dan dianjurkan kemudian dilaksanakan ke Kabupaten/Kota," lanjutnya.

Selanjutnya, apresiasi juga disampaikan Inspektur 3 Itjen Kemendagri Rustam. Dia menyebut kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel sudah cukup baik.

"Rekomendasi dari BKSDN untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan peran Kominfo dalam hal ini literasi penggunaan sosial sekaligus memantau berita-berita hoaks di dunia maya sehingga bisa kita antisipasi," ucap Rustam.

Kemudian, apresiasi juga disampaikan oleh Inspektur Khusus Itjen Kemendagri

Teguh Narutomo dalam menyerap minat aspirasi masyarakat.

Kemudian, dia juga mengingatkan terkait sosialisasi dari Mendagri Tito Karnavian untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada tingkat pendidikan mulai dari SD hingga SMK/SMA.

Dalam kesempatan ini, PPUPD Ahli Utama Azwan juga mengapresiasi berbagai kegiatan unggulan yang dilakukan di Provinsi Sumsel.

Menurutnya, semakin banyak kegiatan unggulan maka memiliki skala prioritas dalam mensejahterakan masyarakat.

"Bagus ya ini banyak kegiatan juga kegiatan unggulan, namun perlu ini dipastikan dijadikan skala prioritas," kata Azwan.

Apresiasi juga disampaikan PPUPD Ahli Utama, Dimiyati. Dikarenakan banyak indikator evaluasi yang sudah disampaikan dengan jelas namun terkait pelaksanaan elektronifikasi transaksi bidang retribusi masih perlu dilaksanakan sesegera mungkin.

Kemudian, apresiasi juga disampaikan Auditor Ahli Utama, Wiratmoko. Dia men-

yampaikan terkait bagusnya penurunan stunting di Pemprov Sumsel.

Menanggapi seluruh masukan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni berterima kasih atas seluruh masukan yang diberikan evaluator. Dia menyebut semua masukan telah dicatat dengan baik dan akan langsung dieksekusi usai evaluasi kali ini.

"Jadi di Sumatera Selatan kalau bergerak sendiri tidak dirasa tapi kalau dengan Gerakan Serentak akan lebih fokus, lebih terarah, lebih efektif dan efisien," kata Fatoni.

"Kami ucapkan terima kasih atas semua masukan, saran dan pendapat ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja juga menjadi evaluasi bagi kami sehingga kinerja kedepannya semakin meningkat," lanjutnya.

Sukses Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Selama kepemimpinannya, Agus Fatoni juga menyebut telah terjadi penurunan drastis tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumsel. Dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumsel pada Maret 2023 turun menjadi 1,29 persen.

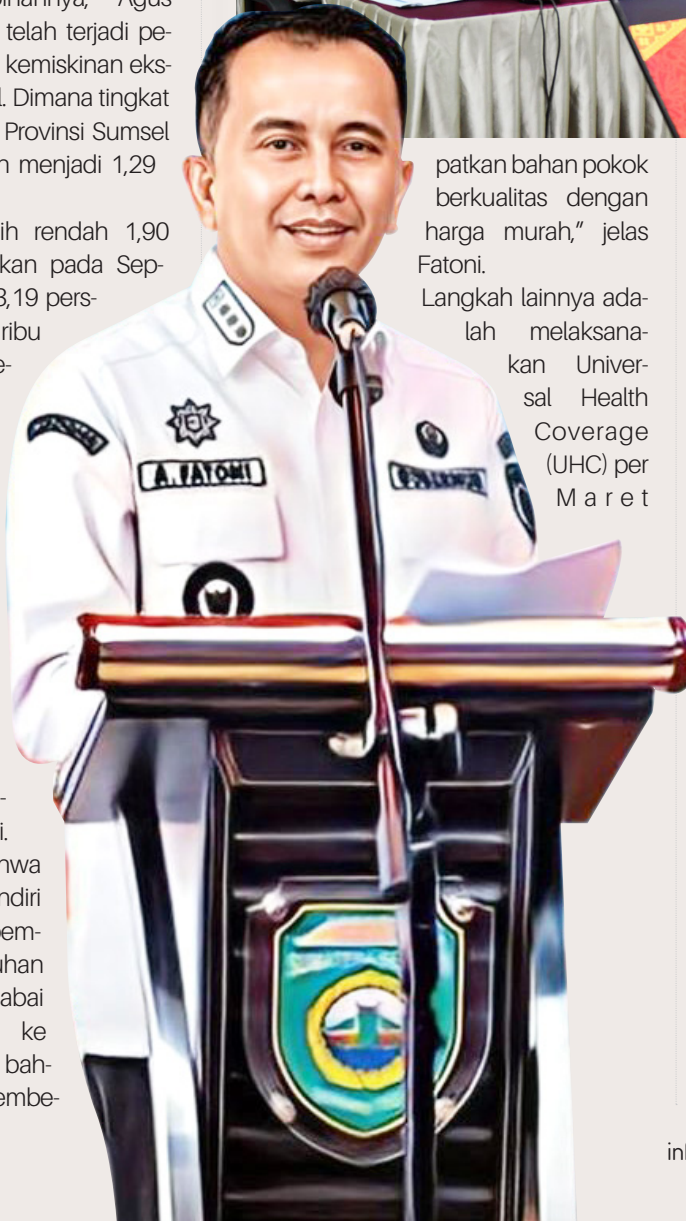
Angka tersebut lebih rendah 1,90 persen jika dibandingkan pada September 2022 sebesar 3,19 persen atau sebanyak 279 ribu jiwa. Hal ini menjadi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sumatera.

"Untuk mencapai prestasi tersebut tentunya berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya, peningkatan kesehatan pangan dan gizi keluarga melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Gerakan Pangan Murah," kata Fatoni.

Ia menjelaskan bahwa Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini berupa pemberian bibit tumbuhan pangan, seperti cabai dan bawang merah ke masyarakat, sekolah bahkan kantor-kantor. Pembe-

rian bibit t diharapkan ditanam mereka di lahan sekitar agar bisa memanen sendiri.

"Kemudian terkait Gerakan Pangan Murah dilakukan melalui program Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel yang diadakan secara merata di 17 kabupaten/kota se-Sumsel setiap hari Senin, Selasa dan Kamis rutin tiap pekan. Gerakan Pangan Murah ini juga bisa dilakukan oleh instansi vertikal lainnya guna membantu masyarakat menda-



patkan bahan pokok berkualitas dengan harga murah," jelas Fatoni.

Langkah lainnya adalah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) per Maret

2024 sebesar 97,56 persen dan pembiayaan operasional pendidikan tahun 2024 senilai Rp 718 miliar.

Kemudian bantuan pemasangan listrik rumah tangga yang tidak mampu, pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, lansia dan penyandang disabilitas, pelatihan pemberdayaan peluang kerja baru, pelatihan kewirausahaan pemuda, pelaksanaan job fair serta revitalisasi pertanian.

"Kemudian, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel yang juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dicanakan kedepannya akan dibangun 6.894 unit kloset dan septictank," ucap Fatoni.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel yang diluncurkan pada 21 Februari lalu. Kedepannya akan dibangun kurang lebih sebanyak 8.391 unit rumah layak yang tersebar ke seluruh daerah di Sumatera Selatan.

"Kalau satu desa, satu kelurahan dengan melakukan bedah rumah hanya dua saja itu sudah terhitung 6.900 jika ditambah 8.000an berarti sudah ada kurang lebih 14.000an. Jika ke depannya dari CSR perusahaan itu mencapai 5.000 saja maka akan 15.000 lebih yang mampu kita lakukan bedah rumah," jelas Fatoni.

"Ini gerakan-gerakan seperti ini yang kita maksimalkan, kalau baru sebentar memang belum kerasa. Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini konsisten agar semua dampaknya dirasakan masyarakat," lanjutnya. •

SIAPKAN SOLUSI ATASI KEMACETAN

Guna mengatasi kemacetan di Sumatera Selatan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengusulkan pelebaran Jalan Palembang - Betung, terutama di Simpang Y Pasar Betung, Kabupaten Banyuasin. Hal ini dilakukan agar kemacetan parah pada momen mudik Lebaran tahun 2024 maupun hari-hari biasa tidak terulang kembali ke depannya.

"Nanti mudah mudahan tahun depan di jalur ini kita harap ada pelebaran jalan sedikit. Karena ini jalan nasional akan kami sampaikan usulan ke kementerian PUPR. Sehingga kemacetan tidak terjadi lagi," kata Fatoni saat meninjau lalu lintas di Pos Betung, Polres Banyuasin, Kabupaten Banyuasin atau Simpang Y, Sumatera Selatan.

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni

mengaku sengaja meninjau langsung ke lapangan, terutama di Pasar Betung KM 67 dikarenakan lokasi ini rawan kemacetan.

Dia mengatakan salah satu yang menyebabkan kemacetan adalah adanya penyempitan jalan sehingga butuh solusi tepat untuk mengatasinya.

Dia menilai jika kemacetan di ruas Palembang-Betung tak terjadi hanya karena penyempitan jalan dan ulah saling serobot kendaraan. Beberapa

masalah juga diakibatkan pasar tumpah ruah, sehingga banyak kendaraan menggunakan bahu jalan untuk berhenti berbelanja.

"Sering macet karena terjadi penumpukan dan penggabungan arus dari arah Jambi itu, termasuk dari Sekayu bertemu di sini. Begitu juga kendaraan dari Palembang," jelas dia.

Guna mengatasi kemacetan tersebut, Fatoni bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas, Dinas Perhubungan



gan (Dishub) dan Satpol PP untuk mengurangi kemacetan. Langkah antisipasi tersebut akan dilakukan hingga arus balik mendarat.

"Manakala ada kemacetan agar segera diurai dan kita bisa mengantisipasi agar kemacetan tidak terjadi lagi," ucap Fatoni.

Selain meninjau pos pengamanan tersebut, Fatoni juga menyerahkan bantuan kepada petugas yang berada di Pos Pengamanan Lebaran Tahun 2024 di Pos Betung, Polres Banyuasin.

Tak hanya di lokasi tersebut, dia juga meninjau sekaligus memberikan bantuan di Pos Pengamanan Lebaran 2024 yang berlokasi di Pos Pangkalan Balai.

Batasi Kendaraan Besar

Selain meninjau langsung arus lalu lintas di Jalan Palembang - Betung. Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni juga mengecek pos pengamanan lalu lintas sekaligus menyetop beberapa truk yang melintas di Jalan Palembang - Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Bersama Dir Samapta Polda Sumsel, saya meninjau langsung sejumlah pos-pengamanan Lebaran dan di jalan rupanya masih ada kendaraan truk yang berjalan. Maka saya stop untuk memberikan sosialisasi," kata Fatoni.

Sebagaimana diketahui, sudah terdapat Surat Edaran (SE) dari Gubernur Sumsel nomor 550 Tanggal 20 Maret 2024. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa kendaraan truk tidak boleh melintas terhitung pukul 09.00 WIB pada tanggal 5 April 2024 hingga 16 April 2024.

"Makanya truk yang masih melintas di jalan kita pinggirkan bahkan ada yang diputar balik. Kalau yang dipinggirkan nanti saat sudah lengang baru bisa kita minta jalan lagi," beber Fatoni.

Fatoni mengimbau agar semua kendaraan truk untuk tidak melintas kecuali bus pengangkut penumpang, truk-truk pengangkut sembako dan bahan bakar.

"Sudah kita imbau angkutan truk diharapkan tidak keluar dulu dari tanggal 5-16 April, yang boleh itu hanya sembako, dan bahan bakar," katanya.

Sementara itu, sopir truk bernama Sukari yang truknya diberhentikan



mengaku sempat khawatir dikarenakan membawa muatan berisi batu bata dari Sukajadi hendak ke Suak Tapeh, Banyuasin. Dia sendiri tidak tahu jika untuk sementara ini truk dilarang melintas.

"Saya tidak tahu kalau truk saat ini tidak boleh melintas di jalan. Baru diberikan informasi seperti ini saya jadi

tahu," ujarnya.

Dirinya mengaku tak keberatan untuk menunggu terlebih dahulu agar diperbolehkan melintas. Tak hanya truk yang dikendarai Sukari, puluhan truk bermuatan besar lainnya juga turut diberhentikan dan dipinggirkan sementara di sepanjang Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Banyuasin. •

LIBATKAN SEMUA PIHAK SUKSESKAN 7 GERAKAN SERENTAK

Selain fokus pada program prioritas, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni juga meminta seluruh pihak terlibat dalam memnyukseskan tujuh Gerakan Serentak di provinsi ini.

"Kolaborasi dan sinergi pihak swasta dengan pemerintah daerah ini luar biasa dan ini terus dilanjutkan, perlu terus dikembangkan untuk bisa membangun daerah. Sinergi-sinergi semacam ini akan menguatkan dan lebih maksimal," kata Fatoni.

Fatoni mengajak perusahaan swasta untuk terus bersinergi dalam membangun Provinsi Sumsel melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan CSR. Provinsi Sumsel saat ini juga telah menggagas Forum CSR di mana merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan permasalahan sosial yang menjadi tantangan guna diselesaikan secara bersama-sama.

"Dimana ada kebersamaan, akan ada kepercayaan, kalau sudah ada kepercayaan, di situlah sinergi itu akan terjadi. Nah maka inilah sinergi inilah yang kita terus bangun di Sumatera Selatan," ucap Fatoni.

"Bapak/ Ibu pimpinan perusahaan, pimpinan

dunia usaha, silahkan nanti bisa menjadikan ini sebagai forum CSR untuk melakukan kegiatan, melakukan upaya-upaya bersama, karena dengan bersama lebih banyak yang bisa kita lakukan dibandingkan kita sendiri-sendiri," terangnya.

Saat ini, Provinsi Sumsel sedang gencar melakukan Gerakan Serentak, meliputi Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS).

Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel (GPSSS), Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan

(GPStSS).

Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP) dan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Energi Serentak.

Pemprov Sumsel berkolaborasi dengan instansi swasta, BUMN/ BUMD, stakeholder terkait bertujuan guna memaksimalkan berbagai hasil pembangunan di wilayah Provinsi Sumsel. Terkait, Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS) direncanakan akan direalisasikan pada 8.391 rumah yang sudah tak layak huni.

"Angka tersebut masih bisa bertambah seiring dengan program dari dana desa juga Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta CSR Perusahaan Swasta, sehingga akan banyak sekali rumah yang akan dibedah," kata Fatoni.

Selain itu, terkait Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel (GPSSS) direncanakan akan membangun sanitasi di ribuan rumah warga. Lalu, ada Gerakan Penanganan Stunting se-Sumsel (GPStSS).

"Gerakan serentak seperti ini terus dilakukan agar pembangunan di Sumsel bisa lebih efektif, efisien, tepat sasaran, bisa diukur keberhasilannya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka kita kumpul di sini untuk bisa bergerak bersama-sama," ucap Fatoni.

Canangkan Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak

Agus Fatoni juga men-canangkan Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan se-Sumsel. Pencanangan itu dilakukan bersamaan dengan Penghargaan Paritran Award Tahun 2023 tingkat Pemprov Sumsel pada Maret lalu.

"Pada hari ini dalam kesempatan ini pencanangan Gerakan Perlindungan



Pekerja Rentan Serentak kita lakukan. Perlindungan pekerja perlu dilakukan dengan serius dan memobilisasi secara optimal," kata Fatoni.

Fatoni menyebut melalui Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak se-Sumsel merupakan bukti nyata kepedulian Pemprov Sumsel dengan pekerja. Selain itu, perlindungan Jamsostek juga dinilai penting bagi keluarga yang mengalami kecelakaan akibat bekerja.

"Sudah ada 1,1 juta pekerja yang terlindungi dari total 3 juta pekerja. Kita perlu bersama-sama, bersatu padu memberikan perhatian khusus kepada para tenaga kerja", katanya.

Melalui kesempatan ini, Pemprov Sumsel berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagsel memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang konsisten memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawainya berupa anugerah Paritran Award 2023.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi para pemimpin daerah dan pelaku usaha yang telah memberikan perlindungan jamsostek kepada pekerja.

Penganugerahan Paritran Award tahun 2023 bertujuan meningkatkan awareness dan peran aktif Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan perlindungan jamsostek termasuk pekerja rentan, yaitu pekerja miskin dan tidak mampu.

"Meningkatkan kepatuhan dan kepedulian pemberi kerja badan usaha terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin men-

gucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Sumsel kepada BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel.

"Setiap pekerja rentan mengalami risiko sosial seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia dan hari tua. Untuk itu dengan jamsostek memastikan setiap pekerja nyaman dan aman dalam melaksanakan pekerjaan. Karena dengan

terdapat sebanyak 9.100 pekerja rentan dan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebanyak 10.777 pekerja rentan.

"Mudah-mudahan perlindungan bagi pekerja rentan ini bisa dilaksanakan di seluruh Sumsel. Terlebih pak Gubernur telah mencanangkan Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak,"



adanya jaminan ketenagakerjaan perlindungan pekerja akan dicover," ucap Muhyiddin.

Saat ini, sejumlah daerah di Sumsel telah memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, diantaranya Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 11 ribu pekerja rentan, Kabupaten Musi Rawas

harapnya.

Di kesempatan itu, Pj Gubernur Agus Fatoni juga memberikan santunan bagi anak yatim, penyerahan santunan jaminan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan beasiswa kepada para penerima manfaat lainnya. ●



MUSRENBANG MOMENTUM STRATEGIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUKAR

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang.

Ketua DPRD Kabupaten Kukar, Abdul Rasid, yang menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD, mengatakan Musrenbang sebagai momentum strategis untuk penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di dua momentum, yaitu RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045, dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan baik daerah, provinsi dan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Salah satu momentum tersebut adalah pelaksanaan Pilkada serentak yakni Pilkada Provinsi Kalimantan Timur dan Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian beroperasionalnya IKN," kata Rasid.

Dia juga menyoroti peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan penyelenggaraan pendidikan pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan di daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan dalam wilayah jauh atau terpencil, serta berorientasi pada kualitas unggulan dalam proses pendidikan SDM dan lembaga pendidikan di daerah.

Pembangunan dan pengembangan kualitas infrastruktur di kecamatan dan desa-kelurahan khusus yang bersentuhan langsung dengan potensi IKN dan fasilitas

lain di kabupaten Kutai Kartanegara.

"Antara lain seperti SPN dan Mako Brimob," sebutnya.

Selain itu, dia juga menyoroti peningkatan kualitas layanan kesehatan dan dukungan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan dalam wilayah jauh terpencil dan masyarakat luas lainnya. Layanan kesehatan masyarakat seperti keberadaan Posyandu balita, Posyandu lansia, Puskesmas dan rumah sakit umum daerah.

Selanjutnya, pembangunan dan peningkatan tata kelola pertanian daerah kawasan secara terpadu, desa yang petani dan hasil produksinya berkelanjutan, lahan irigasi pertanian, tata kelola manajemen pertanian daerah dalam aspek pembinaan hingga kepada aspek peluang pemasarannya.

Lalu, insentif daerah pertanian, peningkatan kualitas penyediaan dan pengelolaan air bersih air baku menjadi kebutuhan rumah tangga dan publik. Serta peningkatan kualitas sarana dan lampu penerangan bagi masyarakat. Kemudian, sarana publik lainnya di kecamatan dan desa.

Pokok pikiran lainnya yang disampaikan yakni peningkatan kualitas tata kelola manajemen pariwisata daerah dalam usaha meningkatkan PAD, daya dukung infrastruktur dan objek pariwisata, daya dukung SDM pengelolaan pariwisata.

Lalu, pembangunan dan peningkatan tata kelola usaha ekonomi kreatif masyarakat, menjadikan hasil produksi usaha masyarakat menjadi keunggulan daerah dengan penguatan informasi, dan jaringan distribusi ekonomi masyarakat.

"Terkait dengan item-item pokok-pokok pikiran anggota DPRD terhadap RKPD tersebut sebagai hasil proses atau penjangkaran aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berupa perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan secara keseluruhan akan dikoordinasikan dan atau dientri dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)," tegas Rasid.

Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengingatkan agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi-misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 06 Tahun 2021, agar persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.

"Saya terima kasih apresiasi bahwa di dalam kerja, kita hasil kinerja kita tahun 2021-2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak," ujar Edi.

Dia menegaskan, terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mau ada OPD yang bermain-main dalam kaitan ini.

"Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makan ada program air bersih desa, hari



**KETUA DPRD KUKAR
ABDUL RASID**

ini kita fokus menangani penerangan atau listrik desa, makanya ada program terang kampungku,” tegasnya.

Disebutkan Edi, layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan pangan dengan program 120 km jalan usaha tani, yang ditunjang embung, irigasi, dan beberapa sarana-prasarananya, serta penguatan sumber daya petani.

Edi meminta perhatian OPD-OPD terkait dengan rencana kerja tahun 2025 dengan tema pemantapan pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan, yang dianggapnya masih umum dan harus diuraikan secara detail.

Dia berharap dari RKPD 2025 ini, walau baru rencana, hendaknya dilakukan dengan cermat. Laporan yang diterimanya, usulan dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp12 triliun. Sementara dari analisis pendapatan kurang lebih hanya Rp9 triliun.

“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul-betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti Pak Sekda untuk koordinatonya Bappeda, harus ada intervensi OPD-OPD yang menjadi leading sector, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri-sendiri oleh OPD terkait,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, menyampaikan beberapa hal, yakni tentang penyusunan, hubungan sistematika antar dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, capaian kinerja per tahap RP-JPD periode 2025-2045, dan paparan data tentang kondisi Kukar saat ini dan proyeksinya hingga 2045.

Selain itu, juga disampaikan materi tentang daya dukung pangan dan air serta permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan meliputi kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan, ketimpangan dalam pendidikan dan kesehatan, risiko instabilitas sosial dan politik, kolaborasi pembangunan yang belum optimal, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor ekstraktif, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan ketersediaan infrastruktur yang belum optimal, serta tergerusnya nilai budaya lokal dan ketidaksetaraan sosial.

Terkait isu strategi pembangunan, disampaikan isu strategi global, nasional, regional, dan daerah. Dalam isu strategi daerah, dia menyampaikan delapan poin. Pertama, pembangunan berwawasan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Kedua, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah terpencil, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan secara merata. Ketiga, mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat lembaga demokrasi dengan tujuan memperkuat pembangunan layanan dan informasi publik secara berkeadilan.

Keempat, memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan

yang harmonis dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.

Dia juga menyampaikan visi RPJPD Kukar 2025-2045 adalah Kukar Emas Berbudaya 2045 Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Sedangkan visi sasarannya adalah peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Sedangkan, misi RPJPD 2025-2045 yang pertama adalah mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing. Kedua mewujudkan



efisiensi, dengan fokus pada pembangunan pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan kolaboratif berbasis digital. Kelima, diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor non-ekstraktif, khususnya pembangunan ekonomi terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang produktif dan berorientasi hulu-hilir.

Keenam mendorong pembangunan regional yang merata dengan peningkatan investasi di wilayah terpencil dan interkonektivitas yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Ketujuh, pengembangan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ramah lingkungan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas berbasis fungsi keruangan. Kedelapan, pelestarian sosial dan budaya lokal, dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah

transformasi ekonomi dengan membangun sektor non ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien. Keempat, mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas perekonomian daerah yang tangguh. Kelima, mewujudkan kelangsungan sosial budaya dan kelangsungan berbasis ekologi kearifan lokal.

Keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif. Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau. Kedelapan, mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan. ●



Herman Deru

WIRASWASTA JAGO BERPOLITIK

Mantan Gubernur Sumsel H Herman Deru memiliki karir cemerlang di dunia politik. Sebelumnya Herman Deru atau yang akrab disapa HD ini adalah wiraswasta dan mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga menjadi Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Gubernur Sumsel.

Suami dari Febrita Lustia ini resmi menjabat Gubernur Sumsel sejak 2018 hingga 2023, HD mengawali kariernya sebagai seorang wiraswasta.

Lalu, pada tahun 1987 dirinya diangkat sebagai ASN pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel. Setelah mengabdikan kurang lebih 11 tahun, pada tahun 1998 HD menanggalkan jabatannya sebagai ASN.

Ayah dari empat anak ini kemudian mengundurkan diri dan kembali fokus mengembangkan bisnisnya sebagai wiraswasta dan terlibat di sebuah organisasi.

Dia menjabat posisi strategis di berbagai organisasi. Beberapa di antaranya yaitu Dewan Pertimbangan Organisasi GM Kosgoro Palembang, Komisi Ekonomi DPD KNPI Provinsi Sumsel.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Penyantun STIE Trisna Negara, Belitang, Ketua Bidang Koperasi BPC GAPENSI Kodya Palembang, Dewan Penasehat Taekwondo Indonesia Cabang Palembang, dan Dewan Penasehat Koperasi Trisna Negara Sejahtera OKUT

Setelah banyak berkecimpung di organisasi, saat menjadi pengusaha HD tertarik berpolitik dan terjun ke panggung politik dengan mencoba keberun-



tungannya di Pilkada Bupati OKU Timur pada tahun 2005-2010.

Dia maju sebagai calon Bupati OKU Timur berpasangan dengan Kholid Ma-

wardi dan diusung oleh PBB dan PNBK. Hal itu efek dari banyaknya pengalaman berorganisasi membuatnya jago melakukan strategi berpolitik dan meme-

nangkan kompetisi menjadi Bupati OKU Timur.

Saat menjabat, uniknya HD mengeluarkan kebijakan penggunaan bahasa daerah Komerling, Jawa dan bahasa asli OKU Timur lainnya.

Penduduk OKU Timur wajib menggunakan bahasa daerah Komerling pada tanggal 5 setiap bulannya, bahasa Jawa pada tanggal 15, dan bahasa ibu atau daerahnya setiap tanggal 25.

HD mengabdikan dirinya hanya ada di kantor 2 hari saja dan 5 hari dia terjun ke desa-desa untuk merespon semua keluhan warganya di OKU Timur.

Dia bahkan lebih memilih tinggal di Belitung rumah ayahnya H Hamzah ketimbang di rumah dinas (rumdis) Bupati di Martapura.

Pola kerja itu dipuja-puja oleh warga OKU Timur dia dijuluki Bupati 25 dan dipercaya menjabat dua periode seba-



BIODATA

Nama : Herman Deru
 Lahir : Sidomulyo, 17 November 1967
 Partai Politik : Nasdem
 Istri : Febrita Lustia
 Lahir : Palembang, 20 Februari 1967
 Jumlah anak: 4 (empat) orang
 1- Percha Leanpuri (almh)
 2- Samantha Tivani
 3- Leony Marezza Putri
 4- Ratu Tenny Lariva

PENDIDIKAN

- ▶ SD Negeri 1 Sidomulyo Belitang tahun 1979
- ▶ SMP Negeri 1 Belitang tahun 1982
- ▶ SMA Negeri 3 Palembang 1985
- ▶ Fakultas Hukum Universitas Shayakirti Palembang tahun 1995
- ▶ Magister Manajemen STIE Trisna Negara Belitang 2008

KARIR POLITIK

- ▶ Bupati OKU Timur (2005-2010 dan 2010-2015)
- ▶ Gubernur Sumatera Selatan (2018-2023)
- ▶ Ketua Organisasi Intra Sekolah SMPN 1 Belitang OKU Timur
- ▶ Dewan Pertimbangan Organisasi GM Kosgoro Tk. II Palembang
- ▶ Dewan Penyantun Yayasan Masjid Istiqlal Sidomulyo Belitang
- ▶ Wakil Bendahara Pengurus Cabang NU Palembang Ketua Nasional Demokrat Provinsi Sumsel
- ▶ Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumatera Selatan Periode 2018-2023
- ▶ Ketua Perbakin Sumsel Periode 2019-2023

PENGHARGAAN

1. Keberhasilan Pencapaian Penerima PBB BPHTBTahun Anggaran 2006
2. Penghargaan SUMSEL BUSINESS AWARD 2006 Supporting For Good Acceleration (Sukses Melakukan Percepatan Pembangunan Daerah, terutama bagi daerah Otonomi Baru)
3. Pendukung Utama Bintang Keteladanan Akhlak Mulia Tahun 2007
4. Penghargaan SATYALENCANAPEMBANGUNAN "Jasa-jasa yang besar terhadap Negara dan Bangsa Indonesia dalam Lapangan Pembangunan Umumnya atau Suatu Bidang Pembangunan Tertentu
5. Penghargaan Tingkat Nasional Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2008 Penghargaan SATYALENCANA PEMBANGUNAN
6. Piagam Penghargaan dalam Meningkatkan Produksi Beras di atau 5%.
7. Piagam Penghargaan Atas Perhatiannya Pada Bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8. Penghargaan Anugerah Adipura Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil
9. MURI Atas Rekor Pemrakarsa dan Penyelenggaraan Bedah Rumah dengan Jumlah Terbanyak 303 Rumah
10. Penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) Tahun 2019 dalam kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi.

MEDIA SOSIAL (MEDSOS)

Instagram: @hermanderu67 dengan 194 ribu pengikut (per 19 April 2024)

Facebook: @Herman Deru dengan 75 ribu pengikut (per 19 April 2024).



gai Bupati berikutnya. Ketika itu HD kembali maju sebagai petahana Bupati OKU Timur periode 2010-2015 berpasangan dengan Kholid Mawardi.

Setelah itu HD melebarkan karir politiknya dengan mencoba keberuntungan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel pada tahun 2018.

Saat itu sebagai pasangan calon (Paslon) HD memilih Mawardi Yahya resmi diusung oleh tiga partai besar. Ketiga partai yang memberikan dukungan kemenangan paslon ini yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY) memperoleh posisi puncak versi quick count. Berdasarkan data dari LSI, HD-MY memperoleh 35,54 persen suara, Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda 32,10 persen suara, Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyudin 21,01 persen suara, dan Saifuddin Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah 11,35 persen suara.

Kini HD kembali mencoba keberuntungannya melanjutkan berlaga di venue politik berkompetisi di Pilkada 2024 yang harus tega melawan mantan pasangannya Mawardi Yahya ikut maju sebagai kontestan.

HD harus pisah ranjang dengan Mawardi Yahya yang terlebih dulu secara mengejutkan melakukan deklarasi maju Pilkada 2024 berpasangan dengan Harnojoyo. Tentunya pertarungan seru akan terjadi antara keduanya Herman Deru versus Mawardi Yahya pada No-

vember mendatang.

Seperti diketahui, Herman Deru dan Mawardi Yahya adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023.

Dalam perjalanan memimpin Sumsel, keduanya berjalan harmonis. HD menyatakan menghormati keputusan Mawardi Yahya yang akan berpasangan dengan Harnojoyo pada Pilkada Sumsel tahun 2024.

Hingga akhir masa jabatan, HD dan Mawardi Yahya tetap solid. Bahkan, sempat menggelar acara mancing dan makan bersama dengan mengajak keluarga.

Kepada wartawan, HD mengatakan tidak pernah berpikir akan meninggalkan Mawardi Yahya sebagai pasangan pada Pilkada Sumsel tahun 2024.

Sebagai incumbent, HD menegaskan-

kan bahwa partainya akan tetap fokus dan berkomitmen untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat Sumsel.

Selain itu, HD juga mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama dengan semua pihak, termasuk Mawardi Yahya dan para politisi lainnya, demi kebaikan bersama.

Mawardi Yahya dan Harnojoyo memberikan kejutan sebelum Pilgub Sumsel 2024.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Besemah (Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang) mulai menyatakan dukungan dengan merapat kepada Calon Gubernur Sumsel HD.

Mereka menilai sampai saat ini HD adalah kandidat terkuat untuk memenangkan Pilkada Gubernur Sumsel yang



akan digelar November 2024 mendatang.

Anggota DPRD Sumsel asal Dapil 7, Rudi Hartono mengatakan, dari hasil reses dan bertemu masyarakat di Besemah (Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang) didapat bahwa aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat terhadap sosok HD masih begitu tinggi.

Masyarakat begitu mengenal dan merasa kedekatan dengan mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut.

Selain itu, dia menilai selama menjadi Gubernur Sumsel, HD sudah terbukti berkontribusi besar membangun dan memajukan Kabupaten Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang.

Menurut Rudi, kepedulian dan perhatian HD terhadap daerah Besemah tidak diragukan lagi.

Terbukti selama 5 tahun menjadi Gubernur, sebanyak hampir Rp 2 Triliun bantuan keuangan Gubernur (bangub) diluncurkan ke Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang.

Bangub tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur di 3 daerah tersebut, seperti jalan, irigasi, sarana pendidikan, gedung olahraga, rumah sakit dan lainnya.

Hal senada disampaikan Yance Djarab. Menurutnya, perhatian HD terhadap daerah Besemah sudah terbukti dan bukan sekedar wacana.

Hal ini sesuai dengan visi HD yaitu Sumsel Maju untuk Semua. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan dilakukan secara merata di 17 kabupaten dan kota se Sumsel.

Gubernur Sumsel HD diwakili Ketua tim sekaligus juru bicara Alfrenzi Panggarbesi mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Gubernur Sumsel di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumsel Jl Jenderal Basuki Rahmat Palembang, Selasa 16 April 2024.

Alfrenzi Panggarbesi atau yang akrab disapa Ojik menambahkan, keinginan dan aspirasi masyarakat Besemah untuk mendukung HD pada Pilgub 2024 mendatang merupakan buah atau hasil amal perbuatan HD terhadap masyarakat di



3 kabupaten tersebut.

Mengingat selama 5 tahun menjadi Gubernur, sudah banyak pembangunan yang dilakukan.

Disebutkan, di Kabupaten Lahat misalnya, ada 2 proyek pembukaan jalan baru, yaitu proyek pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Pajar Bulan - Gumay Ulu dan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dan PUMI yaitu Desa Palak Siring - Sindang Panjang.

Demikian pula di Pagaralam dan Empat Lawang.

Ojik mengungkapkan, khusus untuk Pagaralam, perhatian HD luar biasa.

Bantuan Gubernur yang diterima Pagaralam selama 5 tahun hampir Rp 500 Miliar yang digunakan untuk membangun infrastruktur jalan dan irigasi sampai ke dusun, RT dan bahkan ke talang. Sarana pendidikan, SD, SMP dan SMA juga dibangun dengan baik.

Sementara itu, mantan Bupati Lahat, H Cik Ujang dan Walikota Pagaralam, Alpien Maskoni di berbagai kesempatan mengakui kepedulian sosok HD terhadap pembangunan dan kemajuan kawasan Besemah.

Selain rutin setiap memberikan bantuan gubernur dengan porsi yang cukup besar, sosok HD sangatlah mudah untuk ditemui dan berkomunikasi.

Sehingga persoalan-persoalan pembangunan di daerah dengan gampang mudanya mudah dicarikan solusinya.

• IRY

Mawardi Yahya KERAP MENGUBAH PETA POLITIK SUMSEL

Politikus kondang Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya selalu memberikan kejutan besar di panggung politik. Mulai dari perpindahan dari partai politik sampai keputusannya pisah ranjang dari Herman Deru mantan Gubernur Sumsel di Pilkada 2024.

Mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, bergabung ke Partai Gerindra dan dikenalkan langsung Ketua Umum Gerindra H Prabowo Subianto, Kamis, 27 April 2023.

Kabar pindahannya Mawardi Yahya ini membuat kejutan politik di Sumsel, pasalnya sebelumnya pria berambut putih ini merupakan politisi Partai Golkar.

Tak tanggung-tanggung, Mawardi Yahya langsung menduduki posisi penting di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Yakni, sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra.

Ramai dibicarakan partai berlambang pohon beringin itu bakal mengusung kader lain di Pilgub Sumsel 2024.

Mawardi juga merupakan kakak kandung dari Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya yang lahir pada 2 Maret 1958 bukan sosok baru dalam kancah perpolitikan di Sumsel.

Pria berambut putih yang akrab disebut Wak Uban ini, sebelum menjabat sebagai mantan Wakil Gubernur Sumsel yang menjabat sejak 1 Oktober 2018, sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 2 periode.

Mawardi Yahya menjabat Bupati Ogan Ilir pada periode 2005-2010 dan periode 2010-2015. Saat ini Bupati Ogan Ilir di -

jabat putranya, Panca Wijaya Akbar. Sebelum berkarir sebagai Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, periode 1999-2004.

Bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Mawardi Yahya, merupakan sosok bapak pembangunan. Pada masa kepem-



impinannya dibangun Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai.

Mawardi Yahya mengundurkan diri sebagai Bupati Ogan Ilir, pada 23 Juni 2015 dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Daud Hasyim hingga selesai pada tanggal 22 Agustus 2015. Pada akhir masa jabatannya, Kabupaten Ogan Ilir meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mawardi sendiri merupakan Ketua Tim Kemenangan Daerah Prabowo-Gibran di Sumsel. Berkat campur tangannya, Prabowo-Gibran menang di Sumsel dengan memperoleh 69,8%. Baru-baru ini Mawardi menggelar deklarasi maju Pilgub Sumsel 2024 dengan menggandeng Harnojoyo, mantan Wali Kota Palembang.

Karena itulah Mawardi percaya diri (PeDe) maju menyaingi Herman Deru yang sebelumnya adalah rekannya di Pilgub Sumsel 2018-2023 diyakini karena Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di Pemilu 2024.

Sementara eks rekannya, Herman Deru yang juga Ketua DPW NasDem Sumsel tak meraih hasil optimal bagi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di provinsi tersebut.

Ketidakberpihakan di Pilpres lalu diduga membuat keduanya "pisah ranjang".

Sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Maju wilayah Sumatera Selatan (TKD KIM Sumsel), Mawardi Yahya, mengaku siap merebut posisi pemilihan kepala daerah. Peluang menjadi calon Gubernur Sumsel diklaim terbuka lebar usai memastikan Prabowo-Gibran meraih 65





persen suara di Bumi Sriwijaya.

Kans menjadi gubernur Sumsel 2024-2029 terbuka terlebih lagi Prabowo telah mempercayakan posisi jabatan Mawardi sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua TKD KIM Sumsel.

Saat itu juga Mawardi Yahya sudah mulai berbicara kepada publik Sumsel untuk jadi calon Gubernur Sumsel di Pilkada 2024.

Namun pernyataan Mawardi Yahya itu belum terlalu membuat publik Sumsel kaget karena Wak Uban hanya mem-

berikan pernyataan tidak pasti.

Dia baru menyebutkan apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuknya saja bukan berarti Mawardi Yahya saat itu ditebak benar-benar ingin pisah ranjang dari Herman Deru.

Publik benar-benar terkaget-kaget saat kejutan sebelum Pilgub Sumsel 2024, Mawardi Yahya dan Harnojoyo bakal berpasangan, itu terungkap dalam pengumuman di Palembang pada 10 Maret 2023.

Mawardi Yahya, mantan wakil gu-

bernur periode 2018-2023, dan pasangannya, mantan walikota Palembang Harnojoyo, yang secara resmi mendeklarasikan diri mereka sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Mawardi Yahya adalah salah satu figur yang menjalani perjalanan politik yang cukup mencengangkan di Sumatera Selatan. Dilahirkan pada 2 Maret 1958, Mawardi telah mengukir namanya sebagai seorang yang berpengaruh dalam kancah politik daerah.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 1 Oktober 2018, Mawardi telah membuktikan kiprahnya di tingkat lokal.

Dia pernah menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir selama dua periode, yakni dari tahun 2005 hingga 2010, dan kembali menjabat untuk periode 2010 hingga 2015.

Sebelumnya, Mawardi juga telah mengemban tanggung jawab sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada periode 1999 hingga 2004.

Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya cukup memiliki harta kekayaan yang melimpah walau-



pun masih kurang banyak jika dibandingkan dengan pejabat lainnya. Jumlah keseluruhan harta kekayaan Wakil Gubernur Sumatera Selatan ini bernilai miliaran, yaitu terdapat aset mobil dan tanah bangunan yang tersebar di 9 tempat.

Mawardi Yahya tercatat juga memiliki harta kekayaan tanah dan bangunan yang bernilai Rp30.800.660.000 dari hasil sendiri, berikut salah satunya:

- Aset tanah dan bangunan yang memiliki luas 4135 m2/ 440 m2 seharga Rp3.090.980.000 berada di wilayah Palembang
 - Aset tanah dan bangunan yang memiliki luas 204 m2/ 48 m2 seharga Rp150.780.000 berada di wilayah Ogan Ilir.
 - Aset tanah yang memiliki luas 113900 m2 seharga Rp346.700.000 berada di wilayah Ogan Ilir.
 - Aset tanah dan bangunan yang memiliki luas 900 m2/ 1000 m2 seharga Rp25.300.000.000 berada di wilayah Jakarta Utara.
 - Aset tanah dan bangunan yang memiliki luas 300 m2/ 150 m2 seharga Rp350.000.000 berada di wilayah Ogan Ilir.
- Selain itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mempunyai harta kekayaan yang berupa kendaraan bernilai Rp610.000.000 dari hasil sendiri:
- Mobil merk Land Rover Minibus keluaran 2007 senilai Rp335.000.000

- Mobil merk Toyota Minibus keluaran 2021 senilai Rp275.000.000

Wakil Gubernur Sumatera Selatan juga diketahui mempunyai harta kekayaan yang berupa aset-aset lainnya:

- Harta bergerak lainnya Rp457.925.000
- Aset harta berupa kas dan setara kas Rp1.785.274.132
- Harta lainnya sebesar tidak ada
- Aset surat berharga tidak ada

Total harta kekayaan milik Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya yaitu sejumlah

Rp33.653.859.132

Pilkada 2024 menjadi sorotan keputusan Mawardi Yahya memilih pisah dari Herman Deru apakah dinilai tepat. Terlebih lagi elektabilitas siapa yang paling tinggi untuk bisa merebut hati rakyat Sumsel.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Ardiyan Saptawan mengatakan Mawardi Yahya memiliki elektabilitas yang sama seperti Herman Deru. Katanya walaupun banyak orang menilai Mawardi Yahya lebih kuat dari Herman Deru tetap keduanya sama-sama kuat.

"Keduanya sama-sama kuat, sehingga keberadaan Mawardi Yahya tidak bisa dianggap sepele untuk para penantang lainnya, termasuk Herman Deru," ungkapnya.

Dilanjutkannya, secara partai memang Gerindra partai yang diusung Mawardi Yahya lebih unggul dari partai NasDem diusung oleh Herman Deru. Namun itu disebutnya karena kekuatan dari caleg yang berhasil mengamankan dapil mereka bukan karena elektabilitas dari Mawardi Yahya.

Ardiyan menyebutkan keburukan dari pemerintahan Herman Deru juga keburukan dari Mawardi Yahya jadi tidak akan bisa saling menjatuhkan. Publik juga akan menilai keduanya adalah satu

paket apabila warga Sumsel menyebut mereka berhasil ataupun gagal semua penilaiannya untuk satu orang bukan secara terpisah karena mereka adalah paket penguasa di Sumsel Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terlebih kedua sudah pernah bersama dinilainya sama-sama bisa mengetahui taktik dan strategi masing-masing. Tentunya sama-sama bertarung di Pilkada pastinya trik dan taktik yang sama di Pilkada 2024 akan terbaca. ●



BIODATA

Nama : Mawardi Yahya
 Tempat / Tanggal Lahir : Sukaraja Baru/ 2 Maret 1958
 Istri : Fauziah
 Anak : Lima anak
 1. Fitri Yulianti
 2. Isnaini
 3. Zaitun
 4. Ahmad Wazir Noviadi
 5. Panca Wijaya Akbar

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Sukaraja Baru (1971)
2. SMP YP Kerja (1974)
3. STM Pertambangan LPTM Palembang (1977)
4. Universitas Palembang (1995)

PENDIDIKAN INFORMAL

1. Pelatihan Manajemen Strategi Angkatan III Bandiklat Depdagri (2001)

2. Penyegaran Wawasan Kebangsaan Kewaspadaan Nasional Lemhanas (2004)

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (1999–2004)
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (2004–2005)
3. Bupati Kabupaten Ogan Ilir (2005–2010)
4. Bupati Kabupaten Ogan Ilir (2010–2015)
5. Wakil Gubernur Sumatra Selatan (2018–2023).

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ogan Komering Ilir (2002-2004)
2. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir (2004-2009)
3. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir (2014-2018)

7

GERAKAN SERENTAK AGUS FATONI BIKIN KEMAJUAN SUMSEL

Agus Fatoni menjadi sosok yang berpengaruh di Sumatera Selatan (Sumsel) setelah resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel pada 2 Oktober 2023.

Dilansir dari berbagai sumber, Agus Fatoni sendiri memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Dia adalah putra asli Lampung, lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampung, pada tanggal 6 Juni 1972.

Masa pendidikan dasar hingga menengah pertamanya dihabiskan di kampung halaman, sementara masa SMA harus ditempuh di Bandar Lampung.

Setelah menyelesaikan SMA, Agus Fatoni melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), yang sekarang dikenal sebagai Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).

Dia lulus dari program D3 di STPDN Jatiningor pada tahun 1994. Pendidikan sarjana (S1) diambarnya di jurusan Kebijakan Pemerintah di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, dan dia lulus pada tahun 1999.

Agus Fatoni juga meraih gelar magister (S2) dalam Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2003, dan doktor (S3) dalam Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2009.

Agus Fatoni juga memiliki pengalaman berkarir dalam dunia birokrasi pemerintahan. Dia pernah menjabat

sebagai Ajudan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung dari tahun 1995 hingga 1997.

Selanjutnya, sebagian besar kariernya dihabiskan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jabatan terbarunya adalah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang dia emban sejak 12 Maret 2022. Pada tahun 2020, dia juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

Menjabat 3 bulan sejak dilantik Presiden RI Joko Widodo -

do menggantikan Herman Deru-Mawardi Yahya yang sudah habis masa kepemimpinannya. Selama itu, Fatoni mengklaim sudah menjalankan 5 program prioritas yang diamanahkan kepadanya.

Sepanjang ia menjabat, semua program prioritas yang ditekankan Menteri Dalam Negeri RI sudah dijalankan dengan maksimal.

"Pertama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada," ujar Fatoni.

Dalam penanganan ga-



nan karhutla, Fatoni menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, berkolaborasi dengan semua pihak. Kolaborasi tidak hanya dengan pemerintahan melalui dukungan anggaran, penegakan hukum, melainkan juga dengan swasta.

"Yang terpenting dalam penanganan karhutla adalah pencegahan agar bencana ini tidak terulang setiap tahun. Untuk tahun ini kita akan melakukan antisipasi di awal," ungkapnya.



Fatoni menjelaskan upaya itu di antaranya penambahan operasi udara melalui teknologi modifikasi cuaca bekerja sama dengan beberapa lembaga. Kemudian, Pemprov Sumsel mengupayakan pembangunan embung, kanal dan infrastruktur pendukung lainnya agar karhutla tak terulang.

Kedua soal inflasi, kata dia, upaya pengendaliannya telah dilakukan di penghujung tahun. Seperti optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, gerakan pangan murah, sidak pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil, refocusing anggaran BTT dan lainnya.

Pada November 2023 lalu, tingkat inflasi Sumsel mencapai 3,52%.

"Dukungan anggaran terhadap inflasi ini mencapai Rp122,9 miliar. Angga-

rannya dikumpulkan dari dinas-dinas," jelasnya.

Ia menuturkan adanya penurunan stunting dimana pada 2022 lalu tercatat angkanya menjadi 18,6%. Merujuk data e-PPBGM, jumlah balita kategori pendek dan sangat pendek sebanyak 9.062 atau senilai 1,8% dari jumlah balita yang diukur sebanyak 502.209.

"Penanganan stunting ini diupaya-



kan juga peningkatan anggaran yang mencapai 27,93% dari RKPD 2023. Namun, upaya pencegahan terhadap stunting ini harus terus dilakukan, utamanya kepada para wanita sebelum dia menikah," jelasnya.

Sumsel pun berhasil menjadi provinsi tercepat di Pulau Sumatera dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan 1,89%. Sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem Sumsel

3,19% atau sebanyak 279 ribuan jiwa, kini menjadi 1,29%. Meski cukup besar penurunannya, angka itu masih di atas nasional, 1,12% atau tertinggi ke-12 se-Indonesia.

"Upaya yang kita lakukan untuk menurunkannya melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti renovasi rumah tidak layak huni, akses sanitasi dan air bersih. Kita juga akan

memanfaatkan data Regsosek untuk penanggulangannya agar lebih tepat sasaran. Upaya lain juga melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lainnya," ungkap Fatoni.

Kemudian soal Pemilu dan dukungan Pilkada tahun ini. Pemprov Sumsel telah melakukan penandatanganan NPHD, termasuk kabupaten/kota terkait dana Pilkada serentak 9 No-

• INFO PROFIL

vember 2024 lalu. Hal itu menjadi yang pertama di Indonesia dan menginisiasi provinsi lain untuk melakukan hal serupa. Dimana pada 2023 dianggarkan 40% dan tahun ini 60%.

"Dan ternyata tidak semua provinsi bisa melakukannya, ada kabupaten/kota yang akhirnya menganggarkan pada 2024," ungkap Fatoni.

Soal capaian prestasi, ia juga me-

kesejahteraan masyarakat dan lainnya," ulasnya.

Tercatat selama kurang lebih 6 bulan menjabat, saat ini sudah ada tujuh Gerakan Serentak guna mengendalikan inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem serta menekan angka stunting.

"Kami melaunching berbagai Gerakan Serentak bertujuan untuk memaksimalkan berbagai hasil pembangunan

Pemprov Sumsel memiliki Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel yang tersebar di 19 titik se-Sumsel, baik itu pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dalam seminggu yaitu, Senin, Selasa dan Kamis.

Kemudian, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Inflasi Serentak se-Sumsel guna meningkatkan efektivitas koordinasi agar lebih maksimal. Kedua Gerakan Serentak tersebut diluncurkan langsung oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada Senin 29 Januari 2024.

"Ini sudah dilaksanakan dari tahun lalu dan akan kita teruskan setiap Senin, Selasa dan Kamis. Jadi, silakan kepada seluruh masyarakat setiap Senin, Selasa dan Kamis datang ke pasar murah yang digelar provinsi, kabupaten/kota serentak. Jadi semua harganya murah karena disubsidi," jelasnya.

Tak hanya itu, Pemprov Sumsel juga melaunching tiga Gerakan Serentak lainnya pada Rabu 21 Februari 2024.

Diantaranya, Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS) yang akan direalisasikan pada 8.391 rumah yang sudah tak layak huni.

Angka tersebut masih bisa bertambah seiring dengan program dari dana desa juga Baznas provinsi dan Kabupaten/Kota serta CSR perusahaan swasta sehingga bisa mencapai 13 ribu rumah lebih yang akan dibedah.

"Kalau satu desa, satu kelurahan dengan melakukan bedah rumah hanya dua saja itu sudah terhitung 6.900 jika ditambah 8.000an berarti sudah ada kurang lebih 14.000an. Jika ke depannya dari CSR perusahaan itu mencapai 5.000 saja maka akan 15.000 lebih yang mampu kita lakukan bedah rumah," jelas Fatoni.

Dia menambahkan, program seperti Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel mampu dimaksimalkan.

"Ini gerakan-gerakan seperti ini yang kami maksimalkan, kalau baru sebentar memang belum kerasa. Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini konsisten agar semua dampaknya dirasakan masyarakat," serunya.

Kemudian, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Sela-



nyebut ada 24 penghargaan dari total 51 award. Menurutnya, penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras bersama.

"Ini merupakan indikator capaian kinerja kita, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. Terpenting adalah output-nya, karena capaian ini akan berdampak terhadap pembangunan,

di wilayah Sumatera Selatan tanpa terkecuali," lanjut Fatoni.

Berbagai kolaborasi dengan instansi swasta, BUMN/BUMD, stakeholder terkait terus digencarkan. Hal ini tentunya sebagai bukti nyata komitmennya dalam membangun Sumsel menjadi lebih maju kedepannya juga menjamin kesejahteraan masyarakat Sumsel.

tan (GPSSS) yang direncanakan akan membangun sanitasi sebanyak 6.984 rumah warga.

“Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel yang juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Direncanakan kedepannya akan dibangun 6.894 unit kloset dan septitank,” ucap Fatoni.

Selanjutnya, juga ada Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS), saat ini tercatat 33,64 persen anak yang dibantu melalui program Bunda Ayah Asuh Stunting (BAAS) tentunya juga tersebar di 17 Kabupaten/ Kota se-Sumsel.

“Untuk GBRSS, GPSSS, dan GPStSS ini kami launching bersama Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Pusat Tri Tito Karnavian yang sangat peduli dengan persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Lalu, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP). Melalui gerakan ini, mengajak masyarakat untuk mau memulai menanam bahan pokok seperti bawang merah dan cabe pada pekarangan rumah masing-masing.

Gerakan ini juga sebagai upaya dalam merubah pola pikir masyarakat

dari konsumen menjadi produsen melalui bantuan bibit hortikultura, ternak dan perikanan,” tuturnya.

Provinsi Sumsel juga telah dilaksanakan perluasan program melalui GSMP Goes to Scool and Goes to Office.

Program ini juga bekerjasama dengan TP PKK Sumsel. PKK adalah salah satu dari stakeholder yang mendukung pelaksanaan GSMP selain dari Pemerintah/OPD, bisnis, organisasi, sampai dengan karang taruna. •IRY



BIODATA

Nama : Agus Fatoni
Tempat Tanggal Lahir : Bahuga, Waykanan, Lampung
6 Juni 1972
Istri : A. P Widyningtyas
Anak 3 : Adien
Are
Asa

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ▶ SD Negeri 1 Sukabumi Bahuga, Berijazah Tahun 1985
- ▶ SMP Negeri 1 Bahuga Way Kanan, Berijazah Tahun 1988
- ▶ SMA Negeri 1 Tanjung Karang, Berijazah Tahun 1991
- ▶ Diploma III Pemerintahan STPDN Jatinangor, Berijazah Tahun 1994
- ▶ Sarjana Jurusan Kebijakan Pemerintah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, Berijazah Tahun 1999
- ▶ Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Berijazah Tahun 2003
- ▶ Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Berijazah Tahun 2009

RIWAYAT JABATAN

- ▶ PNS Pusat pada Kantor PMD Prov Dati I Lampung (15/07/1994)
- ▶ Ajudan Gubernur Lampung (22/09/1995)
- ▶ Staf Biro Perlengkapan Prov Lampung (dalam rangka tugas belajar Magister) (01/01/1999)
- ▶ Staf Pusat Penerangan Setjen Depdagri (01/11/2004)
- ▶ Staf Direktorat Pengembangan Kapasitas & Evaluasi Kinerja Daerah Ditjen Otda (01/08/2006)
- ▶ Kepala Seksi Prov Papua dan DI Yogyakarta Subdit Otsus, Ditjen Otda (05/09/2008)
- ▶ Kepala Seksi Prov Papua Subdit Otsuswil II, Direktorat PDOD dan DPOD, Ditjen Otda (05/10/2010)
- ▶ Kepala Sub Direktorat DBH Pajak & SDA, Ditjen Keuangan

Daerah (16/09/2011)

- ▶ Kepala Bagian Protokol Kemendagri (07/08/2012)
- ▶ Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri (31/05/2013)
- ▶ Sekretaris KORPRI (01/04/2014)
- ▶ Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Setjen Kemendagri (22/07/2015)
- ▶ Plt. Kepala Pusat Faslitasker Sama, Setjen Kemendagri (11/08/2015)
- ▶ Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri (19/02/2019)
- ▶ Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (05/02/2020)
- ▶ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (17/07/2020)
- ▶ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (28/07/2020)
- ▶ Pjs. Gubernur Sulawesi Utara (26/09/2020)
- ▶ Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (19/11/2021)
- ▶ Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (10/03/2022)

RIWAYAT PENGHARGAAN

- ▶ Mahasiswa Teladan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Depdagri 1999
- ▶ Satyalancana Karya Satya X Tahun 2009 Dari Presiden RI
- ▶ Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2014 Dari Presiden RI
- ▶ Prestasi Istimewa Lulusan Terbaik Diklatpim Nasional Tingkat II Tahun 2019
- ▶ Penghargaan Pjs Gubernur Sangat Komunikatif Tahun 2020
- ▶ Pembina Karang Taruna Terbaik Tahun 2020
- ▶ Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2022 Dari Presiden RI

Ratu Dewa DARI ANAK PETANI MENUJU PALEMBANG 1

Ratu Dewa kini makin populer di tengah-tengah masyarakat Kota Palembang, ia bahkan menjadi salah satu kandidat kuat Wali Kota Palembang di pilkada serentak November 2024 mendatang.

Bahkan dari sejumlah nama beken tokoh politik di Palembang, Ratu Dewa bahkan muncul di papan atas sejumlah survey bakal calon Wali Kota Palembang periode mendatang.

Pj Wali Kota Palembang itu dilantik pada 18 September 2023 menggantikan Harnojoyo, ada banyak calon yang diusulkan, namun namanyalah yang dipilih.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang dan bukanlah sosok yang mentereng seperti kebanyakan para pejabat strategis di sejumlah kota besar.

Bukan sekolah di luar negeri dengan gelar yang panjang, ia bahkan mengenyam bangku sekolah dasar di Desa Rantau Sialang, Muara Kuang Ogan Ilir, lalu merantau ke Kota Palembang, Sumsel.

Pendidikan SMP dan SMA di Palembang pun bukan sekolah yang favorit dan tenar saat itu, ia sekolah swasta, Gajah Mada, lalu melanjutkan di perguruan tinggi Fakultas Ushuluddin di UIN Raden Fatah Palembang.

Sama seperti mahasiswa pada umumnya, Ratu Dewa menikmati jalur pendidikan sebagai anak desa yang berjuang di tengah gemerlap kota pempek.

Bukan tanpa perjuangan, Ratu Dewa lulus perguruan tinggi dan menjadi salah satu mahasiswa yang tercepat menyelesaikan studi, bahkan diangkat menjadi dosen luar biasa di kampus tersebut.

Awal karir Ratu Dewa pada 1993, ia diangkat menjadi PNS di Dinas Penerangan Sumsel dengan pangkat Golongan 3B sebagai staf khusus Kakanwil.

Berkat doa dan usaha, Ratu Dewa juga begitu cepat diangkat menjadi Kasi Rencana Operasional Penerangan hingga Dinas Penerangan kala itu dibubarkan.

Berada di jalur aparatur sipil negara, Ratu Dewa lalu berlabuh di Sekretariat Provinsi, sebagai staf khusus pimpinan TU di era Gubernur Rosihan Arsyad.

Karir yang cukup membanggakan kala itu sebagai Kabag dan Kasubag Humas Pemprov Sumsel, ia banyak bergaul sebagai gerbang utama informasi masyarakat dengan pemerintah.

Setelah tak lagi menjadi Kabag dan Kasubag Humas Pemprov Sumsel, Ratu Dewa bekerja Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel.

Kegigihan Ratu Dewa juga tidak terlepas dari dirinya yang melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya dengan lulusan Magister Kebijakan Publik yang ditempuh sambil bekerja.

Ratu Dewa tidak patah semangat menempuh pendidikan, meski bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan, bekerja sambil menempuh pen-

didikan ia lalui kala itu.

Singkat cerita, Ratu Dewa kemudian pindah tugas ke Pemkot Palembang dan kembali dipercaya menjabat Kabag Humas dan Protokol berkat pengalamannya saat itu.

Ratu Dewa kian melesat karirnya ketika diplot menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palembang,

Setelah itu ia juga men-j a b a t Kepala



BKPSM Palembang, ia dikenal sebagai ASN dengan segudang pengalaman dan prestasi ketika memimpin sederet instansi.

Meski bukanlah sosok yang cukup familiar, Ratu Dewa semakin mendapat kepercayaan dari Wali Kota Harnojoyo kala itu, pada Juni 2020 ia dilantik sebagai Sekda, jabatan ASN tertinggi di Pemkot Palembang.

Sebelum menjadi PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa adalah sosok yang cukup sibuk, sejak menjadi Sekda ia bahkan menghandle tidak sedikit permasalahan kota.

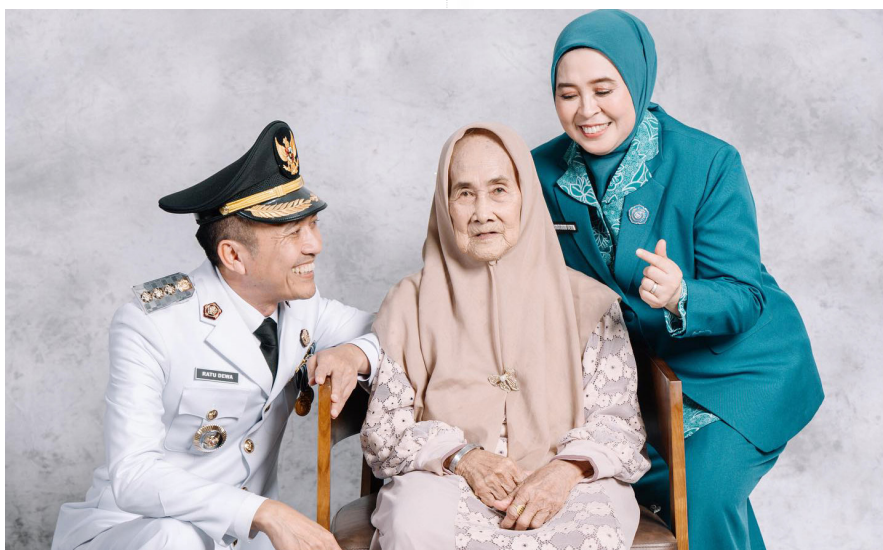
Pengaduan masyarakat, hingga keluhan warga satu persatu diakomodir, layanan publik hingga sederet kepentingan publik menjadi prioritas ketika dirinya menjadi Sekda.

Bahkan tidak bisa ditampik, Ratu Dewa adalah sosok yang cukup populer di sosial media, sejumlah kebijakan menjadi sorotan masyarakat kala itu.

Ratu Dewa kian matang, hingga akhirnya diangkat menjadi Pj Wali Kota Palembang menggantikan Harnojoyo yang sebelumnya sudah habis periode jabatan.

Didapuk menjadi Pj Wali Kota Palembang, perjalanan karir Ratu Dewa tidaklah seperti mie instan yang siap diseduh lalu dimakan.

Ia sadar bahwa jabatan adalah amanah, dan melayani masyarakat adalah keharusan, hal itu bahkan sering terlihat ketika Ratu Dewa terjun langsung ke area



rawan banjir.

Ia bahkan tetap bekerja di luar jam dinas, malam hari bahkan mengecek langsung kondisi masyarakat dan titik banjir untuk dicari solusi terbaik.

Sosok Ratu Dewa, kini makin populer, bahkan menjadi salah satu harapan masyarakat tentang layanan publik hingga sederet kebijakan yang pro masyarakat.

Sosok sederhana Ratu Dewa bahkan tidak sedikit mewakili sejumlah masyarakat yang mengharapkan tokoh politik yang tidak hanya sekedar membangun, namun juga melayani.

Selain itu, latar belakang Ratu Dewa sebagai anak petani dan guru menjadi daya tarik tersendiri terhadap sosok pemimpin yang berasal dari kalangan bawah. ●IRY

BIODATA

Nama : Ratu Dewa
Tempat Tanggal Lahir : Ogan Ilir, 17 Agustus 1969
Anak ke : 8 dari 9 saudara
Agama : Islam
Olahraga favorit : Bulu Tangkis
Orang Tua
Ayah : Cik Den Tambun
Ibu : Zalipah
Istri : Dewi Sastrani (Guru SMA Negeri 2)
Asal daerah : Desa Rantau Sialang, Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumsel

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar di Rantau Sialang
- SMP Gaja Mada Palembang
- SMA Gajah Mada, Palembang
- S1 UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ushuluddin
- S2 Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik.

KARIR

- PNS di Dinas Penerangan Sumsel dengan pangkat Golongan 3B sebagai staf khusus Kakanwil
- Kasi Rencana Operasional Penerangan hingga Dinas Penerangan
- Sekretariat Provinsi, sebagai staf khusus pimpinan TU di era Gubernur Rosihan Arsyad
- Kabag dan Kasubag Humas Pemprov Sumsel
- Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel
- Kabag Humas dan Protokol
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palembang
- Kepala BKPSM Palembang
- Sekda Kota Palembang
- PJ Wali Kota Palembang

Teddy Meilwansyah

SOSOK BIROKRAT BERSAHAJA

Teddy Meilwansyah dilantik Menteri Dalam Negeri Tito sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), setelah sebelumnya Plh Bupati OKU menjadi Penjabat (Pj) Bupati OKU.

Tidak sedikit masyarakat yang mendorongnya untuk menjadi next generation kepala daerah di OKU, hal itu terlihat dari sejumlah survei terhadapnya yang masih berada di papan atas.

Teddy Meilwansyah adalah lulusan STPDN, sebelumnya ia berkiprah cukup lama sebagai Kepala Biro Humas Pemprov Sumsel.

Pada 21 Juni 2018 Teddy Meilwan-

Sumsel dengan menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sederet jabatan penting di birokrasi membuatnya diberikan amanah lebih mengisi jabatan strategis, puncaknya 09 Maret 2022 dipercayakan menjadi Pelaksana Harian atau Plh Bupati Ogan Komering Ulu.

Berkat amanah yang diberikan

pada 23 Juni 2022

Meski cukup familiar sebagai pejabat di OKU, namun sebagai abdi negara, Teddy Meilwansyah mengawali tugas di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan kini sangat akrab dengan masyarakat di OKU.

Menjadi Pj Bupati OKU

Alumni, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1999 juga dinilai layak untuk maju pada Pilkada serentak November 2024 mendatang.

Beberapa lembaga survei kredibel mengeluarkan hasil surveinya dan mengunggulkan elektabilitas Teddy Meilwansyah.

Survei terbaru Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) juga menempatkan (elektabilitas) Teddy Meilwansyah masih konsisten berada di urutan teratas.

Tak hanya unggul bahkan secara statistik lebih menonjol signifikan dari kompetitornya, sejumlah pihak bahkan menilai bahwa Pilkada di OKU akan berlangsung dua pasang calon atau melawan kotak kosong.

Teddy Meilwansyah juga dinilai berhasil memperlebar jarak elektabilitas antara k o m -



syah ia dilantik Gubernur Sumsel saat itu Alex Noerdin menjadi Penjabat Bupati Muara Enim.

Dari Penjabat Bupati Muara Enim, Teddy Meilwansyah pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten OKU dan saat itu ia membuktikan kualitasnya hingga April 2019 dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU.

Sebelumnya, Teddy Meilwansyah SSTP MM pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU.

Lalu 11 Februari 2022 Teddy kembali ke lingkungan Pemerintah Provinsi

dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, kemudian dirinya resmi menjadi Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu



petitor karena kemampuannya di bidang birokrasi.

Kuatnya dukungan elektoral Teddy Meilwansyah bukan serta merta muncul begitu saja, lembaga survey melihat tingkat kepuasan terhadap kinerja Teddy Meilwansyah selama menjadi Pj dinilai positif.

Bahkan salah satu lembaga survey mencatat responden masyarakat sangat puas 8,5 persen, puas 69,3 persen, dan tidak puas 9,5 persen, tidak puas sama sekali 0,3 persen.

Sederet partai dikabarkan akan menggandeng Teddy, seperti Gerindra, Nasdem, PDI-P, Golkar, PKS, Demokrat, PKB, PBB, Hanura, PPP, meski harus melihat dinamika politik ke depan.

Faktor Teddy Meilwansyah seorang birokrat membuat sangat kecil sekali resistensi pemilih yang memperlakukan Teddy Meilwansyah dibandingkan calon lainnya.

Meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Serentak, Teddy Meilwansyah sendiri menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah memberikan layanan terbaik untuk masyarakat OKU.

Ia mengaku belum secara resmi mengumumkan keikutsertaannya dalam Pilkada meski dukungan dari masyarakat dan semangat untuk mem-



bawa OKU menjadi yang terdepan tetap menjadi prioritasnya.

"Kerja lembaga survei itu ilmiah, penilaian itu merupakan semangat bagi



Dengan rasa bangga dan gembira, tentunya kami sangat berharap dan mendambakan agar pak Teddy bisa memimpin OKU kembali pada periode mendatang

jajaran pemda untuk berbuat lebih baik lagi di masyarakat," kata Teddy.

Ia mengatakan belum sama sekali berbicara masalah pilkada dan pada saatnya nanti baru akan bicara, hanya saja, tekad untuk membawa OKU terdepan merupakan mimpinya.

"Tentu dukungan dari masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut," katanya.

Dukungan moral kepada Teddy untuk maju Pilbup 2024 terus mengalir, kali ini datang dari masyarakat Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU.

Tokoh masyarakat Desa Muarasaeh Kecamatan Muara Jaya, Yuzarmi ikut mendoakan Teddy bisa kembali melanjutkan pengabdian di OKU sebagai Bupati pilihan masyarakat.

"Dengan rasa bangga dan gembira, tentunya kami sangat berharap dan mendambakan agar pak Teddy bisa memimpin OKU kembali pada periode mendatang," ungkapnya. • IRY

BIODATA

Nama : H. Teddy Meilwansyah, S.STP, M.M, M.Pd
Tempat tanggal lahir : Palembang, 2 Mei 1977
Istri : Hj. Zwesty Karenia Teddy

PENDIDIKAN

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) angkatan 1999

KARIR

- Penjabat Bupati Muara Enim 2018
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU 2019
- Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
- Pelaksana Harian atau Plh Bupati Ogan Komering Ulu
- Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu pada 23 Juni 2022

SILSILAH KELUARGA

Teddy merupakan putra pertama dari mantan Sekda OKU Drs H Suprijadi Djazid dan juga anak menantu Bupati OKU Drs H Kuryana Azis.

Ayah mertuanya Kuryana Azis wafat saat masih aktif menjabat sebagai Bupati OKU pada 8 Maret 2021.

Lury Elza

SIAP LANJUTKAN PROGRAM ALEX NOERDIN

Nama mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin kini menggema lagi. Setelah sempat redup akibat tersandung kasus korupsi kini diangkat kembali oleh putri bungsunya Lury Elza Alex Noerdin.

Adikandung Dodi Reza Alex mantan Bupati Musi Banyuasin itu, kini menjadi Caleg terpilih Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumsel VI yang meliputi daerah Muara Enim, PALI dan Prabumulih.

Sebagai tokoh lama di partai berlamang pohon beringin, Lury Elza berhasil mendulang suara pribadi 22.058, ia menggungguli caleg Golkar Dapil lainnya.

Adapun perolehan suara Partai Golkar di Sumsel 749.718 suara dan menempatkan 12 kursi di DPRD Provinsi Sumsel yang salah satunya akan diduduki Lury Elza Alex Noerdin.

Lury juga akrab dengan pengusaha yang berasal dari berbagai UMKM. Ia dengan mudahnya mendukung berbagai produk usaha seperti songket, hijab dan masih banyak lagi.

"Saya belajar berbisnis juga secara otodidak dan banyak melihat dari kisah hidup orang-orang yang sukses," perempuan kelahiran 2 Mei ini membeberkan.

Selain sibuk memberi inspirasi sebagai influencer, Lury juga eksis dengan sejumlah bisnis yang dimilikinya. Ia diketahui memiliki bisnis di sektor properti, gas, SPBU, kostel, kantor notaris dan kafe.

"Yang paling lama digeluti itu bisnis SPBU, saya memulainya dari 1987," kata Lury.

Terjun ke dunia politik bukan hal baru bagi Lury Elza. Selain memiliki seorang ayah yang birokrat dan politikus, kakaknya juga adalah seorang politikus. Lury juga sudah dikader menjadi politikus.

Terbukti semasa kepemimpinan ayahnya Alex Noerdin, Lury Elza sudah menjadi pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel.

Walaupun latar belakang pendidi-

kannya adalah seorang notaris dan pebisnis, namun tak menyurutkan kepiawaiannya dalam berpolitik.

Lury Elza bahkan pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon (balon) Wali Kota Palembang jalur Golkar di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Palembang, Jalan Aerobik POM IX, tahun 2018 lalu.

Meski ayahnya Ketua DPD Partai Golkar Sumsel saat itu, Lury tak serta merta maju sebagai calon walikota Palembang. Ia tetap mengikuti mekanisme partai dalam men-

garing bakal calon walikota. Untuk Pemilu 2024 ini, ibu dua putra kembar itu mendapat ta-

waran dari K e t u a

DPD Partai Golkar Sumsel, Bobby Adhityo Rizaldi. Untuk menjadi Caleg.

"Sebenarnya dari awal tidak terbersit untuk menjadi caleg, karena hanya ingin fokus ke profesi sebagai notaris. Tapi sebelumnya, mas Bobby (Ketua DPD Partai Golkar Sumsel) bertanya ke saya, apa tidak ingin maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini. Karena tidak ada trah Alex Noerdin yang melanjutkan," ujar dia.

Terhadap tawaran dari pertanyaan itu, awalnya Lury menilai hanya tawaran biasa saja, tetapi tetap saja menjadi sebuah pemikiran tersendiri bagi dia. Apalagi, sang ayah yakni Alex Noerdin juga telah menyerahkan semua kepadanya, soal keputusan untuk berpolitik.

Tapi memang, sebelum menjadi caleg, saat saya turun ke daerah-daerah dan bila bicara tentang program, warga tetap berani ngomong bahwa program Pak Alex Noerdin yang paling konkret," kata Lury yang juga berprofesi sebagai influencer.

Ia memiliki 95,5 ribu pengikut di laman Instagram miliknya.

Selanjutnya, setelah yakin untuk maju sebagai caleg, dia di hadapkan pada daerah pemilihan (dapil) Sumsel VI Muara Enim, PALI dan Prabumulih.

Dapil yang belum pernah sama sekali dijangkauannya. Bu-



kan dari dapil Palembang, Musi Banyuasin (Muba) atau Lahat, yang sudah biasa disinggahnya.

Diterangkan Lury, setelah dirinya resmi menjabat anggota DPRD Sumsel, pastinya banyak yang akan ia perjuangkan untuk masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan.

"Saya ingin pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata di tiap Dapil saya. Sebab, ada di salah satu Dapil saya yang mereka tidak punya SMA, sehingga untuk sekolah SMA harus ke Prabumulih. Ini yang akan saya perjuangkan di bangku legislatif," papar istri dari Fatra Radezayansyah ini.

Nah, untuk lebih memudahkan perjuangan itu, Lury berharap nantinya berada di komisi yang membidangnya yaitu komisi V.

"Ya Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali kepada kepercayaan masyarakat dari dapil Sumsel enam yang telah sama-sama berjuang dan bersinergi bersama," kata Lury yang memiliki banyak bisnis. Antara lain PT Musi Sentra Energi, PT Beringin Gemilang Utama (SPBU Jl Merdeka) dan PT Lea Derma Indonesia.

Lury Elza berjanji akan meneruskan dan berfokus kepada dunia pendidikan dan kesehatan seperti yang pernah di jalankan oleh sang Ayah Alex Noerdin saat menjabat sebagai Gubernur Sumsel 2 Periode.

Ibu dari 2 orang putra yang terlahir kembar ini mengungkapkan, bahwa keputusan dirinya terjun ke dunia politik sebenarnya tidak lepas dari peran serta dan terinspirasi dari sosok sang Ayah Alex Noerdin saat memimpin Provinsi Sumsel, dari situlah dirinya merasa terpanggil dan ingin meneruskan prestasi serta melanjutkan kebaikan Ayahnya.

Selain terinspirasi alasan lain Lury terjun ke dunia politik adalah untuk me-

neruskan kepemimpinan sang ayah, menurut dirinya mungkin masyarakat Sumsel masih sangat ingat dengan sosok Alex Noerdin.

"Dimana saat memimpin Sumsel ayah saya Sukses dan bisa dibilang berhasil membuat masyarakat Sumsel merasakan program-program yang beliau kerjakan selama memimpin diantaranya program Pendidikan Gratis, Berobat Gratis, serta pembangunan infrastruktur yang bisa dibilang hampir merata," terangnya.

Dari situlah berawal saya berkeinginan untuk terjun ke dunia politik dan serta mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menyemangati tentang pencalonan saya untuk terjun ke dunia politik, bahkan ada yang bilang keturunan pemimpin jangan hilang kalau bisa ada penerus (Trah) Alex Noerdin.

"Saya mungkin belum bisa mengikuti jejak ayah saya, apalagi saya perempuan tapi setidaknya saya berjanji untuk 3 Dapil VI wilayah saya InsyaAllah saya akan berbuat semaksimal mungkin dan memperjuangkan aspirasi Masyarakat," terang wanita cantik ini.

Terkait isu pemberitaan yang menyebut dirinya akan mengikuti kontestasi sebagai kepala Daerah, dirinya tidak menyangkal.



BIODATA

Nama : Lury Elza Alex Noerdin
Tanggal Lahir : 2 Mei
Suami : Fatra Radezayansyah
Anak 2 : Mus
: Zul

BISNIS

- UMKM, songket, hijab
- Influencer
- Properti
- Gas
- SPBU
- Kostel
- Kantor notaris
- Kafe

"Saya tidak menyangkal dan mengiyakan karena menurut saya politik itu sifatnya cair, namun saat ini kan baru selesai Pileg dan Pilkada masih lama, yang pasti kita lihat saja nanti, yang pasti saat saya mengikuti kontestasi Pileg kemarin sebenarnya adalah untuk pengabdian makanya saat duduk di DPRD Sumsel nanti tujuannya adalah untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat, makanya saya berharap bisa duduk di komisi V yang menaungi bidang pendidikan dan kesehatan," terang ibu dua anak ini.

Lury menjelaskan untuk urusan Pilkada lihat nanti, dia menyebut Alex Noerdin tahu terkait isu di Sumsel ini, namun untuk mengikuti Pilkada belum ada tanggapan, yang pasti biarlah berjalan dengan sendirinya. •IRY



Charma Aprianto AKTIVIS YANG GENCARKAN PROGRAM PRO RAKYAT

Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang 2024 masih hangat diisi dengan nama-nama lama yang bertengger dengan elektabilitas belum tergoyahkan.

Sosok Charma Aprianto ikut ramai diperbincangkan karena tekadnya maju sebagai Calon Wali Kota (Cawako) Palembang 2024 melalui jalur independen.

Terbukti pria yang juga merupakan ketua Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesia yang berfokus pada kegiatan sosial ini, menggandeng Calon Wakil Wali Kota (Cawako) Palembang Nopembriano, Charma sangat serius untuk memperebutkan Kursi nomor satu di kota Pempek tersebut.

Dilihat dari banyaknya poster dan baliho yang bertebaran di setiap sudut kota Palembang-

bang, baik yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar, kesempatan untuk merebut hati masyarakat kota Palembang terus digalakkan seperti pemaparan beberapa program yang pro rakyat.

Charma merupakan pria kelahiran

Chanayang Mandiri Indonesia, Direktur Utama CV. Ocen Bersaudara serta Ketua Umum Gencar Indonesia, dan dorongan hati serta dukungan mayoritas dari masyarakat kalangan menengah kebawah serta dukungan para aktivis di Sumatera Selatan. Sosok



Palembang, 5 April 1975, Suami dari Andini Agustina ini telah dikarunia 5 anak.

Tujuannya mencalonkan diri Walikota Palembang ialah untuk giat peduli sosial dengan memiliki motto #BESAMO SAMO KITO PACAK (Bersama-sama kita bisa,red) dengan menjual program kepada masyarakat Kota Palembang.

Sebagai Komisaris PT. Sumsel Energi Rimau (BUMD),
Direktur Utama
C V

Charma Afrianto bertekad memimpin Kota Palembang 5 (lima) tahun kedepan.

Charma mengaku akan fokus untuk meningkatkan UMKM, kesejahteraan guru, marbot masjid, gaji RT akan dinaikan menjadi Rp2 juta per bulan dengan kebijakan pro rakyat.

"Ini bukan hanya angan-angan karena semua bisa dilakukan dan direalisasikan, dari anggaran PAD saja sudah bisa kita serap anggarannya, pasti yang tidak kalah penting memperbaiki mental ASN di kota Palembang harus dirubah karena semua terkesan pencitraan," tegasnya.

Terkait program pro rakyat, belum lama ini dirinya bersama Cawako Palembang Nopembriano launching Program Pangan Murah untuk Rakyat yang diperuntukan bagi masyarakat

kota Palembang yang penghasilannya dibawah rata-rata dan diperuntukan kepada masyarakat menengah ke bawah.

"InshaAllah kita akan sebar beras murah tersebut sebanyak 10 Ton/Hari dan tentunya perbedaan harganya dibawah harga pasar, dengan perbedaan harga sampai Rp4 ribuan/Kg, masyarakat tetap bisa mendapatkan beras yang layak untuk dikonsumsi dan produk kita nanti tentunya mampu bersaing dengan beras yang harganya Rp16-17 Ribu/Kg yang dijual di pasaran," urai Pria ramah ini.

terkait pendistribusian bisa ikut dan mendapatkan beras murah tersebut dengan meluncurkan aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat.

pasar murah di 18 Kecamatan, sampai bulan November nanti ketika Ca-Boy dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih," jelas Suami dari Andini politisi partai Golkar ini.

Program-program yang sudah dirumuskan tentunya sudah melalui kajian, karena diakui Charma, dirinya sering turun ke lapangan untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan dan harapan Masyarakat kota Palembang.

"Ca-Boy adalah Rakyat dan program kami adalah program pro rakyat, Program Pangan Murah Untuk Rakyat yang akan kita sebar di 107 Kelurahan, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin kota, semoga Ca-Boy diterima ditengah



Agar bisa mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat secara online dan akan dilaksanakan secara acak di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang.

"Program Pangan Murah Untuk Rakyat, merupakan program andalan kami tentunya, sistem pembagiannya akan melibatkan Ketua Tim Kecamatan yang sudah kita bentuk dan akan didistribusikan secara bertahap, target kami 10 Ton/hari dan akan melaunching

masyarakat kota Palembang dan bermanfaat untuk rakyat miskin kota, kami akan membangun efektivitas tim dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan menunjuk tim untuk menjalankan program agar pendistribusian tepat sasaran," terangnya.

Tentunya niatan yang baik ini tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat, seperti keluarga, istri, rekan seperjuangan dan masyarakat

BIODATA

Nama : CharmaAprianto
Tempat Tgl Lahir : Palembang, 5 April 1975
Istri : Andini Agustina
Anak : 5
Agama : Islam
Pekerjaan : Aktivis dan Pengusaha

KARIR

- Ketua Umum Gencar Indonesia
- Komisaris PT. Sumsel Energi Rimau (BUMD)
- Direktur Utama CV Chanayang Mandiri Indonesia
- Direktur Utama CV. Ocen Bersaudara

kota Palembang, banyak yang harus dibenahi di kota Palembang ini diantaranya terbengkalainya Pasar Cinde dan Pasar 16 lir yang merupakan icon kota Palembang.

"Sampai saat ini kedua pasar tersebut mangkrak pembangunannya, berapa banyak pedagang yang menjerit karena lahan mereka mencari nafkah dirampas akibat kebijakan pemerintah yang terkesan bekerja asal-asalan dan tidak pro rakyat," katanya.

"Ini yang menjadi salah satu perhatian kami, kota Palembang ini dahulunya adalah kota niaga bahkan hingga saat ini, karena kota Palembang tidak memiliki lahan yang luas untuk bisa digunakan masyarakat berkebun dan bertani, tidak memiliki hasil bumi seperti Batu bara dan minyak seperti daerah lain, makanya masyarakat nya mayoritas bisnis/dagang," sambungnya.

Tentunya mengurangi angka pengangguran yang saat ini masih diatas 9 persen, dan masyarakat miskin kota masih diangka 10 persen, ini harus menjadi perhatian serius.

"Ca-Boy adalah Rakyat jika masyarakat menginginkan perubahan maka dukung kami, agar kita bisa memecahkan permasalahan yang selama ini tidak pernah terselesaikan, melalui program pro rakyat kami yakin bisa memberikan dampak positif untuk kota Palembang, kami tidak haus dengan jabatan, ini semata untuk rakyat," tutupnya. •IRY



PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, AKAR MASALAH SULBAR

Mantan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2017-2022, Ali Baal Masdar, secara resmi mengumumkan niatnya untuk kembali berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2024.

Pria yang akrab disapa ABM ini mengaku mendapat banyak dukungan dari masyarakat sehingga termotivasi untuk kembali maju. Terlebih, berdasarkan hasil survei namanya masih tertinggi dibandingkan kandidat lainnya.

"Dalam beberapa waktu terakhir, saya telah berkeliling menyapa warga di berbagai kabupaten di Sulbar dan saya sangat gembira melihat dukungan besar dari mereka untuk saya kembali maju dalam Pilgub untuk periode kedua," ungkap ABM.

Dijelaskan ABM, dalam tiga kali rilis survei Bacagub, namanya masih menduduki peringkat tertinggi dengan persentase mencapai 45 %.

"Nama saya masih menduduki peringkat tertinggi dengan persentase hingga mencapai 45%, dan para calon lain juga mengetahui hasil survei ini," jelasnya.

ABM menambahkan dirinya berencana maju melalui partai Gerindra. Kendati begitu, dia

nya di Pilgub Sulbar. Ia mengaku akan memilih figur yang surveinya juga tinggi

Di sisi lain, ABM menuturkan sudah bersepakat dengan adiknya yang juga mantan Bupati Polewali Mandar (Polman) Andi Ibrahim Masdar terkait siapa yang akan maju Pilgub Sulbar dengan melihat elektabilitas survei tertinggi.

"Siapa yang bagus surveinya. Nda (tidak) mungkin berdua maju nda mungkin. Dia sudah sepakat, saya juga sepakat," ucapnya.

Untuk diketahui, ABM menjabat gubernur Sulbar periode 2017-2022.

Selanjutnya Sulbar dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik selama 2022-2023 sebelum diganti Pj Gubernur berikutnya Zudan Arif Fakrullah.

Akademisi dan Pemerhati Sosial Politik Unifa Makassar, Muhammad Asdar menjelaskan, bacagub Sulbar dipastikan akan diisi dengan wajah-wajah lama. Namun, tiak menutup kemungkinan figur baru akan ikut ambil bagian.

"Mencuat sepuluh nama yang ramai menjadi perbincangan di media sosial yang menjadi kandidat kuat untuk Bacagub Sulbar 2024," Katanya.

Sepuluh nama yang dimaksud yakni incumbent Ali Baal Masdar, Enny Anggraeni Anwar, Prof Husain Syam, KH Syibli Sahabuddin, Kalma Katta, Suhardi Duka, Aras Tammauni, Agus Ambo Djiwa, Salim S Mengga serta H Hendra Singkaru.

Dari sepuluh nama tersebut bisa dilihat dari potensi ketokohan (elite), modal sosial, kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

Seperti ABM sebagai incumbent tentunya sudah memiliki pengalaman dan ketokohan politik yang mengakar,

masih memantau perkembangan hasil Pemilu dan berharap Gerindra bisa meraup kursi penuh di DPRD Sulbar.

"Tentu saya Gerindra, mudah-mudahan provinsi juga bisa masuk 10 persen ya, urutan ketiga atau kedua, kalau bisa pertama Gerindra," katanya.

Selain itu, ABM memaparkan dirinya tidak akan tergesa-gesa memilih figur yang akan menjadi pasangan-



struktur dan tim sukses yang lengkap.

"ABM sudah memiliki pengalaman dan ketokohan politik yang mengakar, struktur dan memiliki tim sukses yang lengkap dan solid," jelasnya.

Masih banyak figur potensial baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur yang belum disebutkan semisal figur muda yang beririsan langsung dengan figur yang tersebut namanya diatas seperti Andi Ibrahim Masdar (AIM), Andi Prayoga Putra Singkaru, Asri



Anas. "Melihat komposisi dari beberapa figur yang mencuat, saya melihat kekuatan para calon dapat dianalisis dari kekuatan/ ketokohan, parpol, dan isu politik strategis yang dimainkan," bebernya..

Hampir dipastikan bahwa kesepuluh figur memiliki kekuatan sendiri-sendiri, bahkan menjadi figur sentral yang diukur dari tingkat elektabilitas hasil beberapa kelompok survei.



Tentu saya Gerindra, mudah-mudahan provinsi juga bisa masuk 10 persen ya, urutan ketiga atau kedua, kalau bisa pertama Gerindra.

Mereka cukup lama menduduki jabatan dan profesi masing-masing dan sering memberi advise, sumbangan ide dan pemikiran pada ruang dialog dan pengembangan propinsi Sulbar.

"Selain diuntungkan oleh kelompok, organisasi, dan irisan partai politik. Mereka juga diuntungkan oleh kekuatan media yang sering dimunculkan sehingga tingkat keterpilihan pada kekuatan besar kelompok milenial atau gen Z yang menguasai platform digital sering mengikuti melalui jejak digital sang figur," jelasnya.

Salah satu fak-

erti isu resources. Perhitungan penggerak birokrasi masih akut dalam keterbatasan SDM di Sulbar sejak 15 tahun terakhir.

Isu Lintas Kelompok sejak berdiri dan memisahkan diri dari induknya Sulsel, kelompok pemrakarsa pendirian Sulbar hampir semua termaginalkan dan tergantung oleh pihak yang "tidak berkeringat" sehingga dapat menimbulkan perpecahan karena ketidakpuasan akhirnya menuju dis-integrasi.

Isu pemerataan akses pendidikan



tor pendukung adalah kekuatan partai politik. Hampir semua calon figur adalah ketua-ketua partai sehingga popularitas ditopang oleh jabatan prestisius sebagai ketua.

Beberapa figur juga memanfaatkan akses langsung kepada tokoh penyokong parpol pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Isu dan pesan politik melalui konten yang dikelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi politik dalam memenangkan pilgub 2024 mendatang.

Setidaknya ada 3 dikotomi isu yang harus dimainkan oleh setiap figur sep-

dan kesehatan. Terobosan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat propinsi Sulbar.

Isu ini menjadi strategis bila figur mampu menghadirkan solusi dan pemecahan akar masalahnya pemerataan dan akses terutama menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.

"Ini mampu menjadi solusi dan pemecahan akar masalah pemerataan dan akses terutama menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai," pungkasnya.

• IRY

ZUL-ROHMI AKAN “BERCERAI” DI PILGUB NTB

Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024, kabar Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah akan berpisah terus mencuat.

Menyusul pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Perindo NTB M Samsul Qomar bahwa Perindo akan mengusung eks Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalilah sebagai Calon Gubernur (Cagub) pada Pilgub NTB 2024.

DPW Partai Perindo NTB telah menunjukkan niatnya untuk mencalonkan Sitti Rohmi Djalilah sebagai cagub dalam Pilgub NTB tahun 2024. Langkah ini didasarkan pada dukungan dari kader partai tersebut.

Wakil Ketua DPW Perindo NTB, Syamsul Qomar menyatakan, bahwa Rohmi telah berhasil mendampingi Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah.

“Di internal partai, kami merasakan dukungan yang kuat terhadap Rohmi sebagai calon gubernur NTB berikutnya,” ungkapnya belum lama ini.

Qomar juga telah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh politik di NTB untuk mendapatkan dukungan bagi Rohmi, antara lain adalah eks Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, dan mantan Bupati Lombok Tengah, Suhaili.

Meskipun Rohmi sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dukungan dari Perindo untuk maju dalam Pilgub NTB 2024, namun pada bulan Mei sebelumnya, dia menyampaikan senyuman saat ditanya tentang peluangnya sebagai cagub.

Sebelumnya, beberapa

nama juga telah disebut-sebut akan ikut bertarung dalam Pilgub NTB 2024, seperti Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, serta Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.

Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Daerah NTB tersebut.

Meskipun begitu, Rohmi menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Selain tersenyum, Rohmi hanya meminta doa terbaik untuk dirinya.

“Di harapkan

doa yang baik-baik,” ucap Rohmi.

Rohmi mengungkapkan bahwa saat ini ia akan fokus untuk memenangkan Partai Perindo di NTB. Dengan sumber daya yang tersedia, Rohmi yakin bahwa partainya memiliki potensi untuk menjadi pemenang di NTB.

“Kita harus berupaya untuk menjadi yang terbaik. Sebelum pemilihan, kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki rencana di atas kertas. Partai Perindo memiliki basis yang kuat di NTB. Yang penting adalah kita tidak boleh lengah,” ungkap mantan



ketua DPW NasDem NTB tersebut.

Rohmi menegaskan pentingnya solidaritas di antara semua bacaleg di daerah pemilihan masing-masing. Bacaleg Partai Perindo, katanya, tidak boleh menganggap rekan sesama bacaleg sebagai lawan, tetapi sebagai sekutu dalam perjuangan bersama.

Ia menekankan perlunya kesatuan visi dan fokus perjuangan di antara ba-



Di internal partai, kami merasakan dukungan yang kuat terhadap Rohmi sebagai calon gubernur NTB berikutnya.

caleg Partai Perindo.

"Yang harus ditekankan adalah bagaimana kita dapat bersatu di dalam partai sehingga bacaleg di satu daerah pemilihan tidak saling bersaing, tetapi tetap waspada terhadap lawan dari partai lain. Energi kita harus difokuskan untuk mengalahkan bacaleg dari partai sendiri di daerah pemilihan masing-masing," tegas Rohmi.

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan tanggapannya terhadap usulan dari Partai Perindo yang mendukung Sitti Rohmi Djalillah sebagai cagub dalam Pilgub NTB 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB, Yek Agil, menilai dukungan terhadap Rohmi tersebut hanyalah sebagai aspirasi semata.

"Kami tidak merespons secara personal. Itu hanya pendapat individu saja. Kecuali jika pimpinannya (Ketua DPW Perindo NTB Khairul Rizal)

yang berbicara, maka kami akan merespons," ujar Yek Agil.

Seperti yang diketahui, Rohmi merupakan mantan wakil gubernur NTB yang mendampingi kader PKS, Zulkieflimansyah, selama masa jabatan gubernur NTB periode 2018-2023. Masa jabatan Zul-Rohmi berakhir pada 19 September 2023 lalu.

Yek Agil menegaskan bahwa PKS telah sepakat untuk kembali mengung-
g Zul dalam Pilgub NTB 2024.

Ketika ditanya tentang calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Zul, ia menyatakan bahwa partainya akan mengambil keputusan secara realistis. Termasuk kemungkinan Zul kembali berpasangan dengan Rohmi.

"Politik itu dinamis.

Kami akan berpasangan dengan siapa pun yang diyakini bisa menang. Jika publik mendukung pasangan dengan I b u Rohmi,

kami akan mendukungnya. Jika publik lebih condong pada pilihan lain yang memungkinkan kami menang, kami akan realistis," jelasnya.

Yek Agil menjelaskan Pilgub NTB 2024 masih sangat dinamis. Pihaknya akan mencari pasangan Dr Zul sebagai calon wakil gubernur NTB yang berpotensi menang.

Begitu juga mengenai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Zul - Rohmi jilid II masih dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Apabila masyarakat masih menginginkan Zul - Rohmi jilid II, maka itu akan dilakukan.

"Kalau sebagian besar publik menghendaki Dr Zul berpasangan dengan yang lain, kita akan realistis. Sekali lagi kalau itu keinginan publik, kita akan dengar," ucapnya.

Dia juga menyatakan bahwa PKS masih menunggu hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Menurutnya, hasil pileg akan menjadi salah satu pertimbangan bagi partai dalam menghadapi Pilgub NTB 2024.

"Karena hasil pileg akan menjadi salah satu pertimbangan bagi partai mereka dalam menghadapi Pilgub NTB 2024," tegasnya. • IRY



BAWA VISI KEMAJUAN GORONTALO

Elektabilitas Wali Kota Gorontalo, Marten Taha nampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi sebagai kandidat Calon Gubernur (Cagub) Gorontalo 2024. Di beberapa kalangan, termasuk di luar daerah seperti Sulawesi Utara.

Marten Taha, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, dianggap memiliki kemampuan sebagai pemimpin yang luar biasa, bukan hanya saat ini, tetapi bahkan sejak masa pendidikannya, dia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa.

Marten Taha, telah menerima surat perintah pencalonannya sebagai Gubernur Gorontalo dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Dalam surat perintah tersebut, Marten dipilih sebagai calon Gubernur melalui proses penjurian internal Partai Golkar.

Ini menegaskan bahwa Marten, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, telah diterima sebagai kandidat yang direkomendasikan oleh partai untuk bertarung

pada Pilkada 2024 mendatang.

Marten menjelaskan bahwa proses pencalonannya melibatkan pengusulan dari DPD Partai Golkar Gorontalo.

"Hasil keputusan dari partai secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga DPD I dan II melalui Rakerda dan Musda, nama saya diusulkan sebagai salah satu kandidat untuk dicalonkan sebagai Gubernur Gorontalo," ujar Marten, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, hasil keputusan tersebut diusulkan ke DPP Partai Golkar un-

tuk menentukan kesesuaian dengan keinginan partai.

"Keputusan akhir ada di tangan DPP, sedangkan di daerah hanya melakukan pengusulan," tambahnya.

Nama-nama yang diusulkan oleh DPD Golkar Gorontalo dipanggil oleh pihak DPP. Marten termasuk salah satu dari empat kandidat yang diusulkan.

"Kemarin, kami dipanggil oleh DPP, dan kami telah menerima surat perintah tugas (Sprint) itu," ungkapnya.

Marten siap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh DPP Golkar. Tugas tersebut meliputi mensukseskan Pileg dan Pilpres 2024 yang didukung oleh Partai Golkar serta melakukan sosialisasi diri ke masyarakat Gorontalo dan bertemu dengan para konstituen.

"Tugas-tugas ini pasti akan dievaluasi oleh DPP, dan tim akan diturunkan untuk memantau pelaksanaannya serta meningkatkan elektabilitas para calon," jelasnya.

Marten menganggap surat perintah tersebut sebagai tiket menuju posisi Gubernur Gorontalo. Namun, ia menyadari bahwa masih ada langkah-langkah yang harus dijalani sebelum benar-benar menjadi calon Gubernur.

"Ini hanya sebuah tiket, yang belum bisa digunakan tanpa boarding pass," kata Marten dengan canda.

Dengan menerima surat perintah tersebut, Marten melewati titik aman kedua dalam proses pencalonan. Titik aman pertama adalah ketika namanya diusulkan oleh DPD Golkar Gorontalo sebagai calon Gubernur Gorontalo.

"Katakanlah ini sudah di t i -

tik aman kedua, masih ada tahapan berikutnya sebelum saya benar-benar dicalonkan sebagai Gubernur Gorontalo,” tambahnya.

Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, yang juga merupakan sahabat dekat Marten Taha sejak masa muda mengakui bahwa Marten Taha adalah sosok calon pemimpin yang sangat mumpuni untuk Pilgub Gorontalo 2024.

Marten Taha, kata Elly, diyakini mampu membawa banyak perubahan untuk Gorontalo.

bisa terwujud.

“Saya memberikan dukungan penuh dan doa-doakan agar Kak Marten dapat menjadi calon gubernur. Sema- ga di masa depan, kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut, dengan melakukan kolaborasi yang lebih mendalam, dan kemudian mengajukannya bersama,” tandasnya.

Elly Lasut mengatakan bahwa perkembangan Kota Gorontalo sendiri, di bawah kepemimpinan Marten Taha terus mengalami perkembangan yang pesat.

periode, tanpa putus.

Dia menjabat Anggota DPRD sejak Gorontalo masih bergabung dengan Sulawesi Utara. Empat periode di Provinsi Sulut dan 3 periode di Gorontalo ditambah 2 periode sebagai wali kota.

Sebelum terjun ke dunia politik, Marten Taha atau akrab dengan sapaan MT berkarir di perusahaan Swasta pada medio 1982 - 1987. Kemudian menjadi direktur utama di PT Olah Karya Pratama pada 1987 - 1997.

Pada tahun 1987 itu pula Marten



Elly Lasut juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan Marten Taha selama dua periode telah membuktikan kehebatannya sebagai seorang pemimpin, dengan banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh Kota Gorontalo saat ini.

Dengan demikian, menurutnya, tidak ada keraguan lagi bahwa Marten Taha adalah calon yang tepat untuk menjadi Gubernur Gorontalo, sehingga visi kemajuan Gorontalo dalam lima tahun mendatang



“Tentu saja, perkembangan Kota Gorontalo yang kian pesat ini, pasti merupakan hasil dari kerja-kerja dari pak Marten Taha, yang memiliki nilai sempurna untuk kepemimpinannya”, ungkap Elly Lasut.

Dirinya pun menyebut, jika Wali Kota Marten Taha layak untuk maju sebagai calon Gubernur Gorontalo pada Pilkada mendatang.

Nama lengkap Marten Agus Taha lahir 29 Agustus 1959, berkarir politik sejak 1987. Karier politiknya sempurna karena menjabat anggota DPRD sebanyak 7

Taha mulai terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara selama 4 periode, terhitung dari 1987 - 2001.

Kemudian Marten Taha menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2 periode dimulai tahun 2001-2009. Pada tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2009-2014. Sebelum akhirnya menjabat menjadi Wali Kota Gorontalo dimulai dari tahun 2014 sampai saat ini.

Marten Taha menjadi Walikota Gorontalo selama dua periode, dengan dua pasangan yang

berbeda. Periode pertama berpasangan dengan Charles Budi Doku, kemudian periode kedua bersama Ryan F Kono. •IRY

TARGET PAN MENANGKAN DESY RATNASARI

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Desy Ratnasari telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2024.

Dia mengungkapkan bahwa telah diberikan mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik sebagai Calon Gubernur (Cagub) maupun Calon Wakil Gubernur (Cawagub).

"Sebagai Ketua Umum DPP PAN, saya telah diberikan mandat untuk turut serta dalam Pilkada, baik sebagai Cagub maupun Cawagub Jabar," kata Desy Ratnasari.

Desy Ratnasari, yang dikenal sebagai pelantun lagu "Tenda Biru", menyatakan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan mendampingi sebagai calon gubernur atau wakil gubernur sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

"Kesimpulannya, saya akan mengikuti arahan dari pusat, terkait dengan pasangan politik saya. Hal ini sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum kami, Zulkifli Hasan," katanya.

Desy Ratnasari menegaskan kembali bahwa sebagai seorang kader, dia siap untuk melaksanakan semua perintah

yang diberikan oleh pimpinan partai.

"Apapun keputusan beliau, saya akan mentaatinya sebagai kader partai," tambahnya.

Desy Ratnasari sendiri adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PAN, dan dia ingin meneruskan tanggung jawabnya untuk periode pemerintahan selanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, baru-baru ini menyebutkan bahwa ada dua tokoh yang memiliki potensi besar untuk diusung sebagai Cagub Jabar, yakni Bima Arya, Walikota Bogor, dan Desy Ratnasari sendiri, yang juga merupakan anggota DPR RI.

Meskipun begitu, belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusung, mengingat pemilihan gubernur Jabar berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Diketahui sebelumnya, PAN akan mengusung kader sendiri pada Pilgub Jabar 2024.

Nama yang diusung adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Jabar, Desy Ratnasari.

"Calon gubernur Jawa Barat Teh Desy," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.





Zulkifli memastikan bahwa semua elemen partai akan bekerja keras demi menyukseskan Desy Ratnasari maju pada Pilgub Jabar 2024.

"Semua elemen partai akan bekerja keras demi menyukseskan Desy Ratnasari. Tentunya dengan target meraih kemenangan," jelasnya.

Dilansir dari Wikipedia, sosok Desy Ratnasari adalah salah satu kader terbaik PAN, wanita kelahiran 12 Desember 1973 seorang aktris, politikus, pembawa acara televisi, penyanyi, dan model Indonesia.

Desy Ratnasari memulai kariernya dari dunia modeling dengan meraih juara kedua pada pemilihan GADIS Sampul tahun 1988.

Ia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah di Sukabumi, Jawa Barat, meraih gelar Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Terapan, dan Magister Psikologi Profesi dengan predikat cum laude.

Sebelum terjun ke politik, Desy dikenal sebagai seorang aktris yang telah meraih berbagai penghargaan atas karya seni perannya.

Ia juga terkenal dengan lagu "Tenda Biru" yang sukses besar di dunia musik Indonesia.

Selain itu, Desy Ratnasari juga aktif dalam dunia penyiaran sebagai pem-

bawa acara dan juri berbagai kompetisi televisi.

Pada tahun 2012 hingga 2015, Desy pernah menjadi dosen honorer di Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta.

Dengan latar belakang yang beragam dan pengalaman yang luas di berbagai bidang, Desy Ratnasari siap menghadapi tantangan dalam Pilgub Jabar 2024 dengan harapan membawa perubahan positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Ia bergabung dengan PAN di tahun 2014, kemudian mengikuti pemilihan umum di tahun yang sama dan terpilih sebagai anggota DPR.

Bintang film Joshua oh Joshua ini menjabat sebagai anggota DPR pada 2014-2019, Ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Melihat kiprahnya di dunia hiburan hingga politik, artis yang satu ini rasan-ya layak disebut multitalenta.

Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, jika PAN mengusung Desy Ratnasari dalam kontestasi Pilgub Jabar harus mengumpulkan suara banyak di Pemilihan Legislatif.

"Karena itu akan menjadi modal bagi Desy Ratnasari untuk maju sebagai

Cagub Jabar 2024," sambungnya.

Hanya saja, jika melihat beberapa hasil survey yang pernah dilakukan, elektabilitas Desy Ratnasari masih di bawah nama-nama kandidat lain.

"Kalau dilihat dari beberapa survei itu sampai saat ini belum signifikan elektabilitas Desy Ratnasari itu apalagi kalau dihadapkan figur-figur seperti kalau Ridwan Kamil maju lagi, ada Dedi Mulyadi, masih agak berat," jelasnya.

Bukan hanya itu, isu terkait kepemimpinan wanita juga bakal jadi persoalan yang harus dihadapi Desy Ratnasari jika betul-betul maju di Pilgub Jabar.

"Karena pemilih di Jabar itu ada segmen yang tingkat religiusnya agak tinggi dan biasanya mereka mempersoalkan kepemimpinan perempuan. Jadi itu bisa jadi problem sebetulnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Firman menilai peluang Desy Ratnasari untuk maju dan terpilih di Pilgub Jabar per hari ini masih terbilang cukup besar.

Firman berpendapat, menjadi wakil gubernur jadi pilihan paling realistis bagi Desy Ratnasari ketimbang maju sebagai calon gubernur.

"Bahkan kalau saya melihat yang lebih realistis itu untuk posisi wakil gubernur, jauh lebih realistis," tegas Firman.

• IRY

ELEKTABILITAS HERMAN DERU BELUM BISA DISALIP

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel kali ini akan semakin seru, bahkan digadang-gadang seperti rasa Pemilihan Presiden (Pilpres) RI. Mengingat, pecahnya koalisi petahana Herman Deru dan Mawardi Yahya yang kini memutuskan untuk menjadi lawan.

Tidak hanya itu, banyaknya nama baru yang menyatakan siap menjadi penantang Herman Deru kini mulai bermunculan.

Sebut saja, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo yang secara tegas sudah mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel bersama Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo.

Mantan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra (ESP) juga sudah jauh-jauh hari menyatakan siap maju sebagai Cagub Sumsel 2024. Meski gagal menjadi anggota DPR RI, ESP tetap percaya diri untuk Sumsel 1.

Hingga kini Herman Deru juga belum menyatakan sikap untuk menunjuk pasangan pendamping sebagai Cawagub Sumsel. Namun, nama Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad santer diisukan sebagai pilihan Herman Deru

Joncik yang mantan

Ketua Komisi II DPRD Sumsel ketika dikonfirmasi tidak menampik kabar tersebut.

"Prinsipnya itu kalau partai menugaskan, siap," tegas pria yang akrab diingkat namanya JM.

Pengamat Politik Bagindo Togar menyebut Pilgub Sumsel 2024 ini terasa sangat menarik, bahkan dirinya mengaku Pilgub Sumsel rasa Pilpres RI yang banyak menyita perhatian masyarakat.

"Ini sangat seru ya, banyaknya kandidat kuat yang akan maju, bahkan Pilgub Sumsel ini seperti rasa Pilpres RI," ungkapnya

Dijelaskan pria yang akrab disapa Bang Togar ini, kemungkinan bakal majunya tokoh dari PAN Joncik Muhammad dan Partai Golkar Bobby AR di Pilgub Sumsel, Rabu 27 November 2024 mendatang.

Kalau melihat koalisi nasional, bagaimana nasib Golkar dan PAN. Ada

partai besar Gerindra, Demokrat, Golkar,

PAN. Sedangkan itu leadernya adalah Golkar. Baru diikuti Gerindra.

"Nah sekarang semua itu karena Golkar memberikan mereka daftar tertinggi 12 kursi. PAN 6 kursi. Apakah mereka tidak mempergunakan hak politik mereka dalam Pilgub Sumsel. Gak mungkin kan?," ujar Bagindo.

Hal ini menurutnya masih terbuka kalau mereka tidak mengindahkan atau mengenyampingkan koalisi nasional, maka perpaduan ini rentan.

Satu, rentan secara definitif untuk dijadikan sebagai pasangan harus direkomendasikan dan rentan juga untuk memperoleh keunggulan.

"Tidak heran nanti akan muncul perpaduan tokoh yang dimunculkan siapa itu apakah Bobby dengan Joncik yang sudah menayangkan flyer. Total 18 kursi. Syaratnya 15 kursi terpenuhi," kata Bagindo.

Menurut Bagindo, apakah duet Mawardi Yahya-Harnojoyo (MaHar) akan awet bertahan, hingga resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel Agustus nanti, sebagai peserta Pilkada masih menjadi tanda tanya.

"Sebab, semua masih harus menunggu proses dan keputusan politik resmi, dari Parpol pengusung mau -



pun pendukung,” kata Bagindo.

Dalam upayanya untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2024, Mawardi Yahya memiliki langkah-langkah politik yang sudah disiapkan.

Salah satu strategi yang akan dijalankan oleh Mawardi untuk meraih kemenangan adalah dengan beradaptasi dengan masyarakat secara luas, melakukan sosialisasi, dan memberikan pemahaman yang baik, karena baginya politik sejatinya adalah seperti sedekah.

“Kita penuh pas dalam menyusun panitia menjelang hari H, dan kita juga penuh pas setelah hari H berakhir,” ungkap Mawardi.

Sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sumatera Selatan, Mawardi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program yang diusung oleh pasangan calon nomor dua ini bisa terwujud di Sumsel.

“Maka dari itu, salah satu caranya untuk memastikan bahwa program-program ini bisa terlaksana di Sumsel, saya memutuskan untuk maju sebagai Gubernur Sumsel,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai adiknya, Ridho Yahya, yang kabarnya juga akan maju dalam Pilgub Sumsel 2024, Mawardi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Namun, jika memang hal itu terjadi, ia tidak terlalu mempermasalahkannya.

“Jika ada dua pasang keluarga Yahya yang maju, itu tidak masalah. Bagi saya, siapapun yang menang adalah hal yang baik, saya tidak ingin membatasi, tetapi saya akan tetap maju,” tandasnya.

“Namun sebenarnya, apakah dia akan maju atau tidak, saya tidak tahu,” tambahnya.

Mawardi Yahya memutuskan untuk berpasangan dengan mantan Walikota Palembang, Harnojoyo, dalam Pilgub Sumsel 2024.

Keputusan ini tidak diambil begitu saja, karena pengalaman dan basis dukungan

daerah menjadi alasan utama Mawardi memilih Harnojoyo.

Menurutnya, pasangan Mawardi-Harnojoyo adalah kombinasi yang tepat. Keduanya pernah menjabat sebagai ketua DPRD, walikota, dan bupati.

Dilihat dari rekam jejak dan latar belakang keduanya, Mawardi yakin bahwa keduanya mampu menyelesaikan masa jabatannya dengan baik tanpa ada masalah yang berarti.

“Mungkin berdasarkan wilayah, saya dari sini, dan Harnojoyo dari Lahat, Basemah, Musi Rawas di sini. Jadi wilayah-wilayah ini terwakili,” paparnya.

Selain itu, faktor partai yang sudah berkoalisi dan mendukung pasangan presiden nomor dua juga menjadi pertimbangan penting.

“Partai Demokrat dan Gerindra sudah bersatu di tingkat nasional, jadi ini diikuti di tingkat daerah. Selain itu, gaya kepemimpinan Harnojoyo yang sederhana dan konsisten selama menjabat walikota juga menjadi pertimbangan,” ungkap Mawardi.

Saat

ini, setelah mendeklarasikan diri, foto-foto Mawardi Yahya dan Harnojoyo sudah tersebar luas di kota Palembang.

Mawardi menyatakan bahwa ia tidak menganggap enteng Pilgub Sumsel 2024 ini dan menyadari bahwa waktu menuju Pilgub Sumsel yang akan digelar pada bulan November nanti sangatlah singkat.

“Mungkin ada yang belum mendeklarasikan diri karena merasa enteng. Tapi bagi kita, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu,” tegasnya.

Peneliti Aldo Serena menilai yang terkuat dan akan menang jika pilkada digelar saat ini adalah Herman Deru.

“Tingkat kepuasan atas kepemimpinan Herman Deru selama menjabat Gubernur Sumsel cukup tinggi,” kata Aldo.

Sementara Mawardi Yahya, menurut Aldo, karena baru deklarasi, harus diuji kembali secara detail apakah sanggup menyalip elektabilitas Herman Deru yang sudah cukup tinggi.

“Jadi kalau bicaranya soal modal dasar kepuasan dan elektabilitas antara Herman Deru melawan Mawardi Yahya, jelas Herman Deru unggul. Itu clear silakan dites,” kata Aldo.

Soal kekuatan figur lain, terutama para mantan kepala daerah setingkat Bupati dan Walikota di Sumsel, Aldo menyebut mereka masih tertinggal jauh dan sejauh ini pendukungnya masih bersifat lokal.

“Tokoh-tokoh itu hanya populer di daerah yang dipimpinnya saja,” demikian Aldo. •





PROYEK INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI PACU PERTUMBUHAN EKONOMI

Sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Perhubungan siap diresmikan pada 2024 untuk menunjang kelancaran transportasi dalam negeri.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, proyek yang akan diresmikan pada tahun ini sebanyak 21 proyek, meliputi pembangunan enam pelabuhan penyeberangan dan satu kapal motor penyeberangan, delapan pelabuhan, lima bandar udara, serta jalur ganda kereta api.

Budi menyebut, sejumlah proyek infrastruktur transportasi yang akan diresmikan tahun ini di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tello di Kabupaten Nias, Sumatera Utara; dan Pelabuhan Donggala di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah Ternate di Kota Ternate, Maluku Utara; pengembangan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka, Jawa Barat, dan Pengembangan Bandar Udara Mandailing Natal di Sumatera Utara.

"Diharapkan kehadiran infrastruktur transportasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar-wilayah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," ujar Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu, 3 April 2024.

Budi menyampaikan, Kemenhub memiliki komitmen dalam kebijakan dan pri-

oritas anggaran 2024. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM, serta pemerataan pembangunan nasional.

Kemenhub juga fokus pada pelaksanaan program pro kerakyatan, keberlanjutan program multi years contract (MYC), pemenuhan prioritas nasional (PN) dan proyek strategis nasional (PSN), perencanaan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN), transportasi massal perkotaan, serta mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

"Tahun 2024 merupakan tahun akhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan fokus Kementerian Perhubungan pada pencapaian target RPJMN 2020-2024 menjadi prioritas yang harus dilaksanakan," ucap Budi.

Budi mengatakan, pada periode Januari hingga Maret 2024, ada 16 infrastruktur

transportasi yang telah diresmikan, di antaranya delapan terminal Tipe A, tiga pelabuhan, dan lima bandar udara.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 25 September 2023, kata Budi, pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38,60 triliun.

Pagu berdasarkan program untuk infrastruktur konektivitas sebesar 67 persen atau Rp25,92 triliun, dukungan manajemen sebesar 26 persen atau Rp10,2 triliun, serta pendidikan dan vokasi sebesar 6 persen atau Rp2,47 triliun.

"Hingga 1 April 2024, capaian realisasi anggaran Kemenhub sebesar Rp6,45 triliun atau mencapai 15,63 persen," kata Budi.

Budi menambahkan, beberapa program kerja Kemenhub pada 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan IKN dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan dukungan Buy The Service.

Kemudian layanan keperintisan angkutan di semua sektor transportasi termasuk tol laut dan jembatan udara, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.

Angkat Ekonomi Nasional

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengungkapkan, pembangunan infrastruktur transportasi mampu men-



gangkat ekonomi nasional. Sebab, keberadaannya dapat merajut dan mempersatukan ragam aktivitas, termasuk bisnis menjadi efisien.

Kepemimpinan Presiden Jokowi melalui Kabinet Indonesia Maju 2014-2024, memiliki visi untuk meraih Indonesia Emas pada 2045 atau usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan menjadi lima besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia.

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pembangunan di segala bidang, salah satunya infrastruktur transportasi. Sebab, sektor transportasi memiliki kontribusi pembangunan infrastruktur nasional.

Adita mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antar-wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kemajuan peradaban yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

"Kehadiran infrastruktur transportasi publik diharapkan mampu menjadi solusi dan menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi, seperti keterisolasian wilayah, distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inefisiensi layanan transportasi, hingga polusi dan kemacetan," kata Adita di Jakarta, Sabtu, 13 April 2024.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi secara merata turut berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengutip Kemenko Perekonomian, dari berbagai pembangunan proyek strategis nasional (PSN) selama kurun waktu 10 tahun, telah meningkatkan daya saing bangsa.

Berdasarkan data dari International Institute for Management Development (IMD) Global Competitiveness Index Tahun 2023, dengan sejumlah kriteria penilaian dari sisi kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur, posisi Indonesia berada di peringkat 34 dunia atau naik 10 peringkat dari tahun 2022.

Bahkan, sektor transportasi berkontribusi pada biaya logistik nasional. Berdasarkan data Bappenas, Kemenko Perekonomian dan Badan Pusat Statistik, biaya logistik nasional saat ini sebe-

sar 14,29 persen dari PDB.

Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10 persen dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8 persen dari PDB pada 2045.

Sementara data BPS, pada 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 4-5 persen. Sektor transportasi pun tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu di kisaran 15 persen, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menyatakan, pembangunan infrastruktur transportasi punya kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah UMKM di Tanah Air. Contohnya, penambahan simpul transportasi, yakni stasiun, terminal, bandara, dan

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 dan 2020-2024, Kementerian Perhubungan diamanahi membangun konektivitas untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia.

"Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan tiga indikator capaian utama, yaitu meningkatkan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan transportasi," jelas Adita.

Visi tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan, yang dituangkan di dalam



pelabuhan.

"Maka, ini merupakan sebuah peluang bagi masyarakat dan UMKM karena dapat berjualan di sana, seperti tenant makanan, minuman, merchandise, oleh-oleh dan sebagainya," ucapnya.

Di sisi lain, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perekonomian Indonesia, tolok ukurnya tentu beraneka ragam, tidak hanya dilihat dari sektor transportasi. Namun demikian, sektor transportasi jadi salah satu indikator yang ada di dalamnya.

"Tapi, satu hal yang pasti, transportasi modern yang dulu hanya ada di luar negeri, kini sudah hadir di dalam negeri. Ini menjadi laboratorium yang baik bagi Sumber Daya Manusia nasional untuk belajar banyak terkait teknologi baru," ujar Adita.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi dan dikaitkan dengan Rencana

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan lima tahunan (2015-2019 dan 2020-2024) dan rencana kerja tahunan Kementerian Perhubungan.

"Intinya, Kemenhub bersama pemangku kepentingan di sektor transportasi terus berkomitmen melanjutkan berbagai pembangunan konektivitas antar wilayah, meningkatkan integrasi antarmoda," tuturnya.

Termasuk mengembangkan transportasi massal perkotaan, green and smart mobility, serta membangun transportasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung pemerataan ekonomi Indonesia.

Kemenhub membangun infrastruktur transportasi publik yang modern dan berteknologi tinggi, seperti LRT Jabodebek, MRT, Kereta Cepat, dan sejumlah moda transportasi lainnya di Indonesia. ●

MODERNISASI ALAT PERTANIAN SETAHUN 3 KALI TANAM

Kementerian Pertanian mendorong listrik masuk ke area persawahan untuk modernisasi dan mekanisasi pertanian. Sebab, untuk memodernisasi alsintan diperlukan energi yang efektif dan efisien, yakni melalui listrik.

"Berdasarkan berbagai pengalaman praktek lapangan dalam menggunakan energi untuk proses budidaya di sawah, petani merasakan lebih hemat menggunakan energi listrik dibandingkan bahan bakar minyak, gas, sedangkan energi solar cell belum begitu meluas di petani," kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, Minggu, 14 April 2024.

Suwandi mengatakan, sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk mekanisasi ini diperlukan tenaga dan sumber energi yang lebih murah dan mudah didapat dari tenaga listrik. Karenanya, Kementerian Pertanian mengembangkan program Listrik Masuk Sawah (LMS) dan beberapa daerah menyebut program Gerakan listrik masuk sawah (Gelisah).

Lebih lanjut, Suwandi memaparkan salah satu yang men-

jadi contoh yakni program Listrik Masuk Sawah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

"Sebagai contoh program listrik masuk sawah yakni Kabupaten Ngawi mengembangkan sumur submersible lebih dari 17 ribu unit dari swadaya petani dan bantuan untuk mengairi lahan kering tadah hujan, sehingga bisa bertanam padi tiga kali setahun (IP300)," paparnya.

Selain di Ngawi, lanjut Suwandi, program serupa juga dilakukan di Kabupaten Sragen. Lebih dari 23 ribu sumur submersible guna memompa air dari dalam tanah untuk mengairi lahan tadah hujan, sehingga indeks pertanaman (IP) bisa ditingkatkan hingga IP300, bahkan IP400 lebih dari ribuan hektare.

"Setiap titik sumur submersible bisa melayani 2-30 hektare dengan biaya dari Rp8 juta hingga Rp150 juta, tergantung jenis ukuran pipa dan pompa, kedalaman sumur, dan lainnya," ungkapnya.

Terkait maraknya pembuatan jebakan tikus yang menggunakan aliran listrik, Suwandi dengan tegas menghibau petani agar Listrik Masuk Sawah tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan.

"Listrik Masuk Sawah digunakan untuk menggerakkan mesin pompa air, alat olah lahan, mesin pembuatan kompos, alat panen dan pascapanen, juga lampu perangkap hama dan lainnya. Dalam hal ini dilarang keras menggunakan kawat listrik untuk jebakan tikus sawah, sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa," kata Suwandi.

Sementara itu, TAM Bidang Mekanisasi dan Alsintan PLN, Astu Unadi, mengatakan, penggunaan listrik untuk energi mesin pompa air jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar lain. Hal ini karena untuk penggunaan listrik bisa disetting secara otomatis.

Astu memaparkan, mesin pompa itu bisa digerakan oleh beberapa sumber tenaga, antara lain dengan diesel. Umumnya, mesin pompa lebih dari 8 house power (HP) jika diameter pipanya besar.

"Untuk Diesel 8 horse power, kalau kita rupiahkan dengan rata-rata harga solarnya Rp6.800, saya kemaren ngecek di Palembang harganya bisa naik di tingkat petani Rp10 ribu per liter. Jadi tinggal dikalikan saja Rp22 ribu per jam. Kemudian kalau untuk bensin, 5 horse power kebutuhan bahan bakarnya antara 1,2 sampai 1,37 liter per jam. Kalau harganya itu Rp10 ribu per liter di pom bensin biasanya di petani di desa itu jauh lebih dari pom bensin, sehingga



harganya lebih mahal," paparnya.

Astu menambahkan, saat ini harga pompa bensin harganya Rp13.700 per jam. Kemudian jika listrik sama-sama 5 horse power lalu dikonversi menjadi kilo watt adalah 3,75 kilo watt per jam.

"Nah, kalau tarif listrik harganya Rp1.600 per KWH. Maka harganya di sini Rp6.000. Mari kita lihat perbandingan antara Rp6.800 dengan power yang sama, dengan Rp13.700, ini belum termasuk oli, kemudian perlu operator dan lain-lain," jelasnya.

"Kalau listrik, ini enggak begitu perlu operator, kita bisa ngeset otomatis, enggak perlu oli hanya langganan. Jadi ini hampir kurang dari setengahnya, mungkin 40 persen, belum dihitung oli, kalau dihitung oli mungkin sepertiganya," katanya.

Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu mengungkapkan bahwa saat ini di Indramayu belum ada elektrifikasi sawah atau listrik masuk sawah. Untuk itu, pihaknya sangat berharap program Listrik Masuk Sawah bisa segera terealisasi.

"Sampai saat ini belum pernah di-realisasikan. Kami juga menunggu bagaimana tindak lanjutnya, seperti apa listrik masuk sawah itu," ungkapnya.

Optimalkan Pompanisasi

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bakal mengoptimalkan pompanisasi dan pipanisasi untuk menggenjot produksi nasional yang sempat turun beberapa waktu lalu.

Caranya dengan optimalisasi sungai-sungai besar untuk mengoptimalkan lahan persawahan kering akibat cuaca buruk El Nino yang melanda Indonesia. Sawah yang menjadi target adalah sawah kering dengan kualitas satu kali tanam.

"Sungai yang akan kita pompa di antaranya Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan Sungai Cimanuk yang ada di Jabar. Sungai-sungai besar itu akan kita pompa airnya agar bisa kita alirkan untuk mempercepat produksi," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Pompanisasi ialah mengambil air sungai yang dialirkan langsung ke persawahan kering. Langkah ini pun bakal



dimasifkan.

"Alhamdulillah pompanisasi sudah berjalan dan kita harapkan yang tadinya satu kali tanam menjadi tiga kali dalam setahun. Jadi, solusi cepat kita saat ini adalah memompa air sungai yang ada. Fokus kami di Pulau Jawa yang tanam satu kali jadi tiga kali," imbuhnya.

Pulau Jawa menjadi fokus utama dari masifnya program pompa dengan total lahan 500.000 hektare dan sisanya berada di luar Pulau Jawa, juga dengan total yang sama yakni 500.000 hektare.

"Di Pulau Jawa kurang lebih 500.000 hektare dan di luar Pulau Jawa 500.000 hektare. Kita fokus Jawa dulu karena

kalau bangun sawah itu butuh waktu yang lama," katanya.

Selain pompa, solusi cepat berikutnya adalah menyiapkan benih gratis dan menambah alokasi pupuk subsidi yang mencapai Rp28 triliun.

Dengan tambahan tersebut, maka total alokasi pupuk menjadi Rp54 triliun atau jika dikonversi kuantum sebanyak 9,5 juta ton.

"Pupuk yang dulu 9,5 juta ton turun jadi 4,5 juta ton. Kalau ini yang terjadi sudah pasti pertanian hancur karena pupuknya berkurang. Ironisnya ada pupuk yang wajib dipenuhi malah ditiadakan dan ini tambah hancur. Nah, sekarang kami kembalikan menjadi 9,5 juta ton, sehingga petani tak perlu khawatir lagi akan ketersediaannya," jelasnya. ●



LIBUR LEBARAN PENUH CUAN POTENSI EKONOMI RP400 TRILIUN

**Lalu lalang kendaraan masyarakat menyambut hari nan suci Idul Fitri 2024 begitu terasa meriah, terlebih beberapa hari jelang Lebaran yang ditetapkan Pemerintah pada Rabu, 10 April 2024. Mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah terpan-
tau tinggi untuk sekadar persiapan merayakan Lebaran, seperti belanja makanan, pakaian, hingga bersiap melakukan perjalanan pulang kampung alias mudik.**

Perayaan khas Indonesia yang ditandai dengan perjalanan dari kota rantau menuju kampung asal menyuguhkan beragam cerita. Pada Lebaran 2024 diproyeksikan terdapat sebanyak 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari total penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan mudik.

Prediksi Kementerian Perhubungan tersebut berdasarkan pemetaan dari tanggal-tanggal libur yang ditetapkan. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub, perjalanan tersebut didominasi perjalanan mudik sebanyak 52 persen untuk berlebaran di kampung halaman, disusul 35,2 persen melakukan tradisi mengunjungi sanak saudara di kampung, serta 10,6 persen memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berkunjung ke

tempat wisata.

Bila menilik hasil survei pada 2023, potensi pergerakan masyarakat pada momentum Lebaran mencapai 123,8 juta orang, sementara tahun ini mengalami kenaikan signifikan.

Dengan proyeksi pergerakan yang besar pada Lebaran tahun ini, perputaran ekonomi selama libur yang ditetapkan selama 10 hari ini juga diprediksi bakal berdampak secara ekonomi di berbagai daerah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memprediksi perputaran ekonomi sektor parekras selama periode libur lebaran 2024 sekitar Rp350-400 triliun. Prediksi Sandi lebih tinggi dari hasil kajian Kememparekras sebelumnya yang memproyeksikan perputaran ekonomi selama periode libur lebaran 2024 di sektor tersebut mencapai Rp276,11 triliun.

Sandi merujuk pada pergerakan masyarakat pada libur lebaran tahun ini yang diperkirakan mencapai 193,6 juta orang atau meningkat 5,38 persen

dibandingkan libur lebaran tahun lalu sebanyak 123,8 juta orang. Selain itu, adanya libur cuti bersama yang lebih panjang dibandingkan lebaran tahun lalu dan kebijakan cuti tahunan ASN dianggap menjadi faktor mendorong peningkatan potensi ekonomi sektor parekras selama libur lebaran 2024.

"Tapi ini naiknya hampir 50 persen (proyeksi pergerakan masyarakat) dibandingkan tahun lalu. Jadi, saya memprediksi angka (perputaran ekonomi) yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp350-400 triliun," ujar Sandi dalam keterangannya, Sabtu, 13 April 2024.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun meyakini potensi ekonomi hingga Rp400 triliun itu akan mengalir ke pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung di berbagai daerah. Menurutnya, potensi ekonomi itu menjadi berkah yang bakal mendorong peluang usaha dan lapangan kerja di masyarakat.



"Limpahannya akan ke destinasi-destinasi wisata, juga ke sentra ekonomi kreatif, termasuk ke pelaku UMKM serta desa wisata," ucap Sandi.

Data Kemenparekraf menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi wisata pada libur lebaran saat ini terus meningkat. Selain destinasi wisata, Kemenparekraf juga memprediksi tingkat okupansi hotel dan restoran di sejumlah daerah meningkat 80-100 persen. Adapun rata-rata lama tinggal mencapai 1-2 malam, sedangkan wisatawan dari luar provinsi bisa mencapai 4 malam.

Deputi Bidang Kajian Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati, mengungkapkan, dengan kesempatan waktu libur yang cukup untuk istirahat dari hiruk pikuk aktivitas pekerjaan, para pemudik ataupun masyarakat pada umumnya bakal membanjiri tiga besar destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah sebesar kurang lebih 61,6 juta jiwa serta Jawa Barat 37,6 juta serta Jawa Timur sebanyak 32 juta orang dengan dominasi pelaku perjalanan dari Jawa Timur, Jabodetabek, dan Jawa Tengah menggunakan kereta api, bus, mobil pribadi, hingga sepeda motor.

Para pelaku perjalanan itu pun diperkirakan membanjiri sejumlah destinasi wisata dengan preferensi meliputi danau atau pantai, pusat kuliner, pegunungan atau agrowisata, taman rekreasi, kebun binatang, hingga pusat perbelanjaan.

Lewat perayaan besar ini, sektor parekraf diperkirakan mampu menyumbangkan 5 persen terhadap perekonomian nasional pada kuartal I dan II 2024. Hal ini tentu saja tak lepas dari melonjaknya kebutuhan akan uang tunai yang meningkat sebesar 4,65 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2023.

Meningkatnya angka konsumsi masyarakat juga didukung oleh kehadiran Pemerintah lewat bantuan dana sosial (bansos) yang telah digelontorkan dalam rentang waktu Juni 2024 serta bantuan langsung tunai yang telah

disalurkan sejak Januari hingga Maret 2024. Sementara, khusus untuk aparat sipil negara (ASN), Pemerintah juga telah mengucurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar 100 persen.

Penginapan sebagai akomodasi pendukung pariwisata juga diproyeksikan bakal meraup cuan. Bahkan tingkat keterisian atau okupansi hotel selama

lancar.

Demikian pula di kawasan Pantai Anyer, Serang, Banten, pada hari kedua Lebaran juga dipadati sekitar 85.050 wisatawan. Dengan kepadatan ini, pada 11 April 2024 okupansi hotel di kawasan ini mencapai 2.835 orang dengan rerata keterisian mencapai 71 persen. Destinasi wisata Pantai Anyer memang menjadi



libur Lebaran ini meningkat 10 persen dengan okupansi tertinggi terjadi H+2 Lebaran. Peningkatan itu tentu terjadi seiring dengan lonjakan pergerakan masyarakat serta sejumlah diskon yang diberikan hotel untuk menjaring konsumen.

Lebih lanjut, dari Lampung dilaporkan bahwa objek wisata bahari ramai dikunjungi wisatawan sepanjang pesisir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya Pantai Mandiri hingga Pantai Tanjung Setia yang merupakan surga bagi para pese-

lah satu magnet wisatawan dari dalam dan luar Banten untuk berwisata pada momen Lebaran.

Beralih di kawasan wisata yang juga menjadi magnet wisata yakni Puncak, Bogor. Kawasan yang menyajikan kesegukan udara dan hijaunya alam ini mencatatkan cerita tersendiri.

Sejumlah warga bahkan rela menunggu rekayasa lalu lintas satu arah (one way) selama berjam-jam agar dapat menghabiskan waktu libur di kawasan wisata Puncak. ●

PMI LEBIH LELUASA KIRIM BARANG KE INDONESIA

Kementerian Perdagangan menegaskan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibebaskan dari aturan tentang perizinan impor. Sehingga barang kiriman PMI dapat bebas diterima keluarganya di Indonesia dengan baik.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menuturkan, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor segera direvisi untuk mengeluarkan lampiran III tentang barang kiriman PMI sebagaimana telah diubah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang salah satu isinya membebaskan bea masuk barang kiriman PMI.

Penegasan Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, tersebut menyusul keputusan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Rapat dilaksanakan di Jakarta dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa, 16 April 2024.

"Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tidak dicabut, tetapi akan direvisi. Salah satu poin revisinya adalah untuk mengeluarkan aturan terkait impor barang kiriman PMI dari kebijakan dan pengaturan impor di Permendag tersebut," kata Zulhas.

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian me-

mutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Zulhas menjelaskan, impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan

tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selain itu, impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur bahwa barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak Free on Board (FOB) sebesar USD500. Sehingga total dalam



satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar USD1.500.

Pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri diberikan pembebasan bea masuk.

Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling ban-



Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya.

yak FOB USD500.

“Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Tanjung Emas, Semarang. Tertahannya barang-barang kiriman tersebut karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024,” imbuh Zulhas.

Revisi Impor Barang Pribadi Penumpang

Zulhas menyampaikan, pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur di PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang

yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor, baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

“Barang pribadi penumpang yang diberikan pengecualian tersebut merupakan barang pribadi penumpang yang hanya digunakan tidak untuk kegiatan usaha, tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor, serta tidak termasuk kategori barang berba-



haya,” ungkap Zulhas.

PMK Nomor 203 Tahun 2017 mengatur bahwa barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB USD500, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Aturan Pembatasan Impor Barang

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang.

Zulhas menekankan, evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI).

Menurut Zulhas, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait.

Para pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait adanya kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi atau per-

timbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Dia juga menekankan, evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

“Sejumlah kebijakan baru ini baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang saat ini sedang proses. Kami saat ini secara maraton sedang menyusun perubahan Permendag tersebut. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, perubahan Permendag ini dikoordinasikan kantor Menko Perekonomian,” pungkas Zulhas. •



REALISASIKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT HINGGA KE DESA

Satu demi satu permasalahan yang menyangkut fasilitas umum masyarakat maupun infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin berhasil diselesaikan Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud. Mulai dari jalan, penerangan hingga fasilitas kesehatan telah dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya.

Untuk fasilitas kesehatan, puluhan tahun menantikan keberadaan tempat pelayanan kesehatan atau Puskesmas, akhirnya warga di empat Desa eks transmigrasi Kecamatan Babat Supat kini memiliki Puskesmas yang berhasil direalisasikan oleh Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Kini empat desa di Kecamatan Babat Supat yang dimaksud yakni Desa Bandar Tenggulang, Desa Tenggulang Raya, Desa Tenggulang Baru, dan Desa Sumber Jaya telah terlayani kesehatan.

Hal ini direalisasikan Pj Bupati Apriyadi, karena keprihatinannya selama ini yang membuat warga harus menempuh pu-

luhan kilometer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan, sejak satu tahun yang lalu dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Tenggulang Raya Kecamatan Babat Supat terkait kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena keberadaan Puskesmas yang sangat jauh.

"Alhamdulillah hari ini kita resmikan bangunan Puskesmas Tenggulang Raya, kini warga di empat Desa eks Transmigrasi Kecamatan Babat Supat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keberadaan Puskesmas Tenggulang Raya," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud di sela Pe-

resmian Puskesmas Tenggulang Raya Kecamatan Babat Supat.

Ia menceritakan, sudah selayaknya keberadaan Puskesmas untuk diperoleh masyarakat empat Desa Eks Transmigrasi Kecamatan Babat Supat.

"Semoga Puskesmas ini bermanfaat dengan baik untuk masyarakat," ujar pria kelahiran Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Muba tersebut.

Lanjutnya, tidak hanya sekadar Puskesmas tetapi keberadaan Puskesmas Tenggulang Raya ini juga memiliki layanan Unit Gawat Darurat (UGD).

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Tenggulang Raya, Junaidi mengungkapkan Pj Bupati Apri-

yadi telah mengabdikan mimpi warga empat Desa yang selama puluhan tahun sangat berharap memiliki tempat pelayanan kesehatan.

"Kami ingat betul pada 14 Maret 2023 pak Apriyadi berjanji akan membangun Puskesmas, dan hari ini secara bangunan puskesmas megah ini telah berdiri dengan kokoh," pungkasnya.

Tunaikan Semua Janji

Apresiasi juga pantas diberikan Apriyadi Mahmud yang melakukan perjuangan berat untuk pengalihan listrik PT MEP ke PLN di Muba.

Hasilnya, secara resmi Pj Bupati Apriyadi Mahmud bersama Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni MSi melakukan penyalan perdana listrik PLN pasca beralih dari listrik PT MEP di Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat.

"Pak Bupati Apriyadi ini tidak hanya omdo (omong doang, baca) saja, awal menjabat Pj Bupati sudah berjanji akan mengalihkan listrik MEP ke PLN, dan hari ini secara resmi kami menikmati listrik PLN," ungkap tokoh pemuda Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat, Madyuri.

Ia menuturkan, warga sangat bersyukur memiliki pemimpin seperti Pj Bupati Apriyadi yang amanah dan menepati janji.

"Semoga kami terus dipimpin oleh sosok yang amanah dan peduli. Terima kasih pak Bupati Apriyadi dan jajaran Pemkab Muba," ucapnya.

Halsenada juga diungkapkan tokoh masyarakat Desa Tenggulang Jaya, I Made Entar. Ia mengaku awalnya warga setempat sempat pesimis dengan janji yang diberikan Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk mengalihkan listrik MEP ke PLN, pasalnya sudah puluhan tahun tidak pernah terealisasi.

"Hari ini menjawab keraguan kami selama ini, Pak Apriyadi membuat kami sangat sangat bahagia dengan menunaikan janjinya mengalihkan pengelolaan listrik MEP ke PLN, sekarang kami

tidak khawatir lagi dengan terjadinya byarpet," ungkap dia.

Tokoh agama Desa Tenggulang Jaya, H Mustajab mengaku sangat bahagia dengan secara resmi masuknya listrik PLN di Kecamatan Babat Supat.

"Kami sangat berterima kasih dengan pak Bupati Muba Apriyadi, kami sangat

terkait di Pemkab Muba serta support warga Muba," ujar Putra Daerah Asli Muba dari Desa Bumi Kecamatan Lawang Wetan itu.

Ia mengaku, memang banyak lika liku dalam perjuangan menuntaskan peralihan listrik tersebut, namun berkat dukungan dan doa semua pihak di Muba se-



bersyukur punya pemimpin yang amanah dan menunaikan janjinya kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengaku sangat senang bisa menuntaskan persoalan peralihan listrik PT MEP ke PLN.

"Alhamdulillah akhirnya tuntas peralihan listrik MEP ke PLN, ini tentunya berkat kerja keras OPD serta stakeholder

muanya berjalan dengan baik.

"Realisasi ini juga berkat support dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 bapak Herman Deru dan Mawardi Yahya, hingga saat ini mendapatkan dukungan yang masif dari bapak Pj Gubernur Dr Agus Fatoni," jelas Apriyadi.

Kemudian, dukungan realisasi peralihan listrik MEP ke PLN ini juga didukung total oleh Anggota DPR RI Kahar Muzakir dan Maman Abdurahman.

"Insya Allah ini semua demi warga masyarakat di Muba, dan khususnya 54 ribu pelanggan MEP," tuturnya. ●

BERSINERGI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN KABUPATEN MUBA

Dinamika pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin terus bergulir dengan dilantiknya Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel Sandi Fahlevi SP MSI menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muba oleh Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni MSi menggantikan Drs Apriyadi Mahmud MSi yang kembali menduduki kursi Sekretaris Daerah. Pergantian ini menjadi aura positif bagi Kabupaten Musi Banyuasin karena keduanya punya tekad kuat untuk membangun daerah lebih maju lagi.

Situasi yang kondusif ini bahkan dirasakan Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni saat melakukan pelantikan di Griya Agung beberapa waktu lalu.

"Pak Apriyadi menjalankan tugas dengan sangat baik dan menjadi hal yang langka, karena pak Apriyadi ini dua periode menjadi Pj Bupati Muba, tentu ini capaian yang sangat luar biasa," ungkap

Agus Fatoni.

Sehingga Pj Bupati Muba Sandi Fahlevi sangat beruntung, pasalnya untuk menjalankan tugas di Muba ke depan diperkuat dengan keberadaan Sekda Muba Apriyadi Mahmud yang dimana sebelumnya menjabat Pj Bupati Muba 2022-2024.

"Jadi dengan sinergi Pj Bupati Muba dengan Sekda yang juga sebagai Pj Bu-

pati periode sebelumnya. Saya yakin sinergi dan kolaborasi pak Sandi dan pak Apriyadi dapat lebih memajukan Muba ke depannya," ucapnya.

Menurutnya, Kabupaten Muba yang sangat potensial tentu akan lebih maksimal dengan keberadaan duet Pj Bupati Muba Sandi Fahlevi dengan Sekda Muba Apriyadi Mahmud.

"Saya minta pak Sandi terus menjalankan program yang telah dijalankan pak Apriyadi selama ini, tentu program-program yang dijalankan selama ini sangat baik berdampak ke Kabupaten Muba," ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Sandi Fahlevi SP MSI mengatakan dalam menjalankan tugas dan amanah ke depan di Muba, dirinya akan berkolaborasi dengan Apriyadi Mahmud yang saat ini kembali menjabat Sekda Definitif Pemkab Muba.

"Saya bersama pak Sekda Apriyadi yang dimana sebelumnya selama dua tahun menjadi Pj Bupati Muba akan berkolaborasi demi kemajuan Muba," ungkap dia.

Sekda Muba Drs Apriyadi Mahmud mengaku, dirinya siap dan loyal serta akan berkolaborasi dengan Pj Bupati Muba Sandi Fahlevi untuk membangun Kabupaten Muba.

"Pak Sandi orang yang mumpuni, Insya Allah ke depan roda Pemerintahan di Muba akan terus berjalan baik dan menuntaskan berbagai persoalan," pujiinya

Kompak Membangun Muba

Penjabat Bupati Musi Banyuasin (Muba) periode 2022-2024, H Apriyadi Mahmud menyatakan siap dukung penuh (Pj) Bupati Muba H Sandi Fahlevi



dalam menjalankan tongkat estafet roda pemerintahan Kabupaten Muba.

"Selamat datang pak Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi di Kabupaten Muba, tentunya saya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Muba siap dukung penuh dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muba," katanya.

Apriyadi juga berharap agar seluruh kepala OPD dan jajaran dapat meningkatkan lagi prestasi kerja yang sudah tercapai, dan terus memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.

"Pencapaian kinerja yang telah kami laksanakan bersama sama dengan seluruh stakeholder selama kami menjabat secara lengkap telah kami tuangkan dalam buku memori serah terima jabatan yang kami serahkan pada hari ini. Bapak Pj Bupati Muba tentunya masih banyak pekerjaan yang harus bersama sama kita lakukan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah," pungkasnya.

Sementara Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi mengungkapkan, secara pribadi dan mewakili keluarga mengapresiasi kepada Pj Bupati Muba periode 2022-2024 dan jajaran Pemkab Muba serta seluruh warga masyarakat dan stakeholder yang ada di Kabupaten Muba atas penerimaan baik, yang sudah dimulai sejak pelantikan kemarin dilanjutkan hari ini acara serah terima jabatan.

Pj Bupati Sandi juga mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba untuk dapat bekerjasama bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan. Menyatukan gerak langkah dan niatan hati bahwa apapun yang dilakukan sebagai bagian dharma bakti kepada Kabupaten Muba yang lebih baik dimasa mendatang.

"Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kakanda Apriyadi selaku Pj Bupati Muba 2022-2024, dengan segudang prestasi membanggakan bagi Kabupaten Muba. Dibawah kepemimpinan beliau, Kabupaten Muba dinobatkan sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam penanganan stunting tingkat nasional dan program lainnya. Hal ini menghantarkan Pj Bupati Muba sebagai Kepala Daerah inovatif terbaik keempat dari 514 kabupaten kota se-Indonesia berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya. ●



KEMAJUAN MUBA HARUS DILANJUTKAN

Pembangunan di Kabupaten Muba saat ini telah berjalan sesuai arah. Untuk itu Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni berpesan kepada Pj Bupati Muba yang baru Sandi Fahlepi untuk meneruskan program dan capaian yang telah dilakukan Pj Bupati sebelumnya.

"Jadi bukan membangun yang baru namun meneruskan. Apa yang sudah dirintis ini hendaknya dilanjutkan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Fatoni.

Fatoni mengatakan Kabupaten Muba merupakan salah satu kabupaten yang potensial di Sumsel dan perlu dimanfaatkan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu dia berpesan kepada Pj Bupati Muba yang baru untuk mengelola pemerintahan di Kabupaten Muba dengan baik dan penuh ketekunan.

Pj Gubernur Agus Fatoni juga berpesan agar Pj Bupati Muba dapat menjaga sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan kalangan swasta. Terutama dalam menjalankan sejumlah kegiatan serentak secara bersama.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri, sinergi, kolaborasi dengan Forkopimda, instansi vertikal serta swasta harus terus dilakukan," jelasnya.

Beberapa kegiatan serentak itu, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS), Gerakan Pasar Murah Serentak se Sumsel (GPMSS), Gerakan Bedah Rumah Serentak Sumsel (GBRSS) serta Gerakan Penanganan Stunting Serentak Sumsel (GPSSS) dan terbaru Gerakan Perlindungan Pekerja Informal Serentak se Sumsel (GPPISS).

"Gerakan-gerakan serentak ini harus tetap dijalankan dan bila memungkinkan gerakan ini bisa ditambah lagi," jelas Fatoni.

Ia juga meminta kepada Sandi Fahlepi untuk tetap menjaga citra Sumsel dan kondusifitas daerah. Mengingat tak lama lagi pada bulan November 2024 akan diadakan pemilihan kepala daerah. ●

TANCAP GAS JALANKAN KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN

Kolaborasi yang dibangun bersama membuat semuanya berjalan semangat. Tidak ada waktu santai bagi Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi dan Sekda, Apriyadi Mahmud bersama seluruh OPD untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin lebih maju lagi.



H. SANDI FAHLEPI, S.P., M.Si
PJ. BUPATI MUSI BANYUASIN

Ada beberapa program yang dilakukan dengan cepat dan tancap gas oleh Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi dan Apriyadi Mahmud, salah satunya kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Kabupaten Muba 3-10 Mei 2024.

MTQ XXX 2024 diyakini berlangsung sukses berkat keseriusan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai tuan rumah.

Persiapan yang matang menjadi salah satu kunci pelaksanaan MTQ XXX tahun 2024 di Kabupaten Muba. Hal ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Muba dalam melaksanakan pembangunan sehingga mampu menjadi salah satu daerah terdepan di Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan MTQ XXX ini juga menjadi salah satu perhatian dari Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi untuk mengenalkan Kabupaten Muba kepada masyarakat Sumatera Selatan.

Bahkan untuk kesuksesan pelaksanaan ini Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi dan Sekda Muba Apriyadi Mahmud ikut turun langsung mengecek langsung persiapan MTQ XXX 2024 di Stable Berkuda Sekayu.

Sekda Apriyadi Mahmud juga memastikan space tenant untuk UMKM Muba disediakan dengan baik. Sehingga masyarakat yang hadir dan peserta dari berbagai daerah di Sumsel menikmati berbagai sajian yang diujakan para UMKM.

"Kita targetkan Muba sukses jadi tuan rumah dan juga sukses prestasi, ini juga menjadi atensi pak Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi," tegas Apriyadi Mahmud.

Selain meningkatkan syiar Islam di Sumsel khususnya Kabupaten Musi

Banyuasin, melalui MTQ XXX ini juga Pemkab Muba berupaya meningkatkan perekonomian rakyat dengan melibatkan UMKM. Bahkan space tenant UMKM untuk berjualan semuanya digratiskan.

“Tidak ada biaya sewa, semua gratis. Tujuannya, kita akan menopang perekonomian UMKM di Muba,” ulasnya.

Tenda kuliner ini disediakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Ketua Panitia Bazar UMKM yang memfasilitasi pendaftaran para pedagang sebanyak 40 unit tenda kuliner.

Siapkan Rp 60 M Atasi Kerusakan Infrastruktur

Mengantisipasi dampak tingginya intensitas hujan yang tinggi beberapa pekan belakangan ini hingga menyebabkan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Muba mengalami kerusakan berat membuat Pemkab Muba juga bergerak cepat.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi bersama Sekda Muba Apriyadi Mahmud telah menyiapkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 60 miliar untuk mengatasi infrastruktur yang rusak tersebut dan anggaran tersebut belum tercover di dalam APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2024.

“Ada 11 titik ruas jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir di Muba, yang dirincikan membutuhkan anggaran sebesar Rp60 Miliar untuk mengatasi tanggap darurat melalui dana BTT,” ungkap Sekda Muba Apriyadi Mahmud.

Adapun 11 titik kerusakan infrastruktur akibat banjir di Muba yakni diantaranya Jalan Sukarami-Tanah Abang, Jalan Sekayu-TL Care, Jalan Tanjung Agung Timur menuju Tanjung Agung Barat.

Kerusakan di Jalan Sungai Guci-Danau Cala, Jalan Ulak Embacang- Muara Rawas, dan kerusakan di Jalan Macang Sakti-Ulak Embacang.

“Kemudian, Jalan Kertajaya-Tebing Bulang, Jalan Simpang Kantor Statistik menuju Komplek DC Sekayu, Rehab jembatan Kelurahan Sungai Lilin.

Pemkab Muba juga bergerak cepat melakukan pembangunan 1 unit jembatan beton Sumber Urip Desa Sialang Agung Plakat Tinggi, dan pembangunan 1 box culvert Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan. ●



SUKSES TINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI

Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI patut diacungi jempol. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran pegawai pasca libur Lebaran Idul Fitri 2024.

P enjabat Bupati OKI Asmar Wijaya mengatakan, seluruh ASN terus meningkatkan kedisiplinan serta menjalankan tugas dan tetap mematuhi aturan pasca lebaran untuk melanjutkan kinerja yang terlaksana dengan baik.

"Saya juga menghimbau agar setiap ASN tetap mengoptimalkan program kerja, mengefisienkan koordinasi dan sinergi antar ASN maupun OPD," ujarnya

Pj Bupati OKI Asmar Wijaya, berharap kepada selaku ASN terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Selaku ASN adalah memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat, sudah menjadi tugas kita tanpa terkecuali. Jangan sampai pelayanan kita tidak memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Saya berharap dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," tuturnya.

Asmar Wijaya dan Pj. Sekda Muhammad Refly juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari pertama kerja usai Libur Le-

baran 2024.

Dari hasil inspeksi tersebut diketahui tingkat kehadiran pegawai baik ASN maupun Non-ASN di atas 95 persen.

"Alhamdulillah, dari unit-unit kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada publik semuanya terpantau memiliki tingkat kehadiran yang baik. Tingkat kehadiran diharapkan diiringi dengan pelayanan yang terbaik dan maksimal juga untuk masyarakat" Tegaskan Asmar

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat pasca libur lebaran tetap berjalan dengan baik.

"Ini bagian dari langkah kami untuk memastikan bahwa pelayanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir walaupun memang dalam suasana pasca-libur Lebaran, tetap berjalan dengan baik dan maksimal," ujar Pj Bupati Asmar.

Sejumlah unit kerja penyelenggara pelayanan masyarakat yang menjadi tujuan antara lain kantor Disdukcapil, RSUD Kayuagung, RSUD Tugu Jaya, Kantor-Kantor Camat, serta Puskesmas.



Jaga Tradisi Unik di Hari Raya

Kabupaten OKI juga dikenal dengan tradisi Midang bebuke atau arak-arakan pakaian adat pada hari Lebaran yang menjadi tradisi turun temurun masyarakat Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel. Tradisi ini digelar pada hari ketiga dan keempat Lebaran Idul Fitri. Tahun ini gelaran midang terlihat semarak dan tertib.

Sesepuh dan tokoh masyarakat Kayuagung, Saiful Ardan mengatakan, awal mulanya Midang Bebuke terjadi sekitar abad ke-17. Konon, midang dijadikan sebagai syarat pernikahan.

Ketika itu tutur Ardan ada perseteruan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Pihak mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang miskin sementara pihak perempuan berasal dari keluarga yang terpandang.

Lalu pihak perempuan meminta sejumlah syarat kepada keluarga laki-laki berupa arak-arakan kereta hias menyerupai naga lengkap dengan gega-waannya. Singkat cerita persyaratan tersebut dipenuhi.

"Jadi, sejak peristiwa itulah, masyarakat Kota Kayuagung menyelenggarakan acara Midang Bebuke Morge Siwe," ungkapnya.

Dijelaskannya juga, midang dalam istilah masyarakat Kayuagung adalah sebuah kegiatan berjalan kaki dengan menggunakan pakaian adat perkawinan masyarakat Kayuagung, sedangkan bebuke artinya Lebaran.

"Kala itu midang merupakan perkawinan dalam adat yang tertinggi di Morge Siwe (Sembilan Marga -red) yang merupakan persyaratan untuk jemput mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki atau masuk dalam adat istiadat perkawinan, dan seiring dengan berjalannya waktu midang ini terus mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah agenda pariwisata di OKI," pungkash dia

Kini midang telah menjadi agenda tahunan di Kota Kayuagung terutama pada perayaan Idul Fitri (bebuke). Bahkan midang telah ditetapkan sebagai kekayaan khasanah budaya masyarakat Kayuagung melalui sertifikat Warisan Budaya tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Pada pengelaran midang tahun ini Pj. Bupati OKI, Asmar Wijaya mengapresiasi dukungan masyarakat sehingga tradisi midang tetap lestari hingga kini.

"Tentu tradisi ini tetap terjaga berkat dukungan masyarakat. Antusiasme dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menjaga warisan leluhur," terang dia.

Kenalkan Adat Budaya ke Gen Z

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI Ahmadin Ilyas mengatakan rangkaian Midang tahun ini dirangkai dengan perlombaan cang-incang.

lombaan Cang Incang, maka akan ada generasi penerus yang akan terus melestarikan tradisi turun-temurun asli Kayuagung," ujar Ahmadin.

Madin menyebut rute kegiatan midang sendiri akan dilaksanakan di sepanjang aliran Sungai Komering.

Di hari pertama, midang bebuke diikuti oleh 6 Kelurahan dalam Kecamatan Kota Kayuagung antara lain, Kelurahan Kedaton, Perigee, Kayuagung Asli, Cinta Raja, Sida Kersa dan Tanjung Dancing. Sementara di hari ke 4 Idul Fitri akan diikuti kelurahan Kuta Raya, Sukadana, Paku, Mangun Jaya dan



Cang-incang merupakan salah satu jenis sastra lisan yang melekat dengan tradisi masyarakat Kayu Agung. Cang-incang biasanya ditampilkan dalam upacara perkawinan. Hingga kini tradisi ini masih kelihatan fungsinya baik di dalam kalangan masyarakat yang tinggal di dalam kota Kayu Agung maupun yang tinggal di kota lainnya.

"Harapan kami dengan adanya per-

Jua-Jua.

"Rute perjalanan dimulai dari Kelurahan Kayuagung Asli menuju ke Kedaton. Lalu menyebrang pakai perahu ketek menuju ke Jua-jua dan berkumpulnya di pendopo rumah dinas Bupati OKI, dirangkai dengan perlombaan cang-incang. Setelah itu barulah para peserta, dapat kembali ke kelurahan masing-masing," tutur Ahmadin. •



RUPIAH DIGEMPUR DOLLAR EKONOMI BISA AMBYAR

Mata uang Rupiah terus menunjukkan pelemahan atas Dollar Amerika Serikat hingga menembus Rp16.300. Pelemahan ini dipastikan akan berdampak terhadap kondisi ekonomi di Tanah Air.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku akan berkolaborasi secara erat dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghadapi dampak gejolak geopolitik dan ekonomi global, terutama terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS.

"Kami harus memastikan bahwa stabilitas makro berlanjut untuk terkelola. Dari sisi fiskal dan moneter, kami bekerja sangat erat dengan Gubernur BI Perry warjiyo untuk menyesuaikan posisi makro demi beradaptasi dengan level baru dari tekanan yang ada," ujar Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan IMF-Bank di Washington, AS, 19 April 2024. Sri Mulyani menekankan, binasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengelola bilitas

makro yang hati-hati akan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, kata dia, BI perlu menetapkan kebijakan suku bunga acuan demi meredam volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Dalam kasus ini, BI tentu harus menetapkan kebijakan suku bunga acuan untuk merespons nilai tukar rupiah. Untuk kami dari sisi fiskal, kami harus memastikan bahwa anggaran bisa memainkan peran sebagai peredam gejolak secara efektif dan kredibel," tegas Sri Mulyani.

Di satu sisi, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan perlu memastikan bahwa defisit anggaran harus berada di bawah 3 persen sesuai aturan undang-undang. Di sisi lain, pihaknya juga perlu lebih selektif untuk melakukan belanja negara.

"Kami juga perlu memastikan bahwa pendapatan negara meningkat,

terutama di tengah penguatan dolar, karena pendapatan kami sebagian berasal dari valas, yang juga bisa berguna dari cara yang paling optimal," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan pergerakan dari nilai tukar berdampak pada banyak indikator ekonomi dan keuangan Indonesia. Dari sisi ekspor, pendapatan akan menjadi jauh lebih baik, karena mereka akan menerima mata uang lokal lebih banyak.

"Tapi dalam beberapa kasus, kami bergantung pada beberapa impor, dan hal itu akan membutuhkan rupiah lebih banyak untuk menjadi dolar dan akan terjadi imported inflation, juga berdampak pada inflasi di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Maka itu, dia menegaskan Indonesia harus sangat hati-hati, terutama karena pergerakan datang dari kebijakan negara-negara maju, khususnya kebijakan Amerika Serikat. Negara-negara berkembang tentu harus benar-benar waspada dengan perkembangan ini.

Kendati demikian, Bendahara Negara meyakini struktur makro ekonomi Indonesia masih kuat dan tahan terhadap krisis, seperti halnya yang telah dilewati ketika krisis finansial global beberapa waktu lalu.

"Tapi apa yang telah kami lakukan sejak krisis finansial asia dan global banyak exercise yang sudah kami lakukan untuk menangani krisis. Dalam pandangan ekonomi, kami memiliki struktur yang kuat dan resilient untuk menghadapi krisis," papar Sri Mulyani.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan,

Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati

pihaknya memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat untuk menahan laju pelemahan rupiah yang terjadi pasca libur panjang lebaran 2024.

"Fundamental ekonomi kita baik. Namun sebelum dan selama libur lebaran ini benar-benar terjadi beberapa perubahan di dunia internasional," kata Suahasil.

Selama libur lebaran di Indonesia, kata Suahasil, inflasi Amerika Serikat diumumkan dan angkanya lebih tinggi dari ekspektasi pasar serta para analis. Proyeksi penurunan suku bunga acuan Bank Sentral AS atau The Fed pun menjadi semakin mundur atau higher for longer, sehingga mendorong penguatan indeks dolar AS.

Kemudian, pelemahan rupiah juga dibayangi oleh konflik geopolitik yang memanaskan antara Iran dan Israel pada Sabtu, 13 April 2024.

"Setelah libur Lebaran dibuka di Selasa (16/4), kemudian terjadi beberapa perubahan. Kita melihat bahwa dalam dua hari ini telah mereda, tentu kita berharap tidak terjadi eskalasi konflik di global," kata Suahasil.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengamati dan mencermati perkembangan situasi global. Suahasil juga menekankan pentingnya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memantau kondisi ekonomi dan melihat titik-titik yang memastikan stabilitas sistem keuangan nasional.

"Kami juga melihat seluruh lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, dan yang lainnya masih tetap berjalan dengan sangat baik dan kami lanjutkan pemantauan atas stabilitas tersebut bersama tentu bersama Kemenko Perekonomian," kata Suahasil.

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, keputusan untuk membeli dolar AS saat rupiah sedang melemah sebagai sesuatu yang tidak bijaksana.

"Kalau situasi dolar sedang menguat, tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar AS," kata Airlangga.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat menjawab pertanyaan awak media terkait seruan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang meminta BUMN untuk memborong dolar AS. Sebelumnya, Erick mengatakan bahwa BUMN yang terdampak pada bahan baku impor serta BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam

meredam volatilitas kurs rupiah juga perlu didukung oleh semua pihak. Di samping tidak membeli dolar, Airlangga juga meminta seluruh pihak untuk menahan impor yang bersifat konsumtif.

"Jadi dengan tools yang ada, sebetulnya (kurs rupiah) relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif, ditahan-tahan dulu dalam situasi seperti ini," kata dia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, juga sepakat dengan pernyataan Airlangga. Dia berharap, para pemangku kepentingan bisa menahan impor konsumtif di saat kurs rupiah bergejolak. Suahasil juga mengimbau agar para eksportir bisa membawa pu-



Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara

waktu singkat.

Di samping itu, Erick juga meminta BUMN untuk melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Untuk meredam volatilitas nilai tukar rupiah, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah memang telah memiliki instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor (DHE) untuk ditanam di dalam negeri. Dengan instrumen-instrumen yang ada, termasuk DHE, kurs rupiah sebetulnya relatif terkendali.

Meski begitu, instrumen untuk

lang DHE ke Indonesia, sehingga akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Terkait hal ini, pemerintah telah memiliki aturan yang memastikan agar DHE bisa dibawa pulang ke dalam negeri, terutama dari beberapa sektor seperti sektor ekstraktif, sektor pertanian, dan sektor perkebunan.

"Memang sudah sesuai dengan aturan ditaruh di dalam negeri, itu ditaruh di dalam negeri untuk periode waktu tertentu. Dan kalau ditaruh dalam negeri lebih panjang, itu ditaruh dalam bentuk deposito, pajaknya itu kita bebaskan," kata Suahasil. ●



MENANTI AWAL BARU JOKOWI-PRABOWO-MEGA

Hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memanas efek dari perbedaan pilihan saat Pemilu 2024. Kini, Istana dikabarkan tengah mengatur pertemuan antara kedua tokoh tersebut dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriyah.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, pihaknya masih menimbang momen yang tepat untuk mengatur pertemuan dua tokoh tersebut.

"Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagipula ini masih di Bulan Syawal. Bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari, Jumat, 12 April 2024.

Ari mengatakan, Presiden Jokowi terbuka dengan semua kalangan, baik tokoh bangsa, kerabat hingga masyarakat umum. "Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa," ujar Ari.

Pada Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada 10 April 2024, Presiden Jokowi dan Megawati diketahui mengadakan open house secara terpisah. Jokowi mengadakan open house di Istana Kepresidenan. Sedangkan, Megawati membuka rumahnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat hanya

u n t u k

tamu undangan.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, Jokowi sudah memiliki jadwal kegiatan lain, yaitu bersilaturahmi dengan anak-cucu. "Kenapa tahun ini Presiden tidak melakukan kunjungan silaturahmi atau halal bihalal dengan Bu Mega? Jawaban saya satu, ini soal waktu," kata Ngabalin.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, pemilihan waktu untuk mempertemukan Megawati dengan Presiden Jokowi lebih baik ditanyakan langsung kepada Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

Selain itu, dia juga menilai Lebaran merupakan momentum untuk melakukan silaturahmi dan halal bihalal. Namun, anak ranting partai berlambang banteng moncong putih itu meminta agar hal itu ditunda terlebih dulu.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati





Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana Pemilu 2024," jelasnya.

Tinggal Tunggu Waktu

Politisi senior Partai Golkar, Idrus Marham, melihat Idul Fitri 1445 H menjadi momentum cairnya situasi politik di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari silaturahmi antara Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid.

Ia sendiri hadir dalam acara yang mempertemukan dua ketua tim kampanye pada Pilpres 2024 itu. Menurutnya, hal tersebut akan membuka pertemuan-pertemuan lain antara pihak-pihak yang sebelumnya berlawanan pada kontestasi nasional.

"Nah, ini kan contoh teladan, boleh berbeda dan bahkan pada waktu itu perdebatannya ada pada masalah ideologi. Ya pada masalah ideologi, sekalipun perbedaan, tetapi dalam pertemanan dan kemanusiaan tetap

jalan," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 12 April 2024.

Idrus yakin, akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekar-



Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicari-kari waktu yang tepat. Lagipula ini masih di Bulan Syawal. Bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi.

noputri. Termasuk juga pertemuan antara Megawati dengan Presiden Jokowi.

"Saya ingin mengatakan begini, tokoh-tokoh tersebut ini hanya per-

soalan waktu saja. Persoalan momentum saja," ujar Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar itu.

Indonesia, kata Idrus, pernah memiliki pengalaman di mana tokohnya memiliki perbedaan ideologi. Salah satunya adalah antara Soekarno dengan Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, tetapi keduanya tetap memiliki pertemanan yang baik.

"Oleh karena itu, saya punya keyakinan hanya masalah waktu dan hanya masalah momentum tokoh-tokoh ini, utamanya Prabowo dengan Mbak Mega itu pasti ketemu," ujar Idrus.

Idrus optimistis pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan segera terwujud. Bahkan, ia yakin komunikasi informal sudah terjalin lewat Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan pimpinan DPR.

"Saya berulang kali berkelakar, boleh jadi kita nggak tahu kita, jadi komunikasi melalui siapa-siapa. Apalagi misalkan di DPR, Mbak Puan dan Mas Dasco selalu ketemu di situ dan sama-sama duduk, saya punya keyakinan haqul

yakin pasti punya canda-candaan politik juga,” kata Idrus.

Ia sendiri pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo pada Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo kerap menyampaikan hubungan baiknya dengan Ketua Umum PDIP itu.

“Ketika dulu saya ketua koalisinya, Pak Prabowo selalu mendorong-dorong kok untuk ketemu.

Apalagi sekarang, beliau sendiri sudah jadi presiden terpilih, pasti, pasti (akan bertemu Megawati),” ujar Idrus.

Idrus menilai adanya sejumlah alasan mengapa kedua tokoh tersebut belum bertemu.

Pertama adalah suara dari pendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang perlu dijaga terlebih dahulu.

“Mereka harus tetap melakukan komunikasi politik secara intensif dengan para pendukungnya dari rakyat. Harus merawat suasana kebatinan mereka. Sebab kalau tidak merawat suasana kebatinan secara serta merta,

pendukung-pendukungnya itu pasti memvonis bahwa pimpinan ini dari partai ini tidak boleh dipercaya karena mengkhianati aspirasi kami.

Nah ini kan perlu dirawat,” ujar Idrus.

Kedua adalah pertimbangan politik praktis.

Sebab dalam kubu pengusung Ganjar-Mahfud, terdapat pula Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

“Kalau gabung misalkan seperti apa? harmonisasinya seperti apa? dan lain-lain, dan sebagainya, polanya seperti apa. Nah ini semua pertimbangan-pertimbangan politik praktis yang belum tuntas, sehingga momentumnya belum ada,” ujar Idrus.

Terakhir adalah proses sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah adanya putusan terse-



Nah, ini kan contoh teladan, boleh berbeda dan bahkan pada waktu itu perdebatannya ada pada masalah ideologi. Ya pada masalah ideologi, sekalipun perbedaan, tetapi dalam pertemanan dan kemanusiaan tetap jalan.

but, ia yakin akan ada perkembangan signifikan terkait wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati.

“Ini semua pertimbangan-pertimbangan yang harus dijadikan dasar untuk menentukan, apakah sudah timingnya atau momentumnya sudah tepat, atau tidak. Karena kalau bicara strategi politik itu bukan bicara salah benar, tapi bicara efektif atau tidak efektif,” ujar mantan sekretaris jenderal Partai Golkar itu.

Pengalaman SBY

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan Presiden Jokowi bisa bernasib sama dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni dalam hal kesulitan mendapat-



Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

kan maaf dari Megawati Soekarnoputri.

Ujang menyebut sejak 2004, SBY sampai sekarang tidak kunjung mendapatkan maaf dari Mega lantaran dinilai telah berkhianat. Dan apa yang dilakukan Jokowi terhadap Megawati dinilai lebih parah ketimbang SBY. Jokowi dan keluarganya selama ini telah mendapatkan banyak keistimewaan dari Mega dan PDIP, tapi di Pemilu 2024 justru membelot.

"Yang sulit adalah pertemuan antara Jokowi dengan Megawati, karena akan semakin panjang akan semakin berat karena mungkin PDIP atau Megawati kecewa dengan Jokowi. Bisa jadi hubungan Jokowi dengan Megawati akan lama, akan panjang untuk bisa memaafkan satu sama lain," kata Ujang, Jumat, 12 April 2024.

Peluang Megawati akan berdamai atau minimal mau bertemu Jokowi menurut Ujang tergantung peranan Prabowo sebagai mediator atau penengah. "Lihat nanti peran Pak Prabowo. Sebagai presiden terpilih apakah bisa mendamaikan keduanya Mega dengan Jokowi," ucap Ujang.

Tapi bila membandingkan rasa sakit

hati Mega terhadap SBY, Ujang menyebut akan sulit bagi Jokowi mendapatkan maaf dari Megawati. SBY tahun 2004 lalu yang notabene tidak separtai dengan Mega bisa dijaui Mega selama 20 tahun lebih lantaran hanya dianggap berkhianat sebagai mantan anggota kabinetnya.

Sedangkan, Jokowi adalah tokoh yang murni lahir dan dibesarkan PDIP, sehingga diyakini akan butuh waktu lebih lama bagi Jokowi bisa berbaikan seperti dulu lagi dengan Presiden RI ke lima itu.

Ujang juga menyebut peluang pertemuan antara Prabowo dengan Megawati lebih terbuka baik se usai lebaran ataupun usai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2024 pada 22 April nanti.

Ujang menyebut sudah banyak informasi beredar dari internal PDIP, bah-

wa Megawati mengutus putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk bertemu dengan Prabowo. Di mana Puan menurut Ujang

bahwa Puan mewakili Megawati untuk menggelar pertemuan dengan Prabowo.

"Saya optimistis melihat kalau pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terjadi. Kan itu diawali pertemuan

Prabowo dengan Puan

dan PDIP sudah mengkonfirmasi bahwa Puan diutus Megawati untuk bertemu dengan Prabowo," kata Ujang.

Ujang menyebut peluang komunikasi Megawati atau PDIP dengan Prabowo sangat besar lantaran Prabowo dinilai bukan sosok yang pernah berkhianat kepada Mega. Beda dengan sikap Megawati terhadap Presiden Jokowi lantaran PDIP dan Mega sudah merasa dikhianati oleh keluarga Jokowi.

Sehingga rekonsiliasi antara Gerindra dengan PDIP diprediksi akan berjalan mulus. Namun pasca rekonsiliasi apakah PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak, menurut Ujang masih menjadi tanda tanya. Karena bisa saja PDIP tetap berada di jalur oposisi.

"Tergantung soal pilihan PDIP masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran itu hak PDIP, mau jadi oposisi itu jadi suatu hal yang bagus aja," ucap Ujang.

Lagi pula Ujang memerhatikan PDIP lebih kuat dan keras ketika berada di oposisi ketimbang di dalam pemerintahan. Hal itu terlibat dari sepaik terjeng partai banteng dalam dua dekade terakhir. Pada 2004-2014, PDIP yang berposisi terhadap pemerintahan SBY begitu lantang meneriakkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun setelah berkuasa 10 tahun bersama pemerintahan Jokowi 2014-2024, PDIP dinilai tidak mampu berbuat banyak. •



Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin.



Politisi Senior Partai Golkar, Idrus Marham.

TIMAH

Gunawan Effendi

Hai, jangan mengira orang Bangka Belitung tak tahu menahu soal korupsi timah. Sebut saja dua orang ini: Teddy Marbinanda dan Akhmad Elvian. Jauh hari sebelum Kejaksaan Agung menyingkap kasus hingga menjadi perkara korupsi timah, Teddy dan Elvian sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana Babel lebih banyak terluka ketimbang bahagia oleh kekayaan logam yang setiap smart-phone memerlukannya, meski hanya sekitar 7 gram saja.

Kesamaan Teddy dan Elvian adalah catatan-catatan rinci mengenai timah di kampung halamannya. Perbedaannya, Teddy mencatat perkembangan mutakhir tentang politik ekonomi timah, sedangkan Elvian menyelami riwayat timah dari masa ke masa.

Harap maklum, Elvian sangat produktif menulis dan membukukan aneka ragam sejarah Babel. Jadi, bukan hanya timah. Jangan kaget juga jika sudah bertemu Elvian, satu tas buku-buku tulisannya menjadi cendera mata bagi tamunya. O ya, Elvian pun bergelar Dato, melekat dengan Anugerah Kebudayaan Indonesia yang pernah ia terima.

Dato Akhmad Elvian mencatat, sejak di bawah kendali Kesultanan Palembang Darussalam, Hindia Belanda, hingga sekarang, timah praktis hanya dinikmati oleh segelintir pihak, dalam hal ini elite penguasa tentunya. Berkat timah, kata Elvian, Sultan Palembang sempat menjadi salah satu raja Melayu terkaya dengan jejak keraton megah dalam Benteng Kuto Besak dan bisa membangun Masjid Agung Palembang.

Akan halnya Hindia Belanda, masih kata Elvian, selama periode kekuasaan di Bangka pada awal Abad XIX hingga pendudukan Jepang, tak kurang dari satu juta ton timah Babel menyumbang kekayaan Kerajaan Oranye itu. Termasuk untuk membiayai bendung laut (dam) kota-kota Amsterdam dan Rotterdam. Sebaliknya, ungkap sejarahwan dan budayawan Babel ini, Bangka semakin terendam. Boleh jadi terendam itu metafora tentang banyaknya kolam-kolam sisa penambangan timah yang biasa disebut kolong.

Toh kata Elvian, baik Kesultanan Palembang maupun Hindia Belanda masih menyisakan warisan bermanfaat bagi warga Babel. Mulai dari masjid, infrastruktur, dan juga sistem sosial yang relatif harmonis bagi warga setempat yang beragam. Pasca Indonesia merdeka, lanjut Elvian, praktik monopoli

di era kesultanan dan kolonial terus diterapkan. Selanjutnya, setelah Reformasi 1998, masyarakat mendapat kesempatan menambang langsung. Ternyata, petaka baru yang datang, selain ketimpangan manfaat antara warga dan elite pengusaha yang menguasai jalur perdagangannya. Beriringan dengan itu, julukan Bangka sebagai penghasil lada semakin surut dan tak pernah disebut-sebut lagi.

Nah, pada titik inilah catatan-catatan Teddy menjadi sangat relevan. Secara rutin, Teddy melalui lembaganya, Babel Resource Institute (BRINST), mengungkap bagaimana perusahaan-perusahaan swasta pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menganggangi PT Timah Tbk. Padahal Badan Usaha Milik Negara PT Timah Tbk memiliki IUP terluas, mencakup Babel dan Kepulauan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, tetangga sebelah Babel, Kepulauan Riau.

Pada Oktober 2023 lalu, Teddy menyoroti peran pengepul atau penampung bahan baku bijih timah yang disebut Elvian sebagai kolektor. Para kolektor inilah yang memiliki smelter (pel-ebur) timah yang menghasilkan logam siap ekspor. Dari 10 pemegang IUP timah terbesar, yang terbesar adalah BUMN PT Timah Tbk. Dia bilang, berdasarkan data, ekspor timah pada 2022 saja mencapai 74.408 Metrik Ton dengan rincian 19.825 MT oleh PT Timah Tbk dan 54.255 MT private smelter. Pada semester I 2023, PT Timah Tbk selaku pemilik konsesi terbesar di Indonesia mengekspor 8.307 MT timah, sedangkan smelter swasta mengekspor 23.570 MT. Pada semester I-2023 berdasarkan data hingga Juni 2023 yang diolah BRINST dari Kementerian Perdagangan, ekspor timah dari Indonesia mencapai 31.876,55 MT. Sebagian besar ekspor tersebut berasal dari smelter swasta.

Sekitar 100 hari setelah Teddy mengungkapkan data ekspor tadi, Kejaksaan Agung mulai menyingkap beberapa perusahaan smelter itu terlibat persekongkolan bersama direksi PT Timah Tbk. Berlanjut dengan penetapan para tersangka yang hingga awal April 2024 tercatat berjumlah 16 orang. Sebagian besar adalah bos-bos yang terafiliasi dengan perusahaan pemegang IUP timah yang dicatat Teddy.

Kelak akan menjadi catatan pula apakah pengungkapan itu menjadi successful story atau malah tragedi. Tragedinya, segala kerusakan terkait dengan timah Babel tak pernah menghasilkan manfaat setimpal bagi warganya. ●

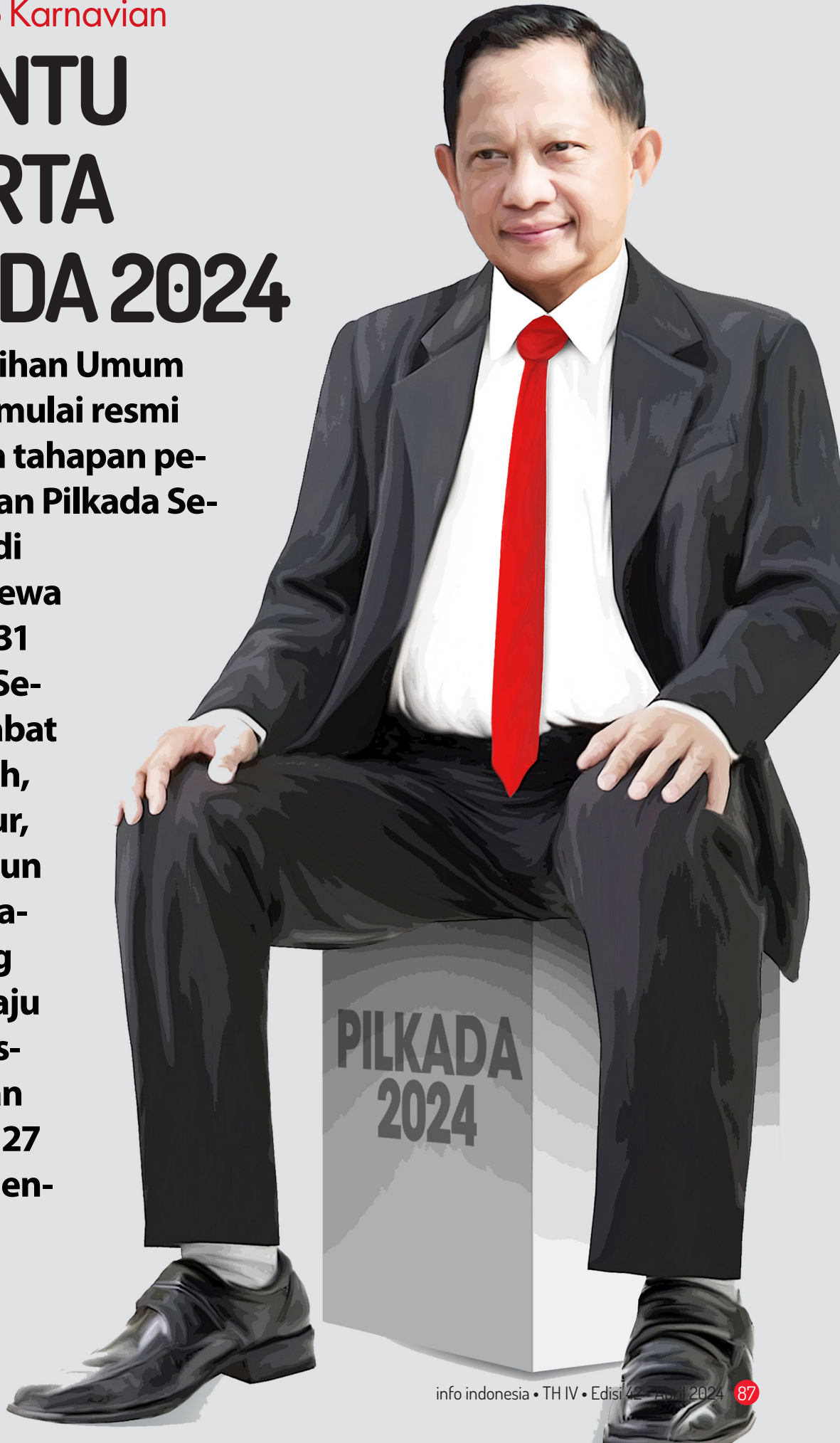




Mendagri Tito Karnavian

PENENTU PESERTA PILKADA 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, 31 Maret 2024. Sejumlah pejabat kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota digadang-gadang bakal ikut maju dalam kontes-tasi yang akan digelar pada 27 November mendatang.



Meski bisa maju dalam Pilkada 2024, para penjabat kepala daerah punya risiko yang harus dihadapi. Mereka yang berniat maju harus berani menanggalkan jabatan sebagai abdi negara yang sudah diembannya sejak puluhan tahun demi berebut posisi orang nomor satu, baik di level provinsi atau kabupaten/kota.

Penjabat kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah. Sehingga, jangan menggunakan jabatan untuk politik praktis.

"Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," tegas.

Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang

Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1). Menurut Mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk



Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, penjabat harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti Pilkada 2024.

"Penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," tegas Tito Karnavian dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama penjabat kepala daerah seluruh Indonesia, Kamis, 28 Maret 2024.

Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan pada 1 Juli 2016.

Pada Pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Menurut Tito, rapat kerja digelar Kementerian Dalam Negeri guna optimalisasi kinerja penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota, menyangkut isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pilkada, serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Penjabat kepala daerah terancam

sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak,” ujar Tito.

Anggaran Pilkada

Mantan Kapolri itu juga meminta penjabat kepala daerah segera penuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di masing-masing daerah. Dia menyebutkan, pemenuhan anggaran ini perlu dilakukan secara tepat waktu ka-



rena pihak penyelenggara harus menjalankan sejumlah tahapan.

Mendagri menekankan anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan 60 persen APBD Tahun 2024. Dirinya telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran terse-

but sejak Januari 2023 melalui surat edaran.

“Hampir semua (daerah) sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.

Lebih lanjut, Tito mendorong penjabat kepala daerah agar segera menghitung

cuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Larangan ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Dirinya meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.

Larangan Mutasi Pejabat

Tito juga mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, ke-

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pada ayat lima (5) dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa apabila gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan sanksi untuk yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis



Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada.

Menteri Dalam Negeri terdiri dari:

Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, memimpin satuan/unit kerja. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan kepala Puskesmas dan kepala sekolah. Penggantian pejabat diatas selain mendapatkan izin Mendagri juga harus melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antarjabatan dan/atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan. Uji kompetensi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri PAN

dan RB Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun.

Terkait dengan angka 1 (satu) di atas, sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Untuk pengisian jabatan kepala sekolah, syarat dan mekanismenya mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021.

Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2893/SJ, tanggal 11 Mei 2018. Hal Persetujuan tertulis pengangkatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar

mempedomani surat Mendagri Nomor 800.1.3.3/4142/SJ tanggal 7 Agustus 2023 tentang Hal Moratorium Penggantian/Mutasi Pejabat JPT Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam SE juga mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tujuh hari kerja, terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian.

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri sudah menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024.

"Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien," kata Ketua Bawaslu, Rahmat



Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik

Bagja, dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 April 2024.

Pihaknya juga menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024," jelas Bagja.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, menyebutkan, kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat jelang Pilkada 2024 berpotensi akan disanksi karena melanggar administrasi pemilu.

"Itu pasti masuk dugaan pelanggaran ya yang sifatnya administrasi pemilu," ujar Lolly.

Menurut Lolly, Bawaslu nantinya menjadi pihak yang dapat memeriksa hal tersebut. Peringatan Bawaslu itu mempertimbangkan dampak yang luas dari mutasi atau penggantian pejabat daerah jelang pemungutan suara. Dengan demikian, Bawaslu menegaskan agar kepala daerah atau penjabat kepala daerah tidak melakukan hal tersebut.

"Potensi dugaan pelanggaran administrasinya akan besar," ucap dia.

Di sisi lain, KPU juga telah mengeluarkan aturan baru terkait calon anggota legislatif terpilih yang akan maju pada kontestasi Pilkada tahun 2024. Legislator terpilih itu diwajibkan mengundurkan diri jika akan maju atau mencalonkan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota nantinya.

Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, menjelaskan, hal ini telah ditetapkan dalam UU Pilkada. Calon anggota terpilih yang dilantik wajib mengundurkan diri pada saat dicalonkan menjadi bakal

paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Idham mengatakan hal itu sesuai dengan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Tahun 2016. Pasal tersebut berbunyi bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: anggota legislatif tersebut menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan

Pilkada serentak bakal digelar pada 27 November 2024. Pilkada ini digelar setelah Pemilu 2024, di mana calon anggota legislatif terpilih sudah ditetapkan lewat rekapitulasi oleh KPU.

Para caleg terpilih itu akan dilantik pada Oktober 2024. Sementara, masa pendaftaran calon kepala daerah bakal dimulai pada Agustus dan penetapan pasangan calon dilakukan pada September.

Pengamat Sosial dan Politik Sumatera Selatan, M Haekal Al Hafafah, mengatakan, perbedaan keputusan antara saat

Pilpres dan Pilkada tentu menimbulkan debat. Terutama mengingat persaingan politik yang masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat.

Dalam pandangan Haekal, keputusan ini sebenarnya positif dalam konteks demokrasi. Hal ini memberikan ruang yang lebih lebar bagi sirkulasi elit politik di level legislatif. Namun, dia juga menyoroti bahwa kecenderungan politik tidak selalu bisa dipahami secara linier.

Dia menekankan bahwa keputusan ini dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan legislatif. Dalam konteks ini, keputusan tersebut menjadi pengingat bagi calon kepala daerah untuk mempertimbangkan secara matang risiko yang mungkin timbul jika mereka memutuskan untuk maju dalam Pilkada.

Haekal juga menyoroti bahwa ada pihak yang menolak atau tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Mereka cenderung ingin mempertahankan pengaruh politik mereka, bahkan jika mereka kalah dalam Pilkada.

"Secara keseluruhan, saya melihat keputusan Mendagri ini sebagai langkah yang dapat membantu memperkuat demokrasi lokal dengan mengurangi potensi oligarki politik di tingkat partai," ujarnya. •



Anggota Bawaslu,
Lolly Suhenty

JANGAN ADA BANSOS DI ANTARA PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tinggal menghitung bulan. Berkaca pada Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu yang menjadi sorotan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan, bansos menjadi salah satu poin pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.

"Iya, pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu ya," kata Bagja di

Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu, 21 April 2024.

Selain bansos, Bagja mengatakan bahwa aspek kendala geografis, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan implementasi program pemerintah akan menjadi poin-poin pengawasan dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang.

"Dan juga misalnya, sekarang kami berharap kepada para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri, sampai dengan enam bulan Pilkada selesai," ujarnya.

Selain itu, Bagja mengatakan Pilkada 2024 berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya.

"Pilkada kemarin (2020) tidak bisa dibandingkan karena COVID-19, agak berbeda. Jadi kalau pilkada kemarin tentu akan berbeda sekali dengan pe-

nyelenggaraan pilkada pada saat ini," kata Bagja.

Bagja lantas menjelaskan bahwa alasan lain yang membuat Pilkada Serentak 2024 berbeda dengan yang lalu adalah mengenai jumlah wilayah yang menyelenggarakan pemilihan.

"Kenapa? Karena seluruh daerah melakukan pemilihan kepala daerah. Kalau dulu ada 270 (daerah), sekarang semuanya melakukan pemilihan kepala daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa koordinasi berjenjang yang dilakukan Bawaslu akan diperkuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.

"Sumber daya juga harus diperkuat. Kenapa? Karena misalnya ada sumber daya manusia kita berkurang itu harus dipikirkan untuk pengisian terhadap sumber daya manusia tersebut," ujarn-



ya.

Selain itu, ia menyebut rentang kendali antara Bawaslu RI dengan Bawaslu daerah juga harus semakin baik untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.

"Ini yang harus diperkuat karena sekarang udah enggak bisa lagi daerah yang lain bantuin. Ini enggak bisa. Sekarang semua melakukan pemilihan kepada daerah, kecuali Bawaslu Republik Indonesia sebagai penanggung jawab terakhir," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tidak ada lagi penyaluran bansos menjelang Pilkada 2024. Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini mengusulkan ada suatu aturan yang melarang penyaluran bansos menjelang pemilu, termasuk pilkada.

Usul tersebut mengacu pada kondisi maraknya anggaran hibah maupun penyaluran bansos menjelang waktu-waktu pemilihan pemimpin baik daerah maupun nasional.

"Kita ketahui menjelang pilkada atau tahun pemilihan kepala daerah coba bapak-ibu cek apakah ada anggaran, hibah atau bansos yang naik?" kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Kantor KPK, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

"Cek, bandingkan dengan tahun sebelumnya dan ya saya sih berharap ada Perda (Peraturan Daerah) atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada," sambungnya.

Menurut dia, aturan penyaluran bansos tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas pilkada. Sebab, berdasarkan survei KPK, banyak masyarakat yang memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau nasional karena faktor uang.

Ia bercerita ada warga yang merupakan tetangganya mendapat lima hingga enam amplop dengan total Rp1 juta saat Pilpres lalu.

"Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan menjelang pilpres banjir bansos dan masyarakat senang sekali. Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi sesuai dengan survei

kami di KPK bahwa preferensi memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara, yang pertama-tama faktor uang," ungkap Alex.

"Itu yang terjadi. Makanya menjadi program MCP untuk tahun 2024 itu memantau terhadap anggaran hibah, bansos, dan pokir (pokok pikiran)," tegasnya.

bali teman-teman di daerah, seperti yang Pak Pimpinan KPK sampaikan," ujar Tomsu.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Kemendagri tidak menerbitkan aturan yang bersifat mengikat seperti Peraturan Daerah (Perda) karena imbauan bisa diterobos kepala daerah, Tomsu berkilah. Menurutnya, Kemendagri



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy



Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsu Tohir

Sejalan dengan imbauan KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsu Tohir, menyatakan pihaknya akan menerbitkan imbauan agar pemerintah daerah tidak menggelontorkan bansos menjelang Pilkada 2024.

"Jadi imbauan-imbauan akan kita lakukan ya untuk mengingatkan kem-

tidak bisa masuk ke ranah peraturan daerah.

"Itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya, kalau kami di pusat kan ada proses yang panjang," tutur Tomsu.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai usulan KPK yang meminta agar Kemendagri membuat peraturan daerah untuk mel-

arang bagi-bagi bansos jelang pilkada tidaklah efektif.

Menurut Agus, seharusnya KPK langsung bergerak dan bertindak ketimbang sekadar memberi imbauan, apalagi meminta untuk membuat perda baru. Apabila KPK telah mencium tanda-tanda korupsi dari penyalahgunaan anggaran bansos sejak pemilu lalu, harusnya KPK bisa langsung me-

sedikit oke, ini jumlahnya besar. KPK tinggal menyelidiki saja. Jangan buang badan seperti itu. Sudah tidak ada gunanya. Sudah jelas di depan mata kok," kata Agus, Sabtu, 23 Maret 2024.

Agus juga menyampaikan usulan untuk membuat perda baru untuk melarang politisasi bansos hanya berujung pada buang-buang anggaran. Merancang sebuah peraturan perlu mema-

an itu kan Kemensos. Tetapi Kemensos dananya tidak begitu besar. Itu sudah jelas menyalahi aturan, sudah saja ditindak. Kalau ditunggu aturan lagi, kapan mau dijalani?" tegasnya.

Agus menuturkan penjabat gubernur akan kesulitan menerbitkan perda larangan bagi-bagi bansos. Hal itu mengingat pembuatan perda harus berkomunikasi melalui DPRD.

"Kalau mau dibikin juga perdanya, ya bikin saja coba. Tapi apa iya berani itu semua Pj gubernur? Tidak berani pasti. DPRD-nya juga. Kalau minta perda, harus minta ke DPRD. Sudah lah, pokoknya diumumkan saja. KPK bilang, itu harus sesuai anggaran, anggaran daerahnya berapa. Tinggal diselidiki," terangnya.

Kurang Bijak

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyebut usulan KPK yang meminta agar Kemendagri membuat peraturan daerah untuk melarang bagi-bagi bansos jelang pilkada kurang bijak.

"Jadi untuk Bansos itu, semuanya mestinya tidak ada alasan untuk menghentikan. Karena itu sudah ada regulasinya dan sudah ada targetnya. Misalnya targetnya untuk menangani masalah kemiskinan, menekan kelaparan. Masa lapar boleh ditunda? Karena sambil menunggu Pilkada. Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak. Harus dibedakan. Skema antara bansos dan perlinsos itu," kata Muhadjir Effendy kepada wartawan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2024.

Muhadjir mengatakan harus dibedakan antara skema bansos dan klaster perlindungan sosial (perlinsos). Menurutnya, sudah ada regulasi terkait pemberian bansos yang disalurkan by name by address.

"Harus dibedakan antara perlinsos dan bansos. Dana Rp497 triliun itu bukan bansos, itu perlinsos. Memang di dalamnya ada bansos, tapi bansos itu kecil. Nilainya misalnya yang ada di Kemensos itu hanya Rp97 triliun. Kalau ditambah yang lain itu tidak sampai Rp150 triliun. Sisanya itu adalah dalam bentuk jamsos, jaminan sosial,



Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata



Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja

nyelidiki dan mencegah agar politisasi bansos di pilkada tidak terulang seperti di pemilu.

"Sudah jelas melanggar, itu uang dari mana? KPK cari dong. Kan bisa, langsung saja cari dari mana parpol-parpol dapat uangnya. Kenapa dibilang bansos ada cap istana, ada warna parpol, dari mana itu dapatnya? Kalau jumlah

kan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

"Menurut saya, buang-buang tenaga, buang-buang anggaran lagi. Kalau pun jadi, seperti apa? Isinya sama? Sekarang yang pemberian gratifikasi kepada masyarakat yang tidak berdasarkan pencanangan APBN, yang berhak menyalurkan kalau ada bantu-

dan subsidi. Dan yang paling banyak itu subsidi. Mulai subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk. kemudian subsidi LPG 3 Kg, subsidi bunga KUR, subsidi bunga PNM. Jadi itu aneka subsidi, itu yang paling banyak. Dan itu bukan bansos, karena penikmatnya adalah masyarakat hampir umum,” kata Muhadjir.

“Bansos itu ada regulasinya loh. Misalnya PKH itu kan tiap 3 bulan sekali, masa itu harus disetop? Kemudian bantuan pangan, itu kan juga ada regulasinya, siapa targetnya siapa, dan seterusnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan pengawasan Pilkada harus diperketat oleh KPK, BPK dan inspektorat lainnya agar tak ada yang disalahgunakan. Meski demikian, dia menyebut banyak persepsi mengenai bansos dalam proses Pemilu.

“Tetapi kalau by name by address gimana cara menyalahgunakannya? Saya kok tidak yakin ya itu bisa dilakukan. Saya kira hanya persepsi saja bahwa ini bansos ini kok kelihatannya sangat besar pengaruhnya itu di dalam proses Pemilu ini. Itu saya melihat lebih banyak persepsi. Memang ada itu, harus diakui, tapi itu kan bagaimana masyarakat menilai,”

Di sisi lain, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menjabarkan soal mekanisme penyaluran bansos yang sudah melalui mekanisme yang panjang.

“Bansos itu melalui proses panjang. Bukan ujug-ujug. Ada karena ini penggunaan anggaran APBN, jadi ada proses yang intinya bansos itu dijalankan sesuai mekanisme,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret

2024.

la meminta semua pihak membangun kesadaran bahwa ada situasi sulit yang dihadapi masyarakat meski momentumnya penyalurannya dinilai tidak tepat, yakni saat masa-masa Pemilu.

“Situasi yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang hampir bersamaan itu memerlukan bantuan. Jadi mesti ini berpikirnya adalah berpikir yang lebih tegas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia memastikan, peran negara ada dua. Pertama, memastikan kesejahteraan dan kedua, memastikan keamanan. Untuk menjalankan peran menyejahterakan warga, yakni memberikan bantuan meski momentumnya dianggap tidak pas.

“Contoh lagi banjir, momentumnya momentum Politik, apa nunggu dulu ini bantuan? Padahal masyarakat sipil membutuhkan bantuan,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, setuju dengan KPK soal harus ada aturan terkait penyaluran bansos jelang Pilkada. Sebab, menurutnya, penyaluran bansos jelang Pilkada terindikasi untuk kepentingan politik.

“Sangat setuju karena terindikasi untuk kepentingan politik. Artinya penyaluran bansos dan bantuan-bantuan lain untuk

masyarakat dalam praktiknya dipergunakan untuk tujuan politik tertentu seperti pemenangan-pemenangan Pilkada dan sejenisnya,” kata Junimart, Rabu, 20 Maret 2024.

Junimart menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah membuat regulasi khusus terkait penyaluran bansos. Selain itu, perlu dibuat badan ad-hoc yang bertugas mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut jika sudah dibuat.

“Oleh karena itu, pemerintah pusat dan atau daerah harus membuat regulasi khusus pelarangan tentang itu termasuk sanksinya. Harus dibentuk juga badan ad-hoc pengawas yang khusus bekerja untuk efektifitas pelaksanaan regulasinya,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, juga meminta Pemerintah jangan mengartikan usulan KPK itu untuk membuat negara tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, negara harus menyalurkan bansos sesuai jadwal kebutuhan rakyat. Tidak bisa dimajukan menjelang Pilkada, menjelang Pilpres.

“Kalau dimajukan, ya habis saat itu juga. Kalau diberikan sesuai waktu, itu akan membantu masyarakat setiap bulannya,” ujar HNW, Jumat, 29 Maret 2024.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Obon Tabroni tidak setuju usulan menunda atau menghentikan sementara penyaluran bansos jelang Pilkada 2024. Menurut dia, tidak ada korelasi penyaluran bansos dengan Pilkada.

“Apalagi, sekarang sangat sedikit bupati, gubernur, wali kota incumbent. Masyarakat juga paham, bansos itu dari negara, bukan perorangan,” kata Obon. •



Wakil Ketua Komisi II DPR,
Junimart Girsang

CALON KEPALA DAERAH TAKUT DIKRIMINALISASI

Hiruk pikuk menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal digelar 27 November 2024 mulai terasa. Menjelang pengumuman pendaftaran calon, nama-nama yang disebut bakal maju di Pilkada mulai ramai diberitakan.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan banyak bakal calon kepala daerah dari partainya yang berpikir ulang untuk maju Pilkada 2024. Sebab, mereka khawatir kecurangan yang dianggap terjadi di Pilpres akan terulang saat pemilihan kepala daerah akhir tahun nanti.

Menurut Hasto, mereka pun jadi sangsi dengan kejujuran proses Pilkada setelah melihat apa yang terjadi di Pilpres. "Banyak yang mempersoalkan apakah Pilkada ini worth it atau tidak bagi mereka karena campur tangan alat-alat negara, sumber daya negara," kata Hasto, Rabu, 17 April 2024.

Hasto menyatakan beberapa aspek yang dikhawatirkan oleh para bakal calon kepala daerah adalah pengerahan aparat dan sumber daya negara. Di antaranya seperti menjadikan lembaga negara sebagai mesin penggalangan kekuatan melalui ancaman hukum.

Hasto berujar Pilpres 2024 telah mengakibatkan kerusakan yang kemudian menciptakan pesimisme terhadap Pilkada. "Banyak yang khawatir terjadi replikasi kecurangan yang terjadi di Pemilu ini," ucap politikus asal Yogyakarta itu.

Maka dari itu, Hasto menilai putusan sengketa Pilpres di

Mahkamah Konstitusi (MK) akan berpengaruh terhadap iklim demokrasi menjelang Pilkada. "Keputusan MK ini juga akan sangat menentukan siapa yang berani maju di Pilkada," ujarnya.

Hasto menyatakan peluang orang-orang yang kompeten untuk menjadi kepala daerah akan semakin tertutup jika MK mengabaikan begitu saja fakta-fakta kecurangan Pilpres.

"Menutup peluang orang-orang baik, termasuk dari kalangan perguruan

tinggi, dari kalangan yang tidak punya dana tapi ada modal politik yang kuat untuk maju," ujar Hasto.

PDIP juga disebut akan mengumpulkan sejumlah calon kepala daerah yang akan diusung setelah putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 dibacakan. Partai banteng itu akan membahas perihal Pilkada serentak akhir tahun ini dengan mereka.

Senada dengan apa yang disampaikan Hasto, mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim, juga menyatakan ragu untuk mencalonkan diri pada Pilgub Banten 2024. Ada sejumlah alasan yang membuat Wahidi ragu ikut berkompetisi di pilgub meskipun mempunyai track record yang baik.

Pria yang akrab disapa WH ini mengungkapkan alasannya untuk berpikir-pikir jika maju di Pilgub Banten nanti. Salah satunya, perilaku pemilih. Ia menyebut bahwa perilaku pemilih pada Pemilu 2024 sangatlah brutal dan pragmatis.

Ia menyebut Pemilu dan Pileg kemarin sangatlah brutal karena maraknya politik uang dalam kontestasinya.

"Saya lihat survei dulu, karena posisi pilkada tidak lepas dari efek pemilu kemarin yang brutal, yang banyak menghabiskan uang. Saya orangnya hemat, efisiensi. Saya hitung dulu," kata

Wahidin pada acara halal bihalal DPW Nas-Dem Banten di Kota



Mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim

Tangerang, Kamis, 18 April 2024.

Wahidin mengaku akan menjadi sebuah pertimbangan berat untuk maju sebagai cagub pada Pilgub Banten nanti jika perilaku pemilih masih sama brutal seperti pemilu kemarin.

"Kalau jor-joran seperti kemarin, saya pikir enggak ada untungnya. Kalau kita ngarep untung memang enggak ada, kepala daerah gajinya juga kecil. Tapi kan pengabdian," ujarnya.

Ia pun membandingkan perilaku pemilihan Pemilu 2024 dengan pemilihan saat dirinya mencalonkan diri sebagai cagub Banten pada 2017. Ia mengatakan, pemilihan lalu sangatlah berbeda dengan pemilihan saat ini yang terlalu

Pada pileg, WH menuturkan hanya sedikit melakukan pergerakan. Dirinya hanya mengandalkan pemilih fanatik yang murni mendukung dirinya agar bisa maju sebagai wakil rakyat di kursi DPR RI.

"Karena saya tidak ingin mengikuti persaingan yang tidak sehat itu," tuturnya.

NasDem, kata WH, saat ini sudah mulai melakukan penjaringan calon kepala daerah untuk maju pada Pilkada Banten. Pihaknya juga kini mulai membuka komunikasi dengan partai politik lain pada pilkada serentak ini.

Komunikasi ini dilakukan guna membentuk koalisi, mengingat baik Nas-

jagoan-jagoan dari trah politik lokal juga bakal turun ke gelanggang pilkada. Ada yang berstatus istri eks kepala daerah, putra-putri, atau bahkan kerabat dekat para petahana.

Dari lingkaran Istana, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, sudah digadang-gadang bakal maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Menantu Jokowi lainnya yang santer dikabarkan bakal nyalon di Pilkada 2024 adalah Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarep ini dibidik untuk maju di Pilbup Sleman. Setali tiga uang, Kaesang juga digadang-gadang bakal dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Di Banten, dinasti Ratu Atut Chosiyah



Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

transaksional.

Bahkan, pria yang menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Banten ini mengungkapkan, jika dirinya hanya mengeluarkan sedikit uang untuk berkampanye pada kontestasi Pilgub 2017.

"Itu kan masyarakatnya masih bagus, masih belum pragmatis seperti sekarang. Saya waktu itu relatif enggak banyak mengeluarkan uang, tidak banyak jor-joran juga pilkada. Beda, sekarang kondisi dinamika politik berkembang, perilaku masyarakat pada pileg kemarin sangat pragmatis dan transaksional," ungkapnya.

Dem maupun partai lainnya tidak ada yang mendapatkan tiket emas untuk maju di pilkada nanti.

"Kita realistis bahwa jika ada kader dari internal yang berpotensi maka akan kita usung di Pilkada nanti. Dan saat ini kita mulai bangun koalisi dengan partai lain. Kita kan harus berkoalisi karena harus 20 persen dari total kursi DPRD," ungkapnya.

Cengkeraman Dinasti Politik

Pilkada 2024 juga diyakini bakal diramaikan kandidat-kandidat dari dinasti politik. Tak hanya "titipan" dari Istana,

juga masih akan mendominasi pentas pilkada. Andika Hazrumy, putra Ratu Atut, misalnya, hampir pasti maju Pilbup Serang. Politikus Golkar Airin Rachmi Diany bakal maju di Pilgub Banten 2024. Airin adalah istri dari adik Ratu Atut, Wawan.

Di Kalimantan Timur, dinasti politik keluarga Mas'ud bakal meramaikan kontestasi politik. Setidaknya ada tiga politikus dari keluarga besar Mas'ud yang bakal maju di Pilkada Serentak 2024. Pertama, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud. Legislatur DPR itu membidik Pilgub Kalimantan

Timur.

Yang kedua, Rahmad Mas'ud. Eks Wali Kota Balikpapan itu berencana kembali maju di Pilwalkot Balikpapan. Terakhir, Hasanudin Mas'ud, kakak Rudy Mas'ud. Hasanudin bakal maju di Pilbup Kutai Kartanegara. Hasanudin saat ini menjabat Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Analisis politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Budiman membenarkan, politik dinasti bakal semakin menjamur di Pilkada Serentak 2024. Tak selalu berimplikasi negatif, Budiman berpendapat politik dinasti juga memiliki sisi positif.

Ia mencontohkan era kepemimpinan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Setelah dua periode menjabat, Azwar digantikan oleh istrinya, Fiestiandani. Pada 2021, Fiestandani terpilih jadi Bupati Banyuwangi lantaran publik menganggap kinerja Azwar ciamik selama memimpin Banyuwangi.

"Sementara contoh yang negatif itu di Banten. Walaupun pembangunan tidak begitu bagus, publik memilih lagi calon dari di-

nasti karena karakteristik feodalisme masih kuat di Banten," ucap Budiman, Kamis, 18 April 2024.

Politik dinasti, kata Budiman, menjamur lantaran terbangunnya simbiosis mutualisme antara parpol dan keluarga politik. Di daerah, parpol butuh figur yang punya pengaruh kuat untuk menggalang massa dan mengoper-



Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Andriadi Achmad

asionalkan sumber daya ekonomi dan politik untuk partai. Di lain sisi, trah politik memerlukan parpol sebagai kendaraan politik untuk maju di pilkada.

"Selain itu, hal ini terjadi karena ada beberapa partai itu pragmatis meskipun bukan kader dia yang dimajukan. Tetapi, lewat partai dia

setidaknya dia punya kontrol atau dia bisa memonopoli sumber-sumber kekuasaan yang lain. Ada hubungan yang saling membutuhkan antara partai dengan dinasti politik di daerah," ucap Budiman.

Selain Fiestandani, politik dinasti dalam kerangka relasi suami-istri juga terpentas

di Sleman. Kustini Sri Purnomo, pe-tahana Bupati Sleman bakal kembali maju di Pilkada Serentak 2024. Kustini mewarisi kursi Sleman 1 dari suaminya, Sri Purnomo.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, menyebut fenomena dinasti politik adalah hal lumrah. Namun di satu sisi, hal ini juga berpotensi akan menjadi role model perpolitikan Indonesia di masa yang akan datang.

Menurutnya, dinasti politik sebenarnya bukan hal asing, baik di Indonesia maupun luar negeri. Sebelum era reformasi, Soeharto pernah menunjuk putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana menjadi menteri sosial.

Andriadi menegaskan, meski suara rakyat menjadi penentu utama dalam Pilkada, tapi tak bisa dipungkiri bahwa tingkat popularitas dan finansial memiliki peran besar dalam memenangkan pilkada langsung.

"Sebetulnya dinasti politik atau istilah lain dipopulerkan sebagai politik keluarga sudah lama dipraktikkan dalam politik lokal seperti beberapa kabupaten/kota atau provinsi memberikan dukungan dan estafet kepemimpinan kepada istri atau suami atau anak atau adik dan keluarga lainnya," tutur Andriadi.

"Walaupun dalam pilkada tetap saja rakyat yang menjadi penentu utama soal keterpilihan, cuma perlu disadari dalam pilkada langsung saat ini di mana modal sosial, modal popularitas dan modal finansial sebagai modal elektabilitas (keterpilihan) bahkan penentu utama dalam memenangkan pilkada langsung," pungkasnya. ●



Analisis politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Budiman

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #42 APRIL 2024

MK TOLAK PERMOHONAN ANIES DAN GANJAR

